

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Eksistensi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantul**

**(Studi Evaluasi Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintah Daerah)**



**Oleh :**

**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si.  
Andreas A. Susanto, PhD**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2011**

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Eksistensi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantul**

**(Studi Evaluasi Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintah Daerah)**



**Oleh :**

**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si.  
Andreas A. Susanto, PhD**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2011**

# HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

No. Proposal :    /    /    /

---

1. a. Judul Penelitian : Eksistensi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantul (Studi Evaluasi Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah)  
b. Macam Penelitian : Lapangan

---

2. Personalia Penelitian :  
a. Nama : Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Usia saat pengajuan proposal : 44 tahun 4 bulan  
d. Jabatan akademik/Golongan : Asisten Ahli/ IV a  
e. Fakultas/Program Studi : ISIP/Sosiologi

---

3. Personalia Anggota Peneliti (bila ada)  
a. Nama Anggota 1 (lengkap dengan gelar) : Andreas A. Susanto, PhD  
b. Nama Anggota 2 (lengkap dengan gelar) : -

---

4. Lokasi Penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta

---

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

---

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

---

Anggota Peneliti

Yogyakarta, 15 September 2011

Ketua Peneliti

Andreas A. Susanto, PhD

Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Andreas A. Susanto, PhD

Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, M.A

Ketua LPPM  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MT

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul, kemudian menjelaskan alasan-alasan para perempuan di Kabupaten Bantul terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dan menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah gambaran partisipasi perempuan yang sesungguhnya pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul? Mengapa para perempuan desa di Kabupaten Bantul bersedia untuk terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan di desa tersebut ?

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Jenis penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embadded case study*. Pemilihan bentuk studi kasus terpancang tersebut, dikarenakan penelitian ini sudah menentukan fokusnya. Data dikumpulkan dengan melalui penelusuran data primer dan sekunder yang dijarah melalui observasi, wawancara tak berstruktur, *in depth interview*, serta dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984), yang lebih dikenal dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah dilibatkan dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Keterlibatan perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran perempuan akan tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Meski demikian, pada tahapan kegiatan berikutnya terlihat keterlibatan perempuan yang dilandasi atas keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum optimal karena masih bersifat pasif. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di dalam internal antar pelaksana di tingkat desa, dan pelaksana dengan pemerintah kabupaten; mekanisme yang “memaksa” perempuan terlibat dan berpartisipasi sebagai anggota tim pelaksana tingkat desa; masih besar peran serta keterlibatan aparat desa dan pelaksana program; Program Pemberdayaan Masyarakat lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; dan kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan tim pelaksana tingkat desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim pelaksana tingkat desa maupun pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat; dan anggota perempuan tim pelaksana tingkat desa mempunyai kemauan untuk belajar.

**Kata kunci** : *evaluasi implementasi program, pemberdayaan perempuan, dan pemerintah daerah.*



# KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul " Eksistensi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantul (Studi Evaluasi Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah)", dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran partisipasi perempuan yang sesungguhnya pada setiap tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul? kemudian mengapa para perempuan desa di Kabupaten Bantul bersedia untuk terlibat dalam Tim dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ? dan faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan desa di kabupaten tersebut?

Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan, terutama ditujukan bagi para pembaca dan peneliti yang menekuni kajian gender dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Tidak terkecuali juga hasil penelitian ini ditujukan pula bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, agar dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada keadilan gender.

Sehubungan dengan proses penyelesaian penelitian ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor serta para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung serta memberi kesempatan baik berupa moril maupun materiil kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dekan, Wakil Dekan, Dosen dan Karyawan di lingkungan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Tenaga lapangan yang dengan segenap waktu dan tenaganya membantu peneliti dalam pencarian data di lapangan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Bappeda Kabupaten Bantul yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan juga memberikan banyak informasi yang peneliti butuhkan.
6. Para responden dan informan yang telah sudi meluangkan waktu dan pikirannya, serta banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi analisis penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak pula membantu sehingga terselesaikannya penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun serta mengarah pada perbaikan tulisan ini dari para pembaca sekalian, akan penulis terima dengan senang hati dan tangan terbuka demi penyempurnaan hasil tulisan.

Akhir kata Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat penulis panjatkan, Karena berkat pertolongan-Nya maka penelitian dan tulisan ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terumata terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sensitif gender.

Yogyakarta, September 2011

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Esensi Nilai Dalam Kebijakan Publik .....	5
2.2. Implementasi Kebijakan .....	6
2.3. Konsep Evaluasi Implementasi .....	7
2.4. Konsep Partisipasi .....	8
2.5. Pengembangan Partisipasi Masyarakat .....	10
2.5.1. Lingkup Partisipasi .....	10
2.5.2. Bentuk dan Tipe Partisipasi .....	11
2.5.3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat .....	16
2.5.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	17
2.6. Perempuan Miskin Dan Pemberdayaan Perempuan .....	18
2.7. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan .....	21
2.8. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya ...	23
2.8.1. Evaluasi Program .....	23
2.8.2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program ....	31
2.8.3. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat .....	31
2.9. Kerangka Pemikiran .....	33
 <b>BAB III MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1. Masalah Penelitian .....	35
3.2. Tujuan Penelitian .....	35
3.2. Manfaat Penelitian .....	35
 <b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
4.1. Fokus Penelitian .....	36
4.2. Metode Penelitian .....	36
4.3. Penentuan Lokasi Penelitian .....	37
4.4. Sumber Informasi .....	37

4.5. Pengumpulan Data .....	37
4.6. Analisis Data .....	38
4.7. Keabsahan Data .....	39
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Deskripsi Daerah Penelitian .....	41
5.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul .....	41
5.1.1.1. Wilayah .....	41
5.1.1.2. Penggunaan Lahan .....	45
5.2. Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul .....	48
5.2.1. Perekonomian Daerah .....	48
5.2.2. Industri, Perdagangan dan UKM .....	58
5.2.3. Pertanian .....	63
5.2.4. Ketahanan Pangan .....	65
5.2.5. Kehutanan dan Perkebunan .....	67
5.2.6. Perikanan dan Kelautan .....	69
5.2.7. Energi dan Sumber Mineral .....	71
5.2.8. Pariwisata .....	71
5.2.9. Sosial Budaya Daerah .....	74
5.2.10. Pemberdayaan Masyarakat .....	94
5.2.11. Prasarana dan Sarana Daerah .....	96
5.2.12. Perumahan dan Permukiman .....	106
5.2.13. Listrik .....	107
5.2.14. Komunikasi dan Informasi .....	107
5.3. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Bantul .....	108
5.4. Penyebab Kemiskinan .....	111
5.5. Partisipasi Perempuan Pada Setiap Tahapan Pelaksanaan Program Serta Alasan yang Mendasarinya untuk Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat .....	114
5.5.1. Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemilihan Anggota Kelompok/Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa .....	115
5.5.2. Pembekalan dan Survei Oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Ma- syarakat .....	116
5.5.3. Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat .....	117
5.5.4. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat .....	118
5.5.5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Program .....	119
5.6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemberdayaan Pe- rempuan di Kabupaten Bantul .....	120
5.7. Pembahasan .....	125
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	130
6.2. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>

# DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipa .....	12
TABEL 2.2.	Tipe Partisipasi .....	13
TABEL 2.3.	Ragam Bentuk Partisipasi Masyarakat .....	15
TABEL 5.1.	Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul ...	41
TABEL 5.2.	Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2008	43
TABEL 5.3.	Intensitas Curah hujan tahun 1999 – 2008 .....	44
TABEL 5.4.	Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	47
TABEL 5.5.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009 .....	48
TABEL 5.6.	Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	48
TABEL 5.7.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 .....	49
TABEL 5.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009 (Persen) .....	50
TABEL 5.9.	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	51
TABEL 5.10.	Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	52
TABEL 5.11.	Perkembangan Investasi Tahun 2005-2009 .....	53
TABEL 5.12.	Peran Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2009 .....	53
TABEL 5.13.	Realisasi APBD Tahun 2006-2009 dan Target APBD Tahun 2010 (Rupiah) .....	54
TABEL 5.14.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010 .....	56
TABEL 5.15.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006 (Rupiah) ...	57
TABEL 5.16.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2007-2010 (Rupiah) .....	57
TABEL 5.17.	Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Rupiah) .....	58
TABEL 5.18.	Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	59
TABEL 5.19.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	60
TABEL 5.20.	Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009 .....	61
TABEL 5.21.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	62
TABEL 5.22.	Jumlah dan Anggota Koperasi di Bantul Tahun 2005-2009 .....	63
TABEL 5.23.	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009 .....	64

TABEL 5.24.	Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	65
TABEL 5.25.	Produksi daging, telur, dan susu di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	65
TABEL 5.26.	Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	66
TABEL 5.27.	Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	66
TABEL 5.28.	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	67
TABEL 5.29.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	68
TABEL 5.30.	Luas Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	68
TABEL 5.31.	Hasil Produksi Hutan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	68
TABEL 5.32.	Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Tembakau, Mete, Tebu, Kelapa di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	69
TABEL 5.33.	Kecamatan dan Desa Pesisir .....	70
TABEL 5.34.	Sarana prasarana milik nelayan Kabupaten Bantul tahun 2009 .....	70
TABEL 5.35.	Sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009 .....	71
TABEL 5.36.	Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009 .....	72
TABEL 5.37.	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009 .....	73
TABEL 5.38.	Angka Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	74
TABEL 5.39.	Jumlah dan proporsi Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2009 .....	75
TABEL 5.40.	Penduduk Berdasar Mata Pencapaian Utama Tahun 2009 .....	76
TABEL 5.41.	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007 dan 2008 ..	76
TABEL 5.42.	Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Tahun 2009 .....	77
TABEL 5.43.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2009 .....	78
TABEL 5.44.	Indeks Pemberdayaan Gender .....	78
TABEL 5.45.	Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	79
TABEL 5.46.	Angka Kesakitan Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	80
TABEL 5.47.	Sepuluh Besar Pola Penyakit Kasus Rawat Jalan di RSUD Panembahan Senopati Untuk Semua Golongan Umur Tahun 2009	81
TABEL 5.48.	Sepuluh Besar Pola Kematian Menurut Penyakit Ranap di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2009 .....	81
TABEL 5.49.	Kepesertaan Keluarga Berencana Tahun 2009 .....	82
TABEL 5.50.	Status Gizi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	83
TABEL 5.51.	Cakupan Program Perbaikan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....	84
TABEL 5.52.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009	85

<b>TABEL 5.53.</b>	<b>Jumlah Pegawai Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....</b>	<b>86</b>
<b>TABEL 5.54.</b>	<b>Anggaran Kesehatan Rutin dan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2005-2008 .....</b>	<b>87</b>
<b>TABEL 5.55.</b>	<b>Kualitas Perumahan, Jamban, dan SPAL di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 .....</b>	<b>87</b>
<b>TABEL 5.56.</b>	<b>Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2006/2007 – 2008/2009 .....</b>	<b>91</b>
<b>TABEL 5.57.</b>	<b>Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009 .....</b>	<b>91</b>
<b>TABEL 5.58.</b>	<b>Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2009 .....</b>	<b>92</b>
<b>TABEL 5.59.</b>	<b>Jumlah keluarga miskin Kab. Bantul tahun 2008-2009 .....</b>	<b>96</b>
<b>TABEL 5.60.</b>	<b>Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009 .....</b>	<b>97</b>
<b>TABEL 5.61.</b>	<b>Trayek Angkutan Umum (Pedesaan/Perbatasan) yang Masih Beroperasi Tahun 2007 – 2009 .....</b>	<b>98</b>
<b>TABEL 5.62.</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>99</b>
<b>TABEL 5.63.</b>	<b>Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009 .....</b>	<b>99</b>
<b>TABEL 5.64.</b>	<b>Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2009 .....</b>	<b>101</b>
<b>TABEL 5.65.</b>	<b>Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008 .....</b>	<b>103</b>
<b>TABEL 5.66.</b>	<b>Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008 .....</b>	<b>104</b>
<b>TABEL 5.67.</b>	<b>Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul .....</b>	<b>105</b>
<b>TABEL 5.68.</b>	<b>Dentitas/Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul 2009 Jumlah KK dan Jiwa Kepala Keluarga Miskin 2009 .....</b>	<b>109</b>
<b>TABEL 5.69.</b>	<b>Pendidikan Kepala Keluarga .....</b>	<b>110</b>
<b>TABEL 5.70.</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin karena Aspek Pangan, Sandang, dan Papan .....</b>	<b>111</b>
<b>TABEL 5.71.</b>	<b>Kemampuan Keluarga Miskin dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Pendidikan, Air Bersih, dan Listrik .....</b>	<b>113</b>
<b>TABEL 5.72.</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin menurut Kepemilikan Aset .....</b>	<b>114</b>
<b>TABEL 5.73.</b>	<b>Pengelompokkan Masyarakat Berdasarkan Kriteria yang Dirumuskan Tim, Fasilitator, dan Masukan Masyarakat .....</b>	<b>117</b>
<b>TABEL 5.74.</b>	<b>Profil Gender Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat .....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.</b>	<b>Persyaratan Kelayakan Program .....</b>	<b>23</b>
<b>GAMBAR 2.</b>	<b>Model Analisis Interaktif .....</b>	<b>39</b>
<b>GAMBAR 3.</b>	<b>Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009.....</b>	<b>73</b>
<b>GAMBAR 4.</b>	<b>APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009 .....</b>	<b>89</b>
<b>GAMBAR 5.</b>	<b>APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009 .....</b>	<b>90</b>
<b>GAMBAR 6.</b>	<b>Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2004 – 2009 .....</b>	<b>95</b>
<b>GAMBAR 7.</b>	<b>Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009 .....</b>	<b>100</b>
<b>GAMBAR 8.</b>	<b>Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009 .....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang :

*“Empowering women is one of the most crucial concerns of the Millennium Development Goals of the United Nations.”* Kajian mengenai pemberdayaan masyarakat memiliki relevansi yang kuat seiring dengan terjadinya transformasi sosial pada tingkat lokal, regional, dan global. Ketidakberdayaan masyarakat akan menghambat kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi perubahan sistem dan internasional. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari upaya suatu bangsa untuk menghadapi tantangan yang bersifat global.

Salah satu bidang pemberdayaan masyarakat yang mendapat perhatian besar dewasa ini adalah pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hampir segala aspek kehidupan juga masih cukup lebar. Gambaran tentang kesenjangan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan perspektif *Human Development Report* yang menggunakan *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measure (GEM)* sebagai dua cara pengukuran ketidakadilan gender.

Dalam tabel GDI yang menggambarkan kondisi 130 negara, Indonesia menempati urutan ke-68 dengan nilai 0,591. Bagian dari penghasilan yang diperoleh perempuan adalah 25,3 persen dan laki-laki 74,7 persen; harapan hidup perempuan 64,5 tahun dan laki-laki 61,0 tahun (data tahun 1992); angka melek huruf perempuan (dewasa) 76,4 persen dan laki-laki (dewasa) 88,8 persen (data tahun 1990); dan gabungan *ratio gross enrolment* pendidikan primer, sekunder, dan tersier untuk perempuan adalah 57,1 persen dan laki-laki 63,5 persen. Di antara 5 (lima) negara ASEAN, Indonesia berada pada urutan terbawah, di bawah Filipina yang menempati urutan 64 dalam tabel GDI. Sedangkan berdasarkan tabel GEM, di antara 116 negara, Indonesia menempati urutan ke-56. Tabel GEM tersebut menunjukkan di Indonesia, persentase perempuan dalam parlemen 12,2 persen (data tahun 1994); perempuan dalam kedudukan administrator dan manajer 6,6 persen (data tahun 1992); perempuan sebagai profesional dan pekerja teknis 40,8 persen; dan bagian dari penghasilan yang diperoleh perempuan adalah 25,3 persen. Berdasarkan indikator ini, Indonesia menempati urutan terbawah di antara negara-negara ASEAN (Priyono, 1996).



Meskipun pengukuran GDI dan GEM masih mengandung banyak kelemahan, tetapi hasilnya cukup dapat memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan tentang keadaan, kedudukan, dan derajat keberdayaan perempuan. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan terkait dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Sejak akhir dasa warsa 80-an atau awal dasa warsa 90-an, pemerintah di negara-negara maju mulai menyadari bahwa kebijakan publik tidak bisa bebas nilai atau tanpa nilai, melainkan harus mengandung nilai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Abdul Wahab, 1994). Pembangunan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai persoalan perbaikan (*improvement*) terhadap struktur ekonomi suatu masyarakat dan penciptaan kemakmuran, tetapi juga mempersoalkan bagaimana kemakmuran itu didistribusikan, untuk siapa, dan kenapa (lihat Abdul Wahab, 1994).

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Salah satu program pembangunan yang diturunkan dari kebijakan tersebut adalah Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemberdayaan Masyarakat). Program tersebut meliputi: Pertama, sifat dari Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni *participatory planning, monitoring and evaluation*; Kedua, tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni bermaksud untuk : (1) mendukung upaya desentralisasi pemerintahan; (2) memberdayakan masyarakat kelurahan/desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah; (3) meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, tata negara, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan pada tingkat kabupaten/kota, (4) mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar, (5) menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal, dan (6) meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar; Ketiga : prinsip dasar Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni demokrasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas/dapat dipertanggungjawabkan, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat (Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, 2001).

Berkenaan dengan prinsip pemberdayaan, selanjutnya dalam Buku I Landasan PPME Dalam Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan bahwa prinsip pemberdayaan memberikan landasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi partisipatif dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan penduduk dan kelembagaan desa agar mereka mempunyai kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk mengelola

sumberdaya desa. Dalam prinsip pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan orang miskin dan pemberdayaan perempuan (halaman 11). Selanjutnya, dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kapasitas perempuan agar memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya desa, dalam arti memiliki kompetensi untuk : (1) terlibat dalam menentukan kebutuhan perbaikan penduduk dan kelembagaan desa; (2) berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan, dalam arti terlibat dalam pengambilan keputusan dan terwakili dalam setiap tahap kegiatan, (3) melakukan akses segala aspek kehidupan, (4) melakukan kontrol dalam arti pengendalian dirinya sendiri dan pengendalian masyarakat (halaman 12).

Kabupaten Bantul memberi perhatian yang sangat besar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat ini dengan memberikan bantuan ternak kepada ibu-ibu rumah tangga untuk dikelola. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul, khususnya proses, implementasi, dan prospek pemberdayaan perempuan, menarik untuk dikaji dan dievaluasi, karena beberapa alasan berikut: **Alasan pertama**, keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan, yang tentu saja terkait dengan penilaian atas kinerja TKK, UPP, KMD, fasilitator desa, dan Tim pelaksana tingkat desa sendiri, baru sebatas pengakuan para pelaksana program. Oleh karena itulah, keberhasilan tersebut masih perlu untuk dibuktikan. **Alasan kedua**, konsultan/ahli dalam program mengharuskan separuh dari Tim Inti adalah perempuan. Keharusan ini bagaimanapun merupakan bentuk pemaksaan keterlibatan perempuan yang kontradiktif dengan konsep pemberdayaan perempuan. Menurut Kelller dan Mbewewe (1991), Women's empowerment is "a process whereby women become able to organize themselves to increase their own self-reliance, to assert their independent right to make choices and to control resources which will assist in challenging and eliminating their own subordination". **Alasan ketiga**, masih diperlukan penelitian terhadap sejauh mana perempuan ikut berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi, menyusun agenda kegiatan, dan mengambil keputusan.

## 1.2. Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah gambaran partisipasi perempuan pada tiap tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul?
- b. Mengapa para perempuan desa di Kabupaten Bantul bersedia terlibat dalam Tim dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ?

- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan desa di Kabupaten Bantul ?



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Esensi Nilai Dalam Kebijakan Publik

Masalah nilai (*value*), dalam diskursus analisis kebijakan publik, berkaitan dengan *metapolicy* yang menyangkut hakikat (*substance*), perspektif, sikap, dan perilaku (yang dinyatakan secara tersembunyi maupun terbuka) dari aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik (Abdul Wahab, dalam ZA Akhmadi, dkk, 1994). *Metapolicy* mempersoalkan mengapa kebijakan tertentu dipikirkan dan bagaimana ia diimplementasikan. Sebagai bidang kajian, *metapolicy* lebih memfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang agak filosofis (dan politis) ketimbang masalah-masalah yang bersifat teknis-administratif.

Perhatian terhadap peran nilai dalam kebijakan publik menjadi penting oleh karena kebijakan publik memang tidak pernah bebas nilai (*value free*) atau tanpa nilai (*valueness*), melainkan sarat nilai (*value loaded*). Untuk mencapai perspektif yang lebih seimbang (adil), kebijakan publik perlu mulai dari satu set nilai yang cakupannya lebih luas dari sekadar pembangunan untuk penciptaan kemakmuran, tetapi juga mengandung nilai yang memperhatikan bagaimana kemakmuran itu dapat terdistribusikan secara adil pada semua komponen masyarakat.

Masalah *environmental protection*, *human-right*, dan pemberdayaan perempuan adalah masalah nilai. Masalah pemberdayaan perempuan, akhir-akhir ini kian dirasa penting, dan bahkan dijadikan sebagai salah satu isu yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Masalah pemberdayaan perempuan, sering dituntut untuk dinyatakan secara tegas (eksplisit), tidak sekedar secara implisit (apalagi simbolik), dalam setiap kebijakan pembangunan. Oleh karena itulah, pembuat kebijakan, yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kemaslahatan umum (*public good*) perlu memperhatikan masalah-masalah tersebut, mengingat masalah pemberdayaan perempuan merupakan salah satu unsur dari kebaikan publik sebagaimana yang dinyatakan oleh Fisterbusch, yakni keadilan atau *justice* (selengkapnya, lihat Abdul Wahab dalam ZA Akhmadi, dkk, 1994).

## **2.2. Implementasi Kebijakan**

Fungsi implementasi kebijakan publik adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* (Abdul Wahab, 1990). Fungsi tersebut mencakup penciptaan *policy delivery systems* yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Dari *policy* itu kemudian berbagai macam program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Program-program itu diperinci lebih lanjut ke dalam bentuk proyek sebagai instrumen untuk mengimplementasikan program. Maksud utama daripada program dan proyek-proyek yang tercakup di dalamnya ialah untuk menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam lingkungan kebijakan (Rondinelli, dalam Abdul Wahab, 1990).

Grindle (dalam Abdul Wahab, 1990) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah dana

telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik di bidang kesehatan masyarakat, perumahan rakyat, *land reform*, pendidikan, atau pembangunan pedesaan terpadu, hanya akan menjadi retorika politik atau slogan politik (Hogwood dan Gunn, dalam Abdul Wahab, 1990).

Kajian implementasi kebijakan di berbagai negara sedang berkembang menunjukkan beberapa perbedaan antara pelaksanaan kebijakan di negara sedang berkembang dan di negara-negara maju. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya tampak dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga terlihat dalam tipe, pembuatan dan dalam evaluasi kebijakan. Kebanyakan kebijakan di negara-negara maju bersifat inkremental, sedangkan di negara-negara sedang berkembang bersifat merombak dan ambisius karena sering dimaksudkan untuk membuat perubahan sosial (Santoso, 2005).

Suatu kebijakan bisa mengalami kegagalan pada tahap implementasinya, dimana kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan memiliki resiko untuk gagal apabila pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), atau kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Menurut Hogwood dan Gunn (dikutip oleh Abdul Wahab, 1990), pengertian kegagalan kebijakan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan apabila suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai rencana. Kegagalan ini mungkin karena kurang kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan, cara kerja yang tidak efisien, atau pelaksana kurang sepenuhnya menguasai permasalahan. Kemungkinan lain adalah permasalahan berada di luar kemampuan mereka, atau karena kondisi eksternal yang tidak menguntungkan (seperti tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan atau bencana alam) .

Santoso (2005) menjelaskan sekurang-kurangnya ada 9 faktor yang harus dianalisa dalam implementasi kebijakan di Indonesia, yaitu: ketanggapan, pertanggungjawaban, pengawasan, program yang diprioritaskan, personel birokrasi, sumberdaya, koordinasi, serta sanksi dan ganjaran.

### **2.3. Konsep Evaluasi Implementasi**

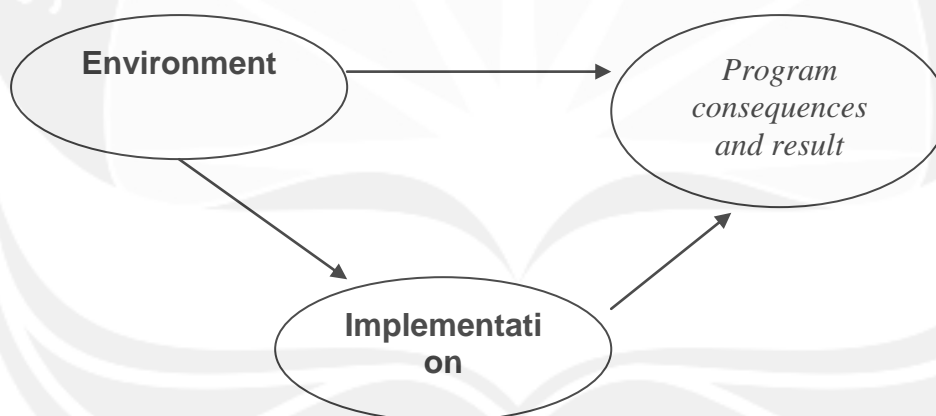
Dasar dari pentingnya evaluasi kebijakan adalah suatu kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. Menurut Ripley (1985) ada 2 perspektif utama dalam studi evaluasi implementasi kebijakan., yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening*.

Perspektif *compliance* melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada di dalamnya bersifat fungsional dalam suatu tatanan hierarkhi administrasi. Dengan kata

lain, perspektif *compliance* ini menunjukkan adanya batas-batas kedudukan superior dan sub ordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif *compliance* ini adalah berkisar pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada pada posisi sub ordinat kepada perintah-perintah mereka yang ada di posisi superior. Jika derajat kepatuhan itu tinggi maka implementasi sudah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika derajat kepatuhan rendah maka implementasinya dinilai buruk. Asumsinya adalah jika hubungan yang terjadi dalam organisasi berjalan sesuai ketentuan maka program dengan sendirinya akan berjalan dengan baik.

Sedangkan perspektif *what's happening*, mempunyai asumsi ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Ripley menggambarkan hubungan faktor-faktor itu sebagai berikut :



Ripley menjelaskan perspektif *what's happening* dengan membuat kategori x dan y. Jika kita melakukan sesuatu (x) maka akibat yang diinginkan (y) akan terjadi. Variabel x dalam formulasi sederhana adalah *treatment* program-program khusus dan faktor lainnya, baik organisasi-organisasi dengan kekhususan tertentu dan proses birokratis yang akan memfasilitasi implementasi yang diinginkan dan target populasi siapa-siapa yang akan memperoleh manfaat sebuah program. Sedangkan variabel y adalah akibat-akibat yang diinginkan.

Penelitian ini akan menggunakan baik perspektif *compliance* maupun *what's happening*, untuk mengupayakan komprehensifitas.

## 2.4. Konsep Partisipasi

Menurut Conyers (1991 dan Tjokrowinoto (1987), partisipasi merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi memiliki arti penting karena beberapa hal berikut (Tjokrowinoto (1987):

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
- h. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah
- i. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Menurut Winardi (1983), secara formal partisipasi dapat didefinisikan sebagai :

“turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan terdapat dan orang-orang yang bersangkutan melakukan hal itu”.

Davis (dalam Ndraha, 1987) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan perasaan individu dalam suatu kelompok (masyarakat) untuk bersedia memberikan kontribusinya dalam mencapai tujuan kelompok disertai rasa ikut bertanggungjawab.

Sedangkan, pengertian partisipasi menurut Mikkelsen (1999: 64) adalah:

1. Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Kepekaan masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Suatu proses yang aktif, dimana orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya;

5. Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek;
6. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya.

Sementara Allport (dalam Sastropoetra, 1986:12), menjelaskan bahwa partisipasi meliputi 3 unsur penting, yaitu:

- a. Keterlibatan mental emosional seseorang yang lebih daripada keterlibatan fisik.
- b. Kerelaan untuk memberikan kontribusi dalam program pembangunan baik itu berupa tenaga, uang, pemikiran, keterampilan dan sebagainya.
- c. Kesiediaan untuk ikut bertanggungjawab.

Secara operasional, partisipasi adalah pelibatan diri seseorang secara sadar dan sukarela dalam salah satu atau lebih tahapan-tahapan implementasi, meliputi :

- a. *Idea Planning*, yaitu suatu tahapan dimana seseorang ikut aktif melibatkan diri dengan menyumbangkan pikirannya di dalam merencanakan suatu kegiatan organisasi.
- b. *Implementasi*, yaitu merupakan suatu tahap dimana seseorang ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- c. *Utilization*, yaitu tahapan dimana seseorang ikut menggunakan atau memanfaatkan hasil-hasil dari usaha bersama yang telah disepakati.
- d. *Responsibility*, suatu tahapan dimana seseorang ikut bertanggungjawab atas semua yang dilakukan serta hasil yang telah dicapainya.

## **2.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

### **2.5.1. Lingkup Partisipasi**

Secara konvensional, program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya akses yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi seluruh masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi perlu lebih diperjelas sebagai pemerataan sumbangan masyarakat (dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragaman bentuk pengorbanan lain) yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima.



Di samping itu, dalam pelaksanaan pembangunan sering dilupakan bahwa partisipasi masyarakat juga termasuk dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan, agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, serta untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, fungsi dan peran aparat pemerintah.

Seringkali, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat Sasarannya. Padahal, seringkali masyarakat luas justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

#### **2.5.2. Bentuk dan Tipe Partisipasi**

Bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara

memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi**

<b>Nama Pakar</b>	<b>Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi</b>
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Tipe Partisipasi**

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulative	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian;(c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;(d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;(c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5.	Partisipasi fungsional	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati;(c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh

		penyelenggaraan kegiatan.
7.	<i>Self mobilization</i>	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; (b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

**Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33)**

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

Selanjutnya Dusseldorp (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

Selain itu, Slamet (1985) juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, seperti berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Ragam Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Yang Ditunjukkan	Ragam Partisipasi				
	1	2	3	4	5
Memberikan Input	+	+	+	+	-
Menerima imbalan atas input	+	-	+	-	-

yang diberikan					
Menikmati manfaat hasil	+	+	-	-	+

- (1) Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, dan ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada petani yang ikut padat karya perbaikan saluran pengairan yang mengairi sawahnya.
- (2) Ikut terlibat dalam proses pembangunan, tidak memperoleh imbalan atas korban yang diberikan, tetapi juga ikut menikmati hasil pembangunan. Partisipasi bentuk ini dapat dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan yang mengairi sawahnya, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan lingkungannya.
- (3) Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini, tidak dapat dilihat pada para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang. Dalam kasus seperti ini, meskipun para pekerja tersebut turut berpartisipasi dalam pembuatan hotel, mereka tidak akan turut menikmati hasil pembangunannya,
- (4) Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, bisa dilakukan oleh para penyumbang dana atau sponsor-sponsor kegiatan social (pendirian panti asuhan, dan lain-lain).
- (5) Tidak ikut memberikan input, sehingga tidak menerima imbalan, tetapi ikut menikmati hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, dapat dijumpai pada “pihak ketiga” atau keluarga/kerabat pejabat, meskipun partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki di dalam proses pembangunan.

Dari kelima macam keragaman partisipasi seperti di atas, bentuk partisipasi nomor (2) lebih banyak dikembangkan, dan model (4) hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapis-atas”, sedangkan partisipasi model (5) seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun sulit direalisasikan.

### 2.5.3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- (a) Cakupan. Semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- (b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa, ketrampilan dan sebagainya untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan tanpa memperhitungkan jenjang status.
- (c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif.
- (d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- (e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas atas keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- (f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Melalui keterlibatan dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- (g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada.

Menurut Wolcook dan Narayan (2000), partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan *sinergi* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun *sinergi* dalam "jejaring komunitas" (*community network*). Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Upaya menumbuhkan atau pengembangan partisipasi masyarakat berkaitan dengan beberapa kondisi berikut:

- a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki
- b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan masyarakatnya sendiri
- c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
- d) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

#### **2.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

## 2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup dominan dalam kultur berbagai bangsa menempatkan peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga. Dengan peran ini, perempuan cenderung kurang dianggap penting dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

## 3. Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi karena dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya,

## 4. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk I berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

## 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih besar, sehingga mempengaruhi partisipasinya

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
1. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
2. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
3. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
4. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
5. Kepentingan umum murni dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, yang tidak ditunggangi oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.
6. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
7. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
8. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, dan dengan pimpinannya, serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong kesempatan partisipasi;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi.

## **2.6. Perempuan Miskin Dan Pemberdayaan Perempuan**

Kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Untuk mengukur kemiskinan absolut digunakan parameter berdasarkan pengeluaran setara beras per kapita (Sajogyo, 1982, BPS dan Bangdes, 1990), sedang kemiskinan relatif sering diukur dengan menggunakan Gini Ratio sesuai patokan *World Bank* (Hananto, 1987, Rusli, 1995). Klasifikasi kemiskinan relatif berdasarkan Gini Ratio didasarkan apabila lapisan 40 persen penduduk terbawah hanya menerima jumlah pendapatan dengan kriteria sebagai berikut; 1. ketimpangan tinggi ketika menerima kurang dari 12 persen seluruh pendapatan; 2. ketimpangan sedang apabila menerima 12 sampai 17 persen dari jumlah pendapatan; dan ketimpangan rendah apabila menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan (Hananto, 1987).

Perempuan sering diidentikan dengan kemiskinan. Sekitar 69 persen penduduk di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian tergolong miskin. Dalam rumah tangga atau keluarga miskin, perempuan dapat dikatakan mengalami kemiskinan yang paling berat. Kemiskinan yang dialami perempuan ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan upah yang rendah, serta ketergantungan perempuan secara ekonomi terhadap suami.

Perempuan miskin merupakan kelompok marjinal yang mengalami ketidakberdayaan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dalam keterbatasan sumberdaya dan ketidakberdayaan perempuan tentu saja kelompok perempuan menjadi pihak yang harus dikorbankan dan tersingkir. Ketidakberdayaan perempuan miskin di pedesaan memaksa mereka harus tercerabut dari akar kehidupannya untuk ikut mencari nafkah meskipun harus meninggalkan pedesaan, karena pedesaan tidak mampu lagi dijadikan sebagai penopang kehidupannya (Booth, 1984).



Ketidakberdayaan perempuan miskin di perdesaan untuk akses dan kontrol sumberdaya perdesaan lebih disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki perempuan seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan serta pengetahuan sehingga tidak mampu mengembangkan inovasi pemanfaatan sumberdaya yang ada disekitar mereka.

Rendahnya produktivitas perempuan dapat dilihat melalui pendapatan yang diterima dari pekerjaannya. Perempuan terpaksa banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dengan anggapan perempuan memiliki *human capital* berupa pendidikan, latihan dan pengalaman kerja yang lebih rendah (Nasikun, 1990). Studi empirik di perdesaan Jawa Barat menyebutkan bahwa tekanan ekonomi memaksa perempuan harus bekerja demi kelangsungan hidup (Sajogyo, 1986). Dalam kondisi demikian perempuan dilihat dari dua sisi yaitu peran produksi dan reproduksi yang berpijak di rumah tangga dan di pasar kerja. Sementara di pasar kerja perempuan harus mampu bersaing dengan bekal *human capital* rendah, memberi konsekuensi pendapatan yang rendah harus diterima perempuan (Stichter, 1990 dan Zain, 1994). Terjadi kenaikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia seiring dengan bertambahnya kemiskinan rumah tangga sehingga perempuan akan mencari cara penyelamatan dari himpitan kemiskinan dengan memasuki lapangan pekerjaan seadanya (Oey, 1985).

Pada kondisi terhimpit kemiskinan memaksa perempuan mencari kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan guna menopang pemenuhan kebutuhan yang semakin sulit terpenuhi apabila hanya mengandalkan kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah utama. Kemudian terjadi peningkatan partisipasi perempuan menikah terlibat dalam pekerjaan guna memperoleh upah. Keadaan itu menyebabkan terjadinya perubahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga bahkan terjadi penurunan jam kerja perempuan dalam mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan (Horchchild, 1989; Baxter, 1993; Brines, 1994; Webster dan Baxter dalam Baxter, 2002). Perempuan perdesaan terpaksa mencari nafkah masuk ke sektor produksi tanpa disertai modal dan keterampilan, karena keterbatasan yang dimiliki memaksa perempuan bekerja dengan pendapatan yang sangat rendah. Pembangunan pertanian di perdesaan Jawa tahun 1970 an justru berdampak pada tergesernya perempuan dari pertanian, sementara untuk memasuki sektor diluar pertanian belum siap menjadikan perempuan semakin terpinggirkan.

Pendapatan merupakan variabel yang dapat dijadikan indikator untuk melihat kekuasaan dan pengambilan keputusan di rumah tangga (Cohen, 1998). Perempuan yang mempunyai pendapatan, menjadikan perempuan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya bahkan ikut membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi (Sadli, 1991). Pendapatan menjadi menjadi faktor penting agar perempuan memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah

tangga. Penelitian di perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dengan berpenghasilan sendiri perempuan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri (Hull dalam Budiman, 1991).

Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya (Budiman, 1984; Fakih, 1996; Megawangi, 1999). Konstruksi sosial dalam perbedaan jender telah melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan berupa subordinasi, diskriminasi, marginalisasi, kekerasan, pelabelan negatif serta beban kerja yang berat sebelah (Fakih, 1996).

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi aksi (Karl, 1995). Pemberdayaan perempuan miskin berarti proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan miskin dalam pengentasan kemiskinan. Proses kesinambungan harus diikuti dengan konsistensi terhadap tujuan peningkatan kemampuan perempuan miskin sebagai subjek.

## **2.7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan**

Program-program pembangunan di era 1990-an, yang dimulai dari program IDT, telah menunjukkan tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pembangunan alternatif yang melihat pentingnya manusia (masyarakat) tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek pembangunan. Dalam konteks ini, “partisipasi masyarakat sepenuhnya” dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Selama ini, keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Partisipasi menjadi bentuk yang pasif (Midgley, dalam Vidhyandika Moeljarto, 1996).

Terhadap pengertian konsep partisipasi di atas, terjadi tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi partisipasi masyarakat yang lebih *genuine*, aktif, kritis. Konsep yang baru tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan konsep partisipasi aktif dan kreatif atau seperti yang dikemukakan oleh Paul (1987) dalam Vidhyandika Moeljarto (1996) “....*participation refers to an active process*

*whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”.*

Kemampuan masyarakat untuk “mewujudkan” dan “mempengaruhi” arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan *power* yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan *central theme* atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif kreatif. Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau *breakdown* dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek (termasuk dikotomi laki-laki – perempuan). Proses ini mementingkan adanya “pengakuan” subyek akan “kemampuan” atau “daya” (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya (*flow of power*) dari subyek ke obyek. Pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut.

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan juga meliputi pemberdayaan psikologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik, yang berkaitan erat satu sama lain, karena dengan adanya jaringan kerja sama di antaranya yang saling memberdayakan dapat tercipta transformasi sosial di mana tidak ada penekanan dan pembudakan terhadap kaum perempuan (Priyono, 1996).

Berkenaan dengan partisipasi perempuan dan pemberdayaan, hasil studi di Amerika Latin menggambarkan bahwa perempuan dapat menjadi berdaya melalui pembentukan organisasi atau kelompok yang beraneka ragam tujuannya. Perempuan yang bekerja dengan perempuan lain dalam suatu organisasi ataupun suatu kelompok, akan menjadi lebih berdaya dibandingkan dengan perempuan yang bertindak sendiri. Jaringan kerja dan berorganisasi merupakan tindakan kolektif, yang cenderung memperkuat proses pemberdayaan sosial-budaya, psikologi, dan politik bagi perempuan.

Perempuan sebagai kelompok akan menjadi lebih berdaya dalam masyarakat, dengan menetapkan dirinya sebagai orang swatantra (*autonomous*). Proses pemberdayaan dalam kelompok atau organisasi terjadi melalui komunikasi yang menimbulkan pemikiran asli, yaitu keprihatinan terhadap kenyataan hidup. Sedangkan pemikiran ini tidak akan timbul jika perempuan berada dalam keadaan terpencil.

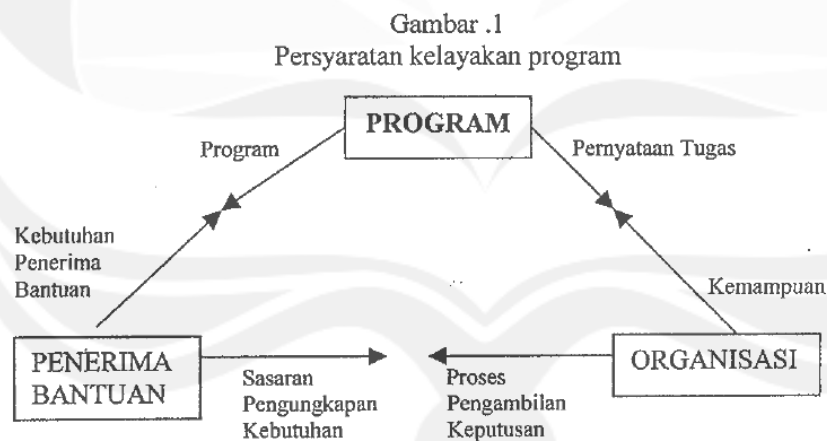
Menurut McCarthy (1994) dalam Priyono (1996), terdapat tiga strategi perempuan berpartisipasi dalam organisasi nirlaba (NGO). Pertama, separatisme di mana perempuan bekerja sama dengan perempuan dalam mengembangkan organisasi nirlaba dan gerakan pembaharuan sosial. Kedua, asimilasi di mana perempuan bekerja dalam lembaga yang dikendalikan laki-laki, dan perempuan pada umumnya bertindak sebagai donor. Ketiga, individualisme di mana perempuan membentuk dan mengendalikan lembaganya sendiri.

Sedangkan kalau melihat keadaan di Indonesia, ketiga strategi tersebut dapat diperluas menjadi sembilan model strategi partisipasi perempuan dalam organisasi yang merupakan kondisi atau syarat pendukung untuk dapat memberdayakan perempuan, melalui : (1) pemisahan atau separatisme; (2) emansipasi; (3) asimilasi; (4) integrasi atau penunjang; (5) kedudukan atau status sosial; (6) pengamalan bakat atau minat; (7) individualisme; (8) naungan di bawah pelindung; dan (9) keluarga (selengkapnya, lihat Priyono, 1996).

## 2.8. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya

### 2.8.1. Evaluasi Program

Menurut David C. Korten dalam Moeljarto Tjokrowinoto (1996) mengemukakan konsep Three Way Fit atau kesesuaian tiga arah. Teori ini menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas suatu program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program. Secara skematis persyaratan kelayakan program dapat dikemukakan dalam gambar berikut ini :



**Sumber : David C. Korten (dalam Tjokrowinoto, 1996)**

Menurut David C. Korten, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada hubungan erat atau sinergi (kesesuaian) antara :

- a. Kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program
- b. Persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
- c. Kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana

Berdasarkan pendapat David C. Korten, salah satu tantangan penting yang dihadapkan pada pembangunan yang memihak rakyat ialah mengubah arah birokrasi pembangunan yang penting-penting sehingga menjadi organisasi yang menghargai dan memperkuat sifat manusiawi baik di kalangan birokrasi itu sendiri maupun di kalangan warga Negara yang hendak dilayani.

Menurut Gunawan (1999) indikator untuk mengukur pelaksanaan program adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Tahapan yang penting dan sering terlupakan efektifitasnya dalam konteks kebijakan publik Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Menurut Bajuri dan Teguh Yuwana (2002) evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, efektivitas dan efisiensi. Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah tercapai tujuannya.
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; serta
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Menurut Rossi dan Freeman (1982), kegiatan evaluasi pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai proses kebijakan publik yang menilai konseptualisasi dan perancangan implementasi, serta pelaksanaan program intervensi sosial.

Ahli lain Dye mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai studi tentang konsekuensi-konsekuensi kebijaksanaan umum atau merupakan penilaian secara menyeluruh efektivitas suatu program nasional dalam mencapai sasarannya atau penilaian efektivitas relatif dari dua atau lebih program yang mencerminkan tujuan bersama.

Bryant and White dalam Samodra (1994) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah mendekati tujuan. Sedangkan evaluasi menurut Oberlin Silalahi dibedakan menjadi dua, yaitu *evaluasi program*, bila yang dipertimbangkan adalah suatu evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh sistem, dan *evaluasi masalah atau prosedur* yaitu bila yang

dipertimbangkan hanya bagian dari sistem tersebut. Sementara itu Dye menambahkan evaluasi dampak kebijakan yang mencakup dampak pada situasi atau kelompok target, dampak pada situasi atau kelompok non-target, dampak pada waktu mendatang dan sekarang, serta biaya-biaya langsung dan tidak langsung. Hal-hal ini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Kasley dan Kumar (1987) dalam suatu evaluasi :

- a. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek?
- b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut?
- c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Menurut Donald F. Heider, penilaian evaluasi juga dapat diarahkan untuk berbagai macam tujuan, tidak hanya sebagai alat untuk memperbaiki program-program, kadang evaluasi dilakukan untuk mendukung suatu program yang sedang berjalan, dan terkadang untuk meneliti agar program tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan pengurangan aktivitasnya.

Kemudian Gray (1993) menambahkan bahwa evaluasi suatu proyek bertujuan untuk menghindari proyek yang justru merugikan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan datang, dengan dana yang telah tersedia, supaya dapat memberikan keuntungan. Maksud memberikan keuntungan adalah bisa meningkatkan tingkat konsumsi, menaikkan kesempatan kerja, perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan, serta struktur kelembagaan.

Menurut William Dunn (1999), evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya :

- a. Faktor nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan social kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terinsiprasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

- b. Interdependensi fakta-nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dan aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi.

- c. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

d. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya kesehatan), dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Karakteristik tersebut jika diterapkan pada evaluasi program pemberdayaan adalah :

- a. Evaluasi program ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat serta aparat pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah
- b. Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang mendukung keberhasilan program, yaitu sumber daya manusia, serta manajemen program yang baik
- c. Keberhasilan yang dapat dinikmati sekarang oleh target group maupun non target group merupakan hasil dari proses perencanaan dan implementasi yang baik, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor kebijakan di masa lalu
- d. Evaluasi merupakan tujuan sekaligus cara mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat

Di dalam mengevaluasi suatu program, seorang peneliti harus menentukan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa program itu berhasil atau tidak, mendekati tujuan atau tidak. Di dalam evaluasi kebijakan terdapat dua hal yang saling berhubungan erat, yaitu tujuan dan kriteria. Tujuan (*goals*) merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun angka-angka. Kriteria untuk memastikan bahwa tujuan yang diterapkan sebelumnya itu dapat tercapai secara memuaskan (Suharyanto, 1996).

Kriteria yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah efektifitas program dan efisiensi program. Efektifitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output/sumberdaya yang digunakan oleh program dan outputnya atau layanan apa yang diterima oleh target group (Henry, 1988). Sementara menurut Dunn (1999) kriteria evaluasi terdiri dari berbagai tipe yaitu sebagai berikut :

a. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari diadakannya tindakan

b. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien

c. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tindakan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan

d. Kesamaan

Erat hubungan dengan rasionalitas legal dan social yang menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya secara adil didistribusikan

e. Resiprosivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan preferensi. Kriteria ini penting, karena analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria di atas, masih dianggap gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

f. Ketepatan

g. Menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut

Kriteria yang dipilih karena dianggap penting untuk dijawab pada evaluasi program pemberdayaan masyarakat ini adalah : efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?, efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?, ketepatan, yaitu apakah hasil yang diinginkan benar-benar bernilai?, dan resiprosivitas, yaitu apakah hasil telah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?

Evaluasi terhadap kebijakan seringkali tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak seperti yang diharapkan, hal ini karena banyaknya kendala yang dihadapi. Menurut Islamy (1997), kendala penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material dan waktu, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. Kebanyakan program-program pembangunan terbengkelai karena kekurangan dana.
- b. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara yang akan mengurangi tercapainya dampak yang diharapkan.



- c. Problema-problema publik seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil factor-faktor tersebut.
- d. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi dampaknya.
- e. Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- f. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
- g. Banyak problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
- i. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Sementara itu Bryant and White (1987) merumuskan empat kendala dalam melakukan penelitian evaluasi :

- a. Evaluasi menjadi suatu ancaman karena mudah digunakan sebagai sarana mengkritik orang lain atau mengungguli kekuasaan lain.
- b. Kendala ekonomis, bahwa ekonomi yang baik itu mahal dari segi waktu dan uang, dan supaya tersedia banyak data tidak selalu sepadan dengan tingginya biaya tersebut.
- c. Kendala teknis dimana penanganan data sering menuntut adanya staf yang terlatih dan tersedianya kemampuan pengolahan data, termasuk waktu suatu fakta.
- d. Kendala politis, bahwa hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, tetapi juga secara politis memalukan jika diungkapkan. Seharusnya evaluasi dipandang sebagai bagian dari proyek, bukan mengidentifikasikan diri dengan kebijakan atau rancangan proyek tertentu, sehingga evaluasi menjadi bagian dari suatu proses belajar yang sedang berlangsung dan bukan sebagai suatu ancaman.

Keberhasilan program pemberdayaan di Kabupaten Bantul diperlukan :

- a. Adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat sebagai penerima program dan hasil-hasil dari pelaksanaan program
- b. Adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan organisasi dan pelaksana dalam mengelola organisasi
- c. Adanya kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana

Samodra Wibawa (1994, menganggap ada dua pendekatan mengenai keberhasilan implementasi atau evaluasi :

- a. Pendekatan kepatuhan, seorang analis akan beranggapan bahwa implementasi atau evaluasi kebijakan berhasil apabila pelaksanaannya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Pendekatan ini dengan mudah memperoleh kritikan, yaitu dalam perumusan atau penetapan agenda masalah, dalam pelaksanaan kebijakapun kekuatan-kekuatan non birokrasi sering mampu mempengaruhi apa yang akan dicapai. Secara intern, program sering tidak terdesain dengan baik, sehingga perilaku sempurna dari pelaksana program tidak akan berhasil menyelesaikan program.
- b. Pendekatan "What's happening" (apa yang terjadi). Pendekatan ini memotret pelaksanaan suatu kebijakan atau program dari segala hal, dengan asumsi bahwa implementasi atau evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh segala variable dan faktor. Yang akan dipakai dalam penelitian adalah pendekatan *What*

*happening* yang akan mengamati proses keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh dua variable yaitu peran administrator local dan pengawasan program. Pendekatan ini dipilih karena apa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan program jauh lebih penting daripada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan.

Adapun indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah :

- a. Peningkatan ekonomi
- b. Peningkatan produktivitas sumber daya atau menghilangkan kegagalan pasar
  - 1) Menyediakan barang-barang umum
  - 2) Menyediakan informasi atau menurunkan biaya informasi untuk golongan masyarakat miskin
  - 3) Menghilangkan atau meminimalisasi resiko
  - 4) Peningkatan pasar terbuka
- c. Distribusi keadilan
  - 1) Kecukupan
  - 2) Keadilan horizontal
  - 3) Keadilan vertikal
- d. Keterlibatan warga negara
  - 1) Tingkat kepuasan
  - 2) Hubungan timbal balik antara keterlibatan masyarakat dengan kebijakan public

Hal ini senada dengan pendapat Gunawan (1999), menurutnya indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok lain dalam masyarakat
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Jadi indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan adalah,

- a. Indikator peningkatan ekonomi, apakah program mampu mengatasi kemiskinan melalui akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dapat menggerakkan roda perekonomian.
- b. Indikator peningkatan produktivitas, apakah dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar dapat mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal,
- c. Distribusi keadilan, apakah semua lapisan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana umum dan
- d. Keterlibatan masyarakat dan aparatur pemerintah untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan menggunakan berbagai tolok ukur tersebut maka segenap upaya pembangunan dilakukan untuk mengurangi jumlah kemiskinan, dan di dalam dimensi kemiskinan mengharuskan setiap usaha pemberdayaan bagi rakyat miskin. Pemberdayaan

masyarakat hanya dapat diwujudkan dengan mengambil langkah strategis yang langsung memperluas akses masyarakat pada sumber daya yang ada dan menciptakan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, karena partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat berpengaruh.

## **2.8.2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program**

### **2.8.2.1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya dukungan dana dari Pemerintah
- b. Adanya dukungan manajemen umum, misalnya menyusun data, sistem evaluasi dan monitoring.
- c. Adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
- d. Adanya dukungan dari masyarakat
- e. Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan

### **2.8.2.2. Faktor Penghambat**

- a. Pemahaman Program masih kurang dikarenakan desa penerima dana adalah desa baru.
- b. Kurangnya Sumberdaya Manusia yang betul-betul mengetahui Program
- c. Waktu Pelaksanaan Program sangat singkat.
- d. Masih adanya dominasi Pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi dana pada desa penerima program.
- e. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kadang kurang sesuai dengan kondisi realitas di Desa Penerima Program
- f. Masih banyaknya penduduk miskin.
- g. Masih banyaknya desa tertinggal yang memerlukan sarana dan prasarana.
- h. Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan dalam pembangunan
- i. Masih kurangnya partisipasi masyarakat
- j. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan
- k. Masih banyaknya pengangguran dan setengah penganggur

## **2.8.3. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, serta

mempercepat pemulihan dampak krisis. Dampak Program pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator keberhasilan :

1. Indikator pencapaian tujuan

Terdukungnya usaha-usaha desentralisasi pemerintah, ditunjukkan dengan dilaksanakannya proses penentuan desa penerima dana pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Bantul dengan mengakomodir aspirasi masyarakat, eksekutif dan legislatif.

2. Indikator pencapaian maksud

Terdukungnya usaha desentralisasi Pemerintah

- a. Meningkatnya kapasitas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan prasarana umum, ditunjukkan dengan adanya pendekatan PPME pada penentuan lokasi desa penerima dana pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bantul
- b. Meningkatnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam hal pembangunan, ditunjukkan dengan adanya komunikasi dua arah antara Kabupaten, Kecamatan, desa dan masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bantul.

3. Indikator pencapaian hasil

Semakin berdayanya masyarakat desa dan kabupaten untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah

- a. Ikut sertanya masyarakat desa dalam pembangunan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi desa penerima dana pemberdayaan.
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, ditunjukkan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat dalam penentuan lokasi penerima dana pemberdayaan
- c. Meningkatnya kegiatan ekonomi dan pembangunan yang menggunakan prasarana jalan sebagai sarana transportasi
- d. Meningkatnya peranan Kabupaten Bantul sebagai wilayah lalu lintas antara yang menghubungkan wilayah-wilayah sekitar Bantul
- e. Berkurangnya masyarakat miskin di Kabupaten Bantul
- f. Meningkatnya ketrampilan masyarakat.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan konsep-konsep yang diuraikan di atas, dapat disusun kerangka pemikiran penelitian sebagai pedoman peneliti dalam memahami fenomena di

lapangan dan mengkaji masalah penelitian. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini, adalah sebagai berikut.

Program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, secara teoritis mengandung nilai dan prinsip pemberdayaan perempuan. Nilai dan prinsip tersebut, tidak hanya dinyatakan secara implisit, melainkan secara tegas dinyatakan dalam filosofi dan mekanisme kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan maupun nilai dari program tersebut, pada hakekatnya sangat ditentukan oleh banyak faktor. Namun demikian, faktor utama yang dianggap paling berpengaruh adalah partisipasi masyarakat (Conyers, 1991; Tjokrowinoto, 1987), di mana termasuk di dalamnya partisipasi kaum perempuan .

Dalam konteks penelitian ini, peningkatan partisipasi perempuan dilihat sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Melalui penelitian ini akan dikaji sejauh mana Program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh pemerintah, mampu meningkatkan kemampuan perempuan atau kualitas sumber daya perempuan dalam mengembangkan kemandiriannya (*self-reliance*).

Diskursus permasalahan pemberdayaan perempuan pada program pemberdayaan masyarakat menjadi menarik karena sifat program tersebut yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik serta penyertaan dana dalam negeri (APBN dan APBD) yang relatif besar. Kedua hal ini menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dibayangi dan dibatasi oleh keharusan untuk mencapai target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pembangunan fisik senantiasa dibayangi faktor cuaca, dalam arti pembangunan fisik akan lebih berhasil jika dilaksanakan sebelum datangnya musim penghujan; pembangunan yang didanai dengan dana APBN dan APBD senantiasa disertai keharusan untuk menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (SPJ) pada bulan tertentu dan tahun anggaran dimana program dilaksanakan. Kedua kondisi ini kontradiktif dengan upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan proses, ketimbang hasil secara formal administratif. Upaya pemberdayaan perempuan pada program tersebut juga akan menjadi sia-sia, manakala karena dibatasi oleh faktor cuaca dan permasalahan formal administratif kehadiran perempuan maupun partisipasinya dipaksakan oleh para pelaksana program.



### **BAB III**

## **MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Masalah :**

Masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah : Bagaimana gambaran partisipasi perempuan pada tiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul? Mengapa perempuan desa di Kabupaten Bantul bersedia terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul?

### **3.2. Tujuan Penelitian :**

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan partisipasi perempuan pada tiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul.
- b. Menjelaskan alasan-alasan perempuan di Kabupaten Bantul terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul.

### **3.3. Manfaat Penelitian :**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini, adalah :

1. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan input strategis dalam memikirkan dan merumuskan kebijakan serta isu-isu pembangunan pedesaan yang berperspektif gender.
2. Bagi kepentingan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian-penelitian tentang pemberdayaan perempuan dalam proses implementasi suatu kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan desa.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **4.1. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, termasuk penelitian kualitatif, diperlukan fokus penelitian yang menurut Strauss dan Corbin (1990) dan Moleong (1990) bertujuan:

- a. Fokus penelitian akan membatasi studi atau dengan kata lain, fokus akan membatasi bidang inkuiri.
- b. Penerapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan, seorang peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang mungkin menarik tetapi karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan acuan di dalam penentuan fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Secara umum, penelitian ini memfokuskan pada proses dan prospek pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Secara lebih terperinci, fokus penelitian tersebut meliputi :

- a. Partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul.
- b. Alasan yang mendasari para perempuan desa di Kabupaten Bantul terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul.

#### **4.2. Metode Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan dalam fokus di atas, penelitian ini memfokuskan pada proses dan prospek pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Agar dapat diperoleh gambaran yang mendalam dari peristiwa tersebut, maka digunakanlah pendekatan kualitatif, dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embadded case study* (Yin, 1987). Pemilihan bentuk studi kasus terpancang tersebut, dikarenakan penelitian ini sudah menentukan fokusnya sebagaimana diuraikan di atas.

#### **4.3. Penentuan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Alasan dipilihnya kabupaten tersebut, karena di Kabupaten Bantul program pemberdayaan sangat intens, selain itu saat ini Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang kepala daerah perempuan, sehingga diharapkan program pemberdayaan perempuan akan lebih dapat terlihat dalam eksistensinya.

#### **4.4. Sumber Informasi**

Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian yang hendak dikaji, sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan

Informan awal dipilih secara *purposive* atas dasar pada subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul, permasalahan maupun fokus penelitian. Informan selanjutnya, didasarkan atas *snow ball sampling*. Informan terakhir didasarkan pada tingkat kejenuhan dari informasi, yaitu sudah tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan oleh informan.



Berdasarkan teknik *purposive* yang dipilih, informan awal penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Bantul dalam hal ini diwakili oleh Bappeda, perangkat desa, anggota BPD dan LKMD, dan fasilitator desa.

- b. Tempat dan peristiwa, meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam, keadaan sosial budaya maupun perilaku dan kejadian yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.
- c. Dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian

#### 4.5. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 macam tehnik, yaitu :

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi yang benar.

- b. Observasi

Observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai *social setting* masyarakat Desa Watugajah. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang akan melengkapi deskripsi fokus kajian. Untuk itu, peneliti akan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

- c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, dan berbagai laporan mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bantul.

#### 4.6. Analisis Data

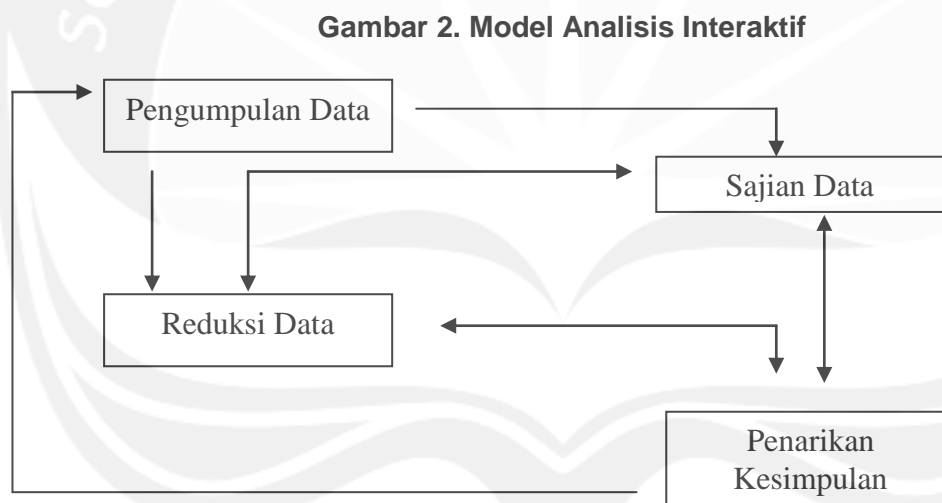
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan baik ketika di lapangan maupun setelah data dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah agar sistematis. Olahan dimulai dari menuliskan wawancara, hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) yang lebih dikenal dengan model analisis interaktif. Model analisis ini adalah melalui proses berikut: data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data, disajikan,

dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Dengan cara ini sasaran akhir analisis adalah untuk memperoleh sejumlah pemahaman terhadap makna.

Analisis data akan merupakan suatu uraian logis. Di samping data yang bersifat kualitatif yang berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap proses pemberdayaan perempuan pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, apabila memungkinkan juga digunakan data kuantitatif berupa angka-angka dan persentase hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hubungan penyilangan yang dapat memberikan penjelasan mengenai tema penelitian di lokasi penelitian.

Aktivitas ketiga komponen tersebut berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang benar. Apabila kesimpulan kurang memadai, maka diperlukan kegiatan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari data lagi di lapangan dan mencoba menginterpretasikannya dengan fokus yang lebih terarah. Dengan demikian aktivitas analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan proses siklus sampai penelitian selesai. Adapun proses sebagaimana diuraikan di atas, apabila digambarkan adalah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



**Sumber : Miles & Huberman (1984)**

#### **4.7. Keabsahan Data**

Menurut Lincoln dan Guba (1985), Nasution (1988), dan Moleong (1990) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu :

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Untuk memperoleh kriteria ini digunakan teknik atau cara perpanjangan waktu di lapangan, pengamatan secara tekun, melakukan triangulasi, dan membicarakannya dengan teman-teman sejawat yang mempunyai kepekaan intelektual terhadap tema penelitian yang tengah dilakukan.

b. Transferabilitas data

Yakni dengan menggunakan *sample purposive* secara terus menerus, melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi.

c. Dependabilitas data

Yakni melalui pemeriksaan data, baik mulai data lapangan -- reduksi data -- sampai pada interpretasi data.

d. Konfirmabilitas data

Dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis emik-etik, menekankan sekecil mungkin bias penelitian, memperhatikan etika penelitian, dan melakukan instropeksi atas hasil penelitian.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Deskripsi Daerah Penelitian

##### 5.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

###### 5.1.1.1. Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul berdasarkan sensus penduduk 2010 adalah sebanyak 910.572 jiwa. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 506,85 km<sup>2</sup> yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Secara lebih rinci mengenai jumlah desa, dukuh dan luas wilayah dapat dilihat dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1.**  
**Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul**

No.	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1	Srandakan	2	43	18.32	3.61
2	Sanden	4	62	23.16	4.57
3	Kretek	5	52	26.77	5.28
4	Pundong	3	49	23.68	4.67
5	Bambanglipuro	3	45	22.70	4.48
6	Pandak	4	49	24.30	4.79
7	Pajangan	3	55	33.25	6.56
8	Bantul	5	50	21.95	4.33
9	Jetis	4	64	24.47	4.83
10	Imogiri	8	72	54.49	10.75
11	Dlingo	6	58	55.87	11.02
12	Banguntapan	8	57	28.48	5.62
13	Pleret	5	47	22.97	4.53
14	Piyungan	3	60	32.54	6.42
15	Sewon	4	63	27.16	5.36
16	Kasihan	4	53	32.38	6.39
17	Sedayu	4	54	34.36	6.78
	Jumlah	75	933	506.85	100.00

**Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bantul, 2010**

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia

yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Dengan demikian wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami.

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Oya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*). Perbukitan di sisi barat dan timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam ( $>70\%$ ) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari.
- b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.
- c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi.
- d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Topografi Kabupaten Bantul datar hingga bergelombang, sebagian besar wilayahnya berada di atas tanah regosol, grumosol, dan litosol pada ketinggian 0-500 mdpal. Luas wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis menyebabkan masalah kemiskinan di Bantul menjadi spesifik. Sampai saat ini Bantul asih menghadapi masalah kemiskinan, antara lain yang ditandai oleh masih relative tingginya jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008 yang sebesar 73,38 (Bappeda Bantul, 2010).

Ketinggian tempat Kabupaten di Bantul dibagi menjadi empat kelas dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2.**  
**Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2008**

No	Kelas Ketinggian (dpl) m	Luas (ha)	(%)
1	0 – 7	3,228	6.37
2	7 – 25	8,948	17.65
3	25 – 100	27,709	54.67
4	100 - 500	10,800	21.31
5	> 500	-	-
Jumlah		50,685	100

**Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2008**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelas ketinggian tempat yang memiliki penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian Utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Bantul berkisar antara 1.063 mm dengan sembilan bulan basah dan tiga bulan kering. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24oC – 27oC. Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara (RPJMD Bantul 2011-2015).

Rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir yakni tahun 1999 sampai dengan 2008 di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa intensitas hujan mulai menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober, puncaknya terjadi pada bulan Desember-Januari, mulai menurun pada bulan Mei, dan sampai dengan bulan Agustus sering tidak terjadi hujan (lihat Tabel 5.3).

**Tabel 5.3.**  
**Intensitas Curah hujan tahun 1999 – 2008**

No	Bulan/Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Januari	1.689,00	1.185,00	1.803,00	976	1.028,00	1.209,00	5	-	1.221,50	7.799,20
2	Februari	1.213,00	1.524,00	623	1.047,00	1.734,00	953	7.709,00	-	4.767,80	4.387,10
3	Maret	1.194,00	812	1.440,00	144	15	1.397,00	5.838,00	-	4.307,00	4.206,50
4	April	1.038,00	791	522	146	0	0	3.825,00	-	3.680,50	1.962,50
5	Mei	136	389	163	10	121	586	1.548,00	-	938,2	243
6	Juni	12	178	160	0	77	36	1.166,00	-	1.147,90	53
7	Juli	35	0	171	0	0	101	776	-	39	-
8	Agustus	-	41	0	0	0	0	233	-	0	-
9	September	6	56	3	0	20	0	411	-	0	-
10	Oktober	430	631	483	40	189	61	2.942,00	-	533	1.955,60
11	November	764	2.782,00	1.359,00	736	1.485,00	586	9.339,00	236,5	2.454,75	4.465,80
12	Desember	1.263,00	749	508	580	2.312,00	2.394,00	9.239,00	3.995,00	7.799,20	3.316,00
	Jumlah	7.780,00	9.138,00	7.235,00	3.679,00	6.981,00	7.323,00	51.391,00	4.231,50	26.888,85	28.388,70
	Rerata tahunan	648,33	761,5	602,92	306,58	581,75	610,25	4282,58	352,63	2.240,74	2.365,73

Sumber: Dinas Sumberdaya Air Kabupaten Bantul tahun 1999-2008

#### **5.1.1.2. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul dapat diklasifikasikan menjadi kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, tanah tandus, dan lain-lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah yang berkurang seluas 186,0894 ha atau 0,367% dari total luas lahan. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan.

Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Perubahan penggunaan lahan selama tahun 2005- 2009 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010, rencana penggunaan lahan dikelompokkan menjadi tiga, terdiri dari:

##### **1) Kawasan Lindung Kabupaten**

Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan kawasan rawan bencana.

##### **2) Kawasan Budidaya Kabupaten**

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan ini meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat dan perkebunan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

##### **3) Kawasan Strategis Kabupaten**

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan ini meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Bantul Kota Mandiri (BKM), pantai Selatan (yang meliputi pengembangan pesisir dan



pengelolaan hasil laut pantai Depok, Samas, Kuwaru, dan Pandansimo), Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu, kawasan industri Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, dan gumuk pasir Parangtritis.



**Tabel 5.4.**  
**Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Penggunaan Lahan	Tahun, Proporsi, dan Luas Penggunaan (ha)										Perubahan 2005 - 2009
		2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	
1	Perkampungan	3,635.2419	7.17	3,686.4516	7.27	3,724.3291	7.35	3,770.1308	7.44	3,810.7277	7.52	175.4858
2	Sawah	16,232.3092	32.03	16,168.3662	31.90	16,130.4887	31.82	16,085.6390	31.74	16,046.2198	31.66	-186.0894
3	Tegal	6,638.8969	13.10	6,638.8969	13.10	6,638.8969	13.10	6,637.9449	13.10	6,637.3855	13.10	-1.5114
4	Kebun Campur	16,604.5000	32.76	16,603.0770	32.76	16,603.0770	32.76	16,603.0770	32.76	16,602.4557	32.76	-2.0443
5	Hutan	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	0.0000
6	Tanah Tandus	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	0.0000
7	Lain-lain	5,616.0520	11.08	5,630.2083	11.11	5,630.2083	11.11	5,630.2083	11.11	5,630.2113	11.11	14.1593
	<b>JUMLAH</b>	<b>50,685.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,685.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,685.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,685.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,685.0000</b>	<b>100.00</b>	<b>0.0000</b>

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, tahun 2010

## 5.2. Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul

### 5.2.1. Perekonomian Daerah

#### 5.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun (2005-2009) pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Bantul memiliki kinerja yang cukup baik, bahkan saat gempa terjadi tahun 2006 (lihat Tabel 5). Berdasarkan harga berlaku tampak pertumbuhan ekonomi yang dicapai fluktuatif dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, yakni cenderung meningkat. Pada tahun 2009, dengan angka pertumbuhan harga berlaku yang lebih rendah dibandingkan tahun 2008 (9,84% dibanding 15,73%) menghasilkan angka pertumbuhan harga konstan yang relatif tetap (4,47% dibanding 4,90%). Artinya pertumbuhan yang dicapai tahun 2009 betul-betul disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa bukan oleh kenaikan harga semata. Hal yang sama tidak hanya terjadi pada tahun 2009 tetapi juga pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka pertumbuhan harga berlaku dan harga konstan.

**Tabel 5.5.**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009**

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	4.903.668	15,69	3.234.172	4,99
2006	5.722.466	16,69	3.299.646	2,02
2007	6.409.648	12,00	3.448.949	4,52
2008	7.417.980	15,73	3.618.060	4,90
2009	8.147.860	9,84	3.779.948	4,47
Rata-rata		13,99	Rata-rata	4,18

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

**Tabel 5.6.**  
**Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan Tahun 2000	
		Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2005	5,628,617	13.20	3,712,307	2.74
2	2006	6,472,748	15.00	3,732,268	0.54
3	2007	7,145,697	10.40	3,845,008	3.02
4	2008	8,153,311	14.10	3,976,712	3.43
5	2009	8.831.737	8,32	4.097.212	3,03
Rata-rata			10,54	Rata-rata	1,946

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

PDRB Kabupaten Bantul ditopang oleh sembilan sektor dimana sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi tertuju pada sektor pertanian, perdagangan dan industri. Sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan peran yang relatif stabil (tahun 2007 menurun akibat gempa). Sektor industri dan jasa yang berbasis di permukiman mengalami penurunan dari tahun 2005-2007 digantikan oleh peran sektor bangunan. Keadaan ini terkait oleh pemulihan pasca gempa yang menyebabkan peningkatan peran sektor bangunan. Namun pada tahun 2009 sektor bangunan yang mengalami kontraksi negatif juga mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi sebagai akibat program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pemulihan perumahan dan pemukiman serta pemulihan prasarana publik akibat gempa pada tahun 2006 telah selesai. Kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 5.7.**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

Sektor	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	24,48	24,69	24,31	24,33	24,32
Pertambangan & penggalian	1,01	1,03	1,02	0,99	0,95
Industri pengolahan	19,93	17,22	16,88	16,48	16,16
Listrik, gas & air bersih	0,9	0,82	0,85	0,88	0,91
Bangunan	8,54	11,57	11,99	12,08	11,49
Perdagangan, hotel & restoran	18,95	18,92	19,12	19,41	19,76
Pengangkutan & komunikasi	6,88	6,65	6,81	6,88	7,09
Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	6,34	5,68	5,87	5,88	6,11
Jasa-jasa	12,98	13,23	13,14	13,07	13,21
PDRB	100	100	100	100	100

**Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2005-2009 berfluktuatif. Pada tahun 2007 turun menjadi 2,02 persen akibat adanya gempa bumi. Namun seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian maka laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mulai tahun 2005 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 8. Sektor pertanian masih merupakan komponen terpenting penyusun PDRB sampai dengan tahun 2009 meskipun laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2009 (4,46 persen) mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2008 (4,96 persen).

Perlambatan laju pertumbuhan sektor pertanian ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sub sektor kehutanan, dimana produksi tanaman kehutanan berkurang karena faktor permintaan berkurang setelah program rekonstruksi gempa selesai pada tahun 2008. Laju sektor pertambangan juga mengalami kontraksi negatif yaitu sebesar -0,13 persen dibanding pertumbuhan pada tahun 2008 yang mampu tumbuh sebesar 2,30 persen. Faktor yang menyebabkan adalah akibat berkurangnya permintaan barang khususnya gol C yang pada tahun 2007,2008 banyak digali untuk keperluan rekonstruksi, sedangkan tahun 2009 program rekonstruksi gempa telah selesai. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan karena produksi di sektor industri khususnya industri kerajinan dan tekstil sudah mulai bangkit. Laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2009 mencapai 7,78 persen lebih cepat dibanding pada tahun 2008 yang mencapai 5,95 persen.

Percepatan sektor ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi dengan maraknya penggunaan *handphone*, layanan internet yang merambah sampai ke pelosok desa di Kabupaten Bantul. Pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2009 sebesar 8,40 persen lebih cepat. Hal ini dibanding pertumbuhannya pada tahun 2008 yang hanya sebesar 5,12 persen didukung oleh meningkatnya jumlah penabung, jumlah peminjam dan meningkatnya jasa penyewa reklame. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai dan kenaikan jasa pelayanan pemerintah dalam mendukung percepatan kenaikan sub sektor pemerintahan umum.

**Tabel 5.8.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009 (Persen)**

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	3,63	2,92	2,92	4,96	4,46
2. Pertambangan dan Penggalan	0,81	3,71	3,01	2,30	-0,13
3. Industri Pengolahan	3,15	11,87	2,51	2,38	2,45
4. Listrik, gas, dan air bersih	9,21	-6,46	7,99	8,13	8,75
5. Bangunan	7,79	38,34	8,32	5,67	-0.08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,79	1,84	5,64	6,51	6,33
7. Pengangkutan dan komunikasi	8,67	-1,3	6,96	5,95	7,78
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9,86	-5,74	4,71	5,12	8,40
9. Jasa-jasa	3,46	4,56	3,82	4,35	5,56
<b>PDRB</b>	<b>4.99</b>	<b>2.02</b>	<b>4.52</b>	<b>4.90</b>	<b>4.47</b>

Sumber : BPS Kab.Bantul 2010

Tingkat inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi(naik turun).Pada tahun 2008 inflasi di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 7,1 pada tahun 2007 menjadi 10,26 pada tahun 2008.Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM. Pada tahun 2009 inflasi di Kabupaten Bantul kembali menurun menjadi 2,99 karena harga kebutuhan kembali normal. Perkembanganinflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.9.**  
**Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Tahun	Inflasi Kab. Bantul	Inflasi Kota Yogya	Inflasi Nasional
1	2005	12.3	14.98	17.11
2	2006	7.61	10.4	6.6
3	2007	7.1	7.99	6.59
4	2008	10.26	9.88	11.06
5	2009	2.99	2.93	2.78

**Sumber: BPS, 2010**

Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang terdistribusi juga secara baik. Secara rinci capaian Indeks Gini Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 5.10. Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indeks Gini Kabupaten Bantul terlihat fluktuatif. Indeks Gini tahun 2006 lebih rendah dari tahun 2005, gempa yang meluluhlantakkan sebagian KabupatenBantul menyebabkan distribusi pendapatan menjadi terganggu. Wilayah yang sangat rusak karena gempa terhambat pengembangan ekonominya, sementara wilayah lain yang relatif aman dari gempa kinerja perekonomiannya tidak berubah. Hal ini jelas terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri. Lokasi sektor industri yang rusak akibat gempa menurunkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah, sementara sektor pertanian relatif sedikit mengalami gangguan akibat gempa. Hal ini tampak dari pangsa sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto tahun 2007 yang hanya turun sedikit dari 24,69% menjadi 24,31%. Sementara sektor industri masih harus memulai dari awal lagi.

Dampak dari semua ini adalah timpangnya distribusi pendapatan regional yang diperoleh oleh masing-masing sektor. Dalam masa pemulihan, berbagai sektor ekonomi mulai dibenahi kembali. Walaupun capaian Indeks Gini tahun 2009 belum sebaik tahun 2005 tetapi dari data terlihat kecenderungan yang semakin membaik.



**Tabel 5.10.**  
**Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Gini</b>
2005	0,2261
2006	0,2569
2007	0,2474
2008	0,2536
2009	0,2473

**Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2010**

#### **5.2.1.2. Investasi**

Pertumbuhan ekonomi makro bisa bersumber dari pengeluaran masyarakat untuk konsumsi, pengeluaran pengusaha untuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan transaksi perdagangan dengan daerah atau negara lain. Diantara berbagai sumber pertumbuhan itu, investasi adalah sumber pertumbuhan yang terbaik, melalui investasi pertumbuhan berkelanjutan. Investasi di satu sisi menciptakan nilai tambah (barang dan jasa), pada sisi yang lain menciptakan kesempatan kerja.

Jumlah investasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2009 mencapai Rp1.798.486,886 milyar. Peran investasi yang cukup besar itu sampai saat ini masih didominasi oleh investasi sektor pemerintah (50,25%), diikuti sektor swasta dalam negeri (30,23%), sektor swasta asing (15,12%), dan investasi masyarakat (4,40%). Pertumbuhan investasi domestik di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 – 2009 menunjukkan peningkatan. Investasi domestik pada umumnya dilakukan lebih padat tenaga kerja. Inilah salah satu kelebihan investasi domestik. Disamping itu investasi domestik lebih bertahan terhadap gejolak yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan investasi asing.

Artinya ketika ada goncangan dalam masyarakat yang menyebabkan resiko investasi bertambah tinggi tidak serta merta membuat investasi domestik berpindah ke wilayah lain. Berbeda dengan investasi asing yang rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Investasi masyarakat sebesar 4,40 % menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam proses pembangunan. Ini adalah sebuah modal yang sangat baik bagi investasi.

Pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong terhadap berkembangnya investasi masyarakat dan swasta. Kabupaten Bantul memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Dengan kemudahan melalui pembentukan Dinas Perijinan dengan penyederhanaan prosedur dan pelayanan satu pintu diharapkan akan mempermudah investor dalam menanamkan modalnya. Perkembangan investasi tahun 2005 – 2009 dan peran investasi tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.11 dan 5.12.

**Tabel 5.11.**  
**Perkembangan Investasi Tahun 2005-2009**

No.	Tahun	Investasi Swasta		Investasi Masyarakat	Investasi Pemerintah
		PMA	PMDN		
1	2005	201,682,621,200	511.740.865,000	44,655,700,000.00	417,798,070,033.78
2	2006	205,442,621,200	514.715.865,000	40,754,500,000.00	545,132,135,933.38
3	2007	240,504,621,200	528.404,865,000	63,062,300,000.00	676,835,481,623.06
4	2008	259,774,621,200	537.102.135,000	76,635,400,000.00	1,045,423,303,527.78
5	2009	271,994,621,200	543.679.565,000	79,045,700,000.00	903,767,000,429.01

Sumber: Bappeda,DPKAD,Disperindakop,Bag.AP Kab. Bantul Tahun 2010 (data diolah)  
Asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.400,-

**Tabel 5.12.**  
**Peran Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2009**

Investor	Investasi tahun 2009	
	Nilai (Rp juta)	Peran (%)
PMA	271.994.621.200	15,12
PMDN	543.679.565.000	30,23
Pemerintah	903.767.000.000	50,25
Masyarakat	79.045.700.000	4,40
	1.798.486.886.629	100

Sumber: Bappeda Kab. Bantul tahun 2010 (data diolah)

#### 5.2.1.3. Keuangan Daerah

Profil keuangan daerah seperti tertuang dalam penyusunan RPJMD (RPJMD Bantul 2011-2015) bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan daerah beserta komponennya. Gambaran umum kondisi keuangan daerah dipergunakan untuk mengetahui berbagai faktor penting yang menentukan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencakup: (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) Struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah atasnya. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan daerah, diperlukan data-data dalam rentang waktu tertentu sehingga didapatkan informasi yang lengkap.



**Tabel 5.13.**  
**Realisasi APBD Tahun 2006-2009 dan Target APBD Tahun 2010 (Rupiah)**

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
<b>PENDAPATAN</b>	599,619,650,884.62	727,836,911,979.62	1,023,590,207,758.85	882.149.788.429,75	876.204.469.555,28
Pendapatan Asli Daerah	44,005,310,869.67	57,229,726,493.62	69,800,761,508.85	88.691.362.690,38	90.238.879.583,48
• Pajak Daerah	9,836,299,528.00	10,191,535,467.00	12,070,898,846.00	14,108,451,478.99	16,489,578,000.00
• Retribusi Daerah	22,412,839,917.00	30,808,408,803.00	37,171,638,611.00	58,205,951,445.00	56,377,938,662.00
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	100,000,000.00	181,478,076.87	26,623,886.66	1,126,585,441.99	1,573,000,000.00
• Laba penyertaan modal	2,479,134,676.79	2,833,168,049.11	3,423,291,081.92	6,386,252,752.83	7,000,000,000.00
• Lain2 PAD yg sah	9,177,036,747.88	13,215,136,097.64	17,108,309,083.27	8,864,121,571.57	8,798,362,921.48
Dana Perimbangan	526,753,134,017.00	602,943,019,186.00	679,250,090,167.00	668.488.989.539,37	683.081.409.250,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28,861,205,997.95	67,664,166,300.00	274,539,356,083.00	124.969.436.200,00	102.884.180.721,80
<b>BELANJA</b>	545.132.135.933,38	676.835.481.523,06	1.045.423.303.527,78	931.789.051.390,08	915.091.017.832,34
Belanja Tidak Langsung		451,495,661,530.06	598,167,227,346.78	634.893.132.281,01	685.712.895.007,34
Belanja Langsung		225,339,820,093.00	447,256,076,181.00	268.873.868.148,00	229.378.122.825,00
<b>Surplus (Defisit) (A-B)</b>	54.487.514.900,00	51.001.430.456,56	-21.833.096.231,07	-82.661.134.608,83	-38.886.548.277,06
<b>PEMBIAYAAN</b>					
Penerimaan Daerah	66.106.003.300,00	88.468.641.260,85	119.713.769.894,59	84.776.365.285,09	39.282.779.277,06
Pengeluaran Daerah	32.126.033.144,26	19.756.301.722,82	13.104.308.840,57	2.115.231.676,26	396.231.000,00

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010

Informasi tentang kondisi keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Tata kelola keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Tabel 5.13 menunjukkan Realisasi APBD Tahun 2006 – 2009 dan Target APBD Tahun 2010.

#### **5.2.1.4. Pendapatan Daerah**

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan semakin bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah tersebut dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang dimaksud kemampuan daerah adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah.

**Tabel 5.14.****Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010**

No.	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan	PAD/ Pendapatan (%)	Jumlah Belanja	PAD/ Belanja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2006	44,005,310,869.67	599,619,650,884.62	7.34	545,132,135,933.38	8.07
2	2007	57,229,726,493.62	727,836,911,979.62	7.86	763,254,947,189.55	7.50
3	2008	69,800,761,508.85	1,023,590,207,758.85	6.82	1,045,423,303,527.78	6.68
4	2009	88,691,362,690.38	882,149,788,429.75	10.05	931,789,051,390.08	9.52
5	2010	90,238,879,583.48	876,204,469,555.28	10.30	915,091,017,832.34	9.86

**Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul terhadap total Pendapatan Daerah selama lima tahun (2006-2010) sekitar 6,80% - 10,30%. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bantul rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 8,47%, Tingkat Kemandirian Daerah sebesar 9,21% dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 91,53%. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Bantul masih banyak bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Umum. Oleh sebab itu maka dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja Daerah rata-rata selama lima tahun (2006-2010) adalah sebesar 8,33%., Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah rata-rata selama lima tahun hanya mampu menyumbang untuk membiayai kegiatan pembangunannya sebesar 8,33%.

#### **5.2.1.5. Belanja Daerah**

Tata kelola belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

**Tabel 5.15.**  
**Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006 (Rupiah)**

No	Tahun	Kebutuhan Fiskal		
		Belanja Aparatur	Belanja Publik	Total
1.	2006	118.338.774.610,59	426.793.361.322,79	545.132.135.933,38

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010, (berdasarkan Kepmendagri 29/ 2003)

**Tabel 5.16.**  
**Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2007-2010 (Rupiah)**

No	Tahun	Kebutuhan Fiskal		
		Belanja tdklangsung	Belanja Langsung	Total
1.	2007	451.495.661.530,06	225.339.820.093,00	676.835.481.62,06
2.	2008	598.167.227.346,78	447.256.076.171,00	1.045.423.303.527,78
3.	2009	634.893.132.281,01	268.873.868.148,00	903.767.000.429,01
4.	2010*	685.712.895.007,34	229.378.122.825,00	915.091.017.832,34

Sumber : DPKAD Kabupaten Bantul 2010 (Permendagri 13 / 2006)

Ket : Tahun 2009 data setelah perubahan ;

\* =Target APBD

Tabel di atas menunjukkan bahwa, belanja pembangunan daerah atau belanja langsung mengalami penurunan, sedangkan belanja administrasi umum atau belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat langsung belanja daerah kepada masyarakat mengalami penurunan. Dalam kondisi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat, maka kondisi ini mencerminkan adanya masalah yang serius dalam tata kelola pembangunan dan keuangan daerah. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

Dari tabel diatas didapatkan hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja selama empat tahun terakhir rata-rata sebesar 66,50% sedangkan Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja rata-rata sebesar 32,50%.Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung masih mendominasi dari keseluruhan/total Belanja Daerah dibandingkan Belanja Langsung.

#### **5.2.1.6. Pembiayaan Defisit/Surplus**

Pembiayaan defisit anggaran bisa bersumber dari pinjaman daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai dasar/pedoman bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Namun demikian, untuk merealisasikan pinjaman ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada *debt service coverage ratio* (DSCR) saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek prediksi kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Tabel 5.17 di bawah ini menunjukkan Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010.

**Tabel 5.17.**  
**Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>
2006	66.106.003.300,00	32.126.033.144,26
2007	88.468.641.260,85	19.756.301.722,82
2008	119.713.769.894,59	13.104.308.840,57
2009	84.776.365.285,09	2.115.230.676,26
2010*	39.282.779.277,06	396.231.000,00

Sumber : DPKAD Kabupaten Bantul 2010

Ket : Tahun 2009 data setelah perubahan; \*=Target APBD

## **5.2.2. Industri, Perdagangan dan UKM**

### **5.2.2.1. Perkembangan Industri**

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Bantul yang sudah teruji ketangguhannya. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi dan gempa bumi di Kabupaten Bantul sektor industri masih mampu bertahan. Sektor industri di Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kecil dan menengah. Jumlah industri kecil yang demikian banyak dengan penggunaan teknologi sederhana mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat tinggi.

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk selalu mengembangkan industri kecil dan menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan izin usaha dan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM), penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang IKM, pelatihan dan bantuan permodalan, serta pengembangan sentra-sentra industri potensial. Tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan unit usaha IKM, tenaga kerja yang diserap, nilai produksi, nilai tambah, dan nilai investasi usaha IKM tahun 2005-2009.



**Tabel 5.18.**  
**Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

URAIAN	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Unit Usaha	17.801	17.865	17.911	17.937	18.014
Tenaga Kerja	77.600	78.783	79.904	80.468	80.968
Nilai Produksi (Rp Juta)	582.031	590.224	643.627	721.321,4	783.503.680
Nilai Tambah (RpJuta)	359.616	365.030	388.845	450.130,73	494.735.020
Nilai Investasi (Rp Juta)	337.149	340.124	349.813	358.501,27	365.087.700

**Sumber: Disperindagkop, 2010**

Ragam industri di Kabupaten Bantul cukup banyak mulai dari industri kerajinan berbasis kayu, kertas, logam, tanah, limbah, kulit sampai garmen. Industri yang beragam itu pada umumnya terkumpul dalam sentra-sentra industri. Tahun 2009 tercatat 73 sentra industri yang terbentuk. Diantara industri yang beraneka ragam itu, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan beberapa macam industri sebagai komoditas terpilih yang diklasifikasikan dalam komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) **Komoditas unggulan:** pemakaian bahan baku lokal > 70%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor > US\$ 1 juta, tujuan ekspor > 3 negara, pertumbuhan ekspor > 10% selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok industri unggulan antara lain industri mebel kayu, keramik, dan tatah sungging;
- 2) **Komoditas andalan:** pemakaian bahan baku lokal 60-69%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor > US\$0.5-1 juta, tujuan ekspor = dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok industri andalan adalah kerajinan kayu.
- 3) **Komoditas yang diunggulkan:** pemakaian bahan baku lokal 50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor < US\$0.5 juta, tujuan ekspor < 1 negara, pertumbuhan ekspor < 5 selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah industri bambu dan emping mlinjo.

Diantara berbagai ragam industri yang ada, mebel kayu merupakan industri yang menunjukkan kinerja paling stabil dibandingkan dengan industri lainnya. Dari tahun 2005-2009 terus-menerus ada ekspor walaupun mengalami penurunan *share*. Namun demikian pangsa mebel kayu dalam pembentukan devisa semakin tahun semakin menurun digantikan oleh kerajinan dari kertas dan kerajinan kayu lain, seperti batik kayu atau patung kayu. Pergeseran ini erat berhubungan dengan permintaan konsumen yang selain mulai mempertimbangkan aspek lingkungan juga pertimbangan mode dan desain yang kurang

dapat diikuti oleh pengrajin mebel. Permasalahan desain, inovasi produk, dan teknologi *packaging* memang menjadi kendala yang dihadapi pengrajin untuk dapat bersaing di pasar global.

#### 5.2.2.2. Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun (pameran Furnicraft, Inacraft, Texcraft, Pekan Raya Jakarta, Jogja Ekspo Sekaten, Bantul Ekspo, dan Jogja Ekspor Ekspo) sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Sektor perdagangan Kabupaten Bantul, sebagaimana dapat dilihat dari kemampuan industri kerajinan untuk terus merambah pasar ekspor, terbagi dalam perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perdagangan luar negeri tercermin dari kemampuan Kabupaten Bantul untuk melakukan ekspor. Dari segi volume, kemampuan untuk mengespor selama lima tahun terakhir tampak menurun, tetapi jika dilihat dari nilainya justru cenderung meningkat (lihat Tabel 19). Ini berarti harga produk yang diespor mengalami kenaikan.

Jika dilihat dari jumlah negara tujuan maka tampak bahwa jumlah negara tujuan dan macam komoditas yang dijual semakin kecil. Di satu sisi ini dapat bermakna positif, artinya kemampuan ekspor ke masing-masing negara menjadi lebih tinggi dan komoditas yang dijual semakin terspesialisasi. Namun aspek negatifnya adalah konsentrasi pada makin sedikit negara dan makin sedikit komoditas seperti meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang, jika ada kegoncangan dari negara tujuan atau komoditas terpilih, maka sulit untuk melakukan pemulihan.

**Tabel 5.19.**  
**Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

Tahun	Volume (ton)	Nilai (US\$ 000)	Jumlah negara tujuan	Macam Komoditas
2005	8.854,36	21.138,27	69	51
2006	8.555,18	23.633,29	60	48
2007	8.020,40	20.152,74	57	56
2008	7.027,12	20.548,23	48	29
2009	6.295,71	24.041,48	52	32

**Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, 2010**

Perekonomian di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih didominasi kegiatan perdagangan skala kecil dan ekonomi lokal. Masih suburnya keberadaan pasar tradisional,

yang memang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Bantul selama ini dapat menjadi indikasi kuatnya peran ekonomi lokal dalam perekonomian Bantul. Tahun 2009, sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 29 unit pasar kabupaten, 1 unit pasar seni, 27 unit pasar desa, 6 unit pasar hewan, 367 unit toko dan 370 unit kios.

Pasar yang ada tersebar di seluruh wilayah, setiap kecamatan rata-rata memiliki dua buah pasar (lihat Tabel 5.20). Dari sejumlah pasar tradisional itu telah dilakukan renovasi besar terhadap enam pasar yakni pasar Imogiri, Pijenan, Niten, Piyungan, Jejeran, dan Bantul dan satu unit gudang dengan pola Sistem Resi Gudang (SRG) Niten. Berkembangnya pasar tradisional dan pembatasan toko modern dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul diharapkan dapat menekan perkembangan toko modern. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengizinkan hypermarket dan supermarket beroperasi di wilayah Bantul. Minimarket dengan batasan yang sangat ketat ada ijin untuk pendiriannya. Diantara syarat yang ketat itu adalah bahwa minimarket itu adalah milik pengusaha lokal, dan jika minimarket itu sebuah waralaba, induknya haruslah pengusaha lokal.

**Tabel 5.20.**  
**Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Lokasi Pasar
1	Srandakan	- Mangiran
		- Jragan
		- Koripan
2	Sanden	- Sorobayan
		- Celep
3	Kretek	- Sangkeh
		- Angkruksari
4	Pundong	- Pundong
5	Bambanglipuro	- Turi
		- Gatak
		- Grogol
6	Pandak	- Pijenan
		- Pandak
		- Jodog
		- Gumulan
7	Bantul	- Bantul
8	Jetis	- Barongan
		- Bendosari
9	Imogiri	- Imogiri
		- Pasar hewan
10	Dlingo	- Dlingo
11	Banguntapan	- Ngipik
12	Pleret	- Jejeran
		- Pleret
13	Piyungan	- Piyungan
		- Panasan
14	Kasihan	- Niten
15	Sedayu	- Semampir
		- Sungapan

**Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul, tahun 2010**



Persoalan permodalan di sektor pertanian juga mendapatkan perhatian pemerintah dengan dibangunnya gudang dengan sistem resi gudang (SRG). SRG bertujuan untuk menyimpan sementara produk pertanian (gabah dan beras). Produk yang disimpan diberikan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank yang telah ditunjuk. Pasar dan kegiatan ekonomi lokal yang dilestarikan di Kabupaten Bantul masih berhadapan dengan masalah klasik pedagang yakni permodalan. Untuk mengatasi masalah modal pedagang mencari pinjaman. Sementara koperasi masih memiliki peran yang rendah dalam penyediaan modal bagi pedagang.

Peran rentenir yang besar menjadi indikasi kurang kuatnya upaya sektor perbankan dan koperasi dalam mengatasi persoalan permodalan pedagang. Pemahaman atas perilaku pedagang dan aturan di sektor perbankan yang rigid menjadi penyebab masih kuatnya peran rentenir dalam penyediaan modal. Pemberian dana bergulir bagi pedagang kecil di pasar Bantul, Piyungan, Imogiri, dan Niten pada tahun 2008 merupakan solusi untuk mengantisipasi merebaknya rentenir di pasar-pasar.

### 5.2.2.3. Perkembangan Koperasi dan UKM

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang ideal juga berkembang di Kabupaten Bantul. Tahun 2009 di Bantul terdapat 407 unit koperasi dengan 180.814 anggota. Dari jumlah tersebut KUD adalah jenis koperasi yang memiliki anggota paling banyak (60,06%) tetapi jumlah unit koperasinya cukup kecil yakni 4,17%. Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. Koperasi yang telah berkembang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: induk koperasi, koperasi primer, dan koperasi unit desa (KUD). Jumlah induk koperasi sejak tahun 2005 sampai 2009 tidak mengalami perubahan, demikian juga dengan koperasi unit desa. Sejak tahun 2007 jumlah koperasi primer mengalami peningkatan.

**Tabel 5.21.**  
**Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pusat Koperasi	3	3	3	3	3
2	Koperasi Primer	348	300	346	375	404
3	KUD	17	17	17	17	17

**Sumber: Dinas Perindagkop, 2010**

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

**Tabel 5.22.**  
**Jumlah dan Anggota Koperasi di Bantul Tahun 2005-2009**

Tahun	Jumlah Koperasi		Jumlah anggota
	Aktif	Pasif	
2005	274 (78,06)	77(21,93)	163.567
2006	242 (80,13)	60 (19,87)	165.203
2007	246 (70,48)	103 (29,62)	164.267
2008	278(73,54)	100(26,45)	180.575
2009	322(79,11)	85(20,88)	180.814

**Sumber:** Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul  
**Keterangan:** angka dalam kurung adalah angka proporsi

### 5.2.3. Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Bantul merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Kondisi ini tercermin dalam distribusi PDRB per lapangan usaha yang menunjukkan kontribusi sektor ini merupakan komponen tertinggi dalam perekonomian daerah (PDRB). Ditinjau dari ketersediaan lahan untuk usaha tani, sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul seluas 30.234 ha (59,65%) masih merupakan lahan pertanian, terdiri dari lahan sawah seluas 15.569 ha dan lahan bukan sawah seluas 14.665 ha (data tahun 2009). Penggunaan lahan di sektor pertanian meliputi usaha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Ketersediaan air untuk lahan pertanian dilakukan melalui irigasi teknis yang mencakup areal seluas 2.390 ha (7,9%), irigasi setengah teknis seluas 10.563 ha (34,94%), selebihnya irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, dan lahan kering. Upaya untuk mencukupi air irigasi untuk usaha pertanian dilakukan dengan membantu merehabilitasi jaringan irigasi, membangun dam dan parit, membangun embung, membangun sumur pantek, dan pembinaan terhadap P3A.

Untuk menjamin ketersediaan lahan sawah, Kabupaten Bantul telah melakukan upaya dengan pemberian insentif berupa sertifikasi lahan, bantuan pupuk, pengembangan/optimalisasi lahan pantai yang memiliki potensi 600 ha, dan optimalisasi

lahan pantai. Upaya optimalisasi lahan pantai dilaksanakan dengan cara reklamasi lahan untuk memulihkan kesuburan tanah dengan pemberian pupuk organik didukung dengan pengembangan sumur renteng.

Padi sawah menunjukkan bahwa terjadi penurunan produktivitas padi dari 6,7 ton GKG/ha pada tahun 2008 menjadi 6,5 ton GKG/ha pada tahun 2009. Meskipun ada penurunan produktivitas, namun produksi padi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan luas panen padi dari 25.089 ha pada tahun 2008 menjadi 28.258 ha pada tahun 2009.

Adanya peningkatan luas areal tanam padi menyebabkan kebutuhan benih padi meningkat. Sehingga dilakukan inovasi perbenihan melalui pengembangan *Bantul Seed Center*, yang diprioritaskan memproduksi benih padi sebanyak 500 ton per tahun dengan harga lebih rendah dari benih di pasar umum, namun tetap memiliki kualitas baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama 16 kelompok petani penangkar benih dengan Balai Benih Pertanian milik dinas.

Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui penyediaan benih bermutu maupun peningkatan intensifikasi dengan penerapan teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Upaya pengamanan produksi dilakukan melalui penyediaan sarana pengendali OPT dan lumbung pangan untuk menyimpan bahan pangan saat produksi melimpah. Adapun perkembangan pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian unggulan dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.23.**  
**Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas**  
**Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009**

NO	Komoditi	2005	2006	Tahun 2007	2008	2009	ket
<b>Padi Sawah</b>							
1	Luas Panen	25.081	24.655	25.681	25.089	28.258	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	58.67	59.08	62.22	66.46	65.27	kw/ha
3	Produksi (GKG)	147.139	145.654	159.787.2	166.737	184.439.97	ton
4	Produksi beras	92.911,85	92.053,33	100.687,28	105.377,78	116.566,06	ton
<b>Padi Ladang</b>							
1	Luas Panen	211	189	201	164	424	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	30.28	28.84	28.51	27.62	28.44	kw/ha
3	Produksi (GKG)	639	545	573	453	1206	ton
4	Produksi beras	402.57	434.35	360.99	285.39	759	ton/ha
<b>Jagung</b>							
1	Luas Panen	5155	4976	5526	5739	6290	ha
2	Produksi (pipilan kering)	23057	17867	26865	30117	37620.49	ton
3	Produktivitas	4.47	3.59	4.86	5.25	5.981	ton/ha
<b>Kacang tanah</b>							
1	Luas Panen	5709	5194	4680	3701	3677	ha
2	Produksi (wose kering)	5605	4903	4912	4568	4043	ton
3	Produktivitas	0.98	0.94	1.05	1.23	1.1	ton/ha
<b>Kedelai</b>							
1	Luas Panen	4177	3874	4197	5290	4380	ha
2	Produksi (wose kering)	5444	5127	5801	6150	7309	ton
3	Produktivitas	1.3	1.32	1.38	1.16	1.67	ton/ha
<b>Bawang Merah</b>							
1	Luas Panen	1951	2077	1368	1273	1227	ha
2	Produksi	19837	21787	13109	15145	16656	ton
3	Produktivitas	10.17	10.49	9.58	11.90	13.58	ton/ha
<b>Cabe Merah</b>							
1	Luas Panen	896	645	528	476	735	ha
2	Produksi	8266.2	5188	4278	4343	6321	ton
3	Produktivitas	9.23	8.04	8.10	9.12	8.6	ton/ha

**Sumber: Dipertahut, 2010**

Usaha bidang peternakan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan dari banyaknya populasi ternak yang diusahakan oleh petani ternak meliputi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Adapun perkembangan populasi ternak besar dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.24.**  
**Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2005 (ekor)	2006 (ekor)	2007 (ekor)	2008 (ekor)	2009 (ekor)
1	Sapi potong	48.157	48.399	49.655	51.452	52.514
2	Sapi perah	177	181	171	129	130
3	Kerbau	813	801	890	734	677
4	Kuda	365	458	852	845	855

Sumber: Dipertahut, 2010

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Bantul meliputi daging, telur dan susu. Produksi daging terdiri dari daging sapi potong, kuda, kambing/domba, ayam ras dan pedaging. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur dan itik. Perkembangan produksi komoditas peternakan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.25.**  
**Produksi daging, telur, dan susu di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No.	Hasil Ternak	Tahun				
		2005 (kg)	2006(kg)	2007 (kg)	2008 (kg)	2009 (kg)
1	Daging	11.038.573	9.253.369	8.143.936	9.664.378	9.873.036
2	Telur	3.849.564	3.861.264	4.048.968	4.801.153	5.172.715
3	Susu	291.176	297.757	281.306	212.213	168.209

Sumber: Dipertahut, 2010

#### 5.2.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sehingga penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kebijakan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan meliputi tiga aspek, yakni menjamin ketersediaan, konsumsi, dan distribusi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul dapat diketahui dari indikator ketersediaan energi dan protein serta cadangan pangan yang ada di masyarakat. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein selama priode 2005-2009 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.26.**

**Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk Dikonsumsi di  
Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
1	2005	6.633	171,97	15,21	187,19
2	2006	6.299	158,63	17,79	176,42
3	2007	7.050	179,35	19,65	199
4	2008	7.065	186,71	20,38	207,09
5	2009	7.435	198,76	17,22	215,98

**Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010**

Penurunan KEP terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Adapun perkembangan cadangan pangan masyarakat (beras) yang terdiri dari stok beras yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang, dan konsumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.27.  
Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Jenis Stok	Keadaan Stok Beras (ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Masyarakat	93.314,42	92.487,68	101.048,27	105.663,17	115.949,00

**Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010**

Jika ditinjau dari aspek distribusi pangan, di Kabupaten Bantul distribusi pangan berjalan lancar karena didukung sarana jalan dan transportasi yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesenjangan harga yang mencolok antara sentra produksi dengan wilayah lainnya. Sedangkan dari aspek konsumsi pangan, di Kabupaten Bantul dapat ditunjukkan dengan parameter Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat.

Adapun perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul selama periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.28.**  
**Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul**  
**Tahun 2005–2009**

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	14,6	17,8	18,7	20,5	19,4
4	Minyak dan Lemak	0,8	4,8	4,4	4,2	4,2
5	Buah/Biji Berlemak	1	1	1	1	1
6	Kacang-Kacangan	10	10	10	10	10
7	Gula	-	-	-	-	-
8	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total	83,9	91,1	91,6	93,2	92,1

**Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010**

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum beragam, karena masih ada dominasi kelompok pangan tertentu yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Permasalahan yang ada terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain adalah masih terdapatnya daerah rawan pangan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Salah satu bentuk intervensi tersebut antara lain adalah Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan sejak tahun 2006 dan telah dialokasikan pada enam desa rawan pangan di tiga kecamatan, yaitu Desa Muntuk dan Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Selopamioro dan Wukirsari (Kecamatan Imogiri), serta Desa Srihardono dan Seloharjo (Kecamatan Pundong).

#### **5.2.5. Kehutanan dan Perkebunan**

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian penutupan lahan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal berbasis kelestarian fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial. Tahun 2005 sampai dengan 2009 luas lahan kritis di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 1.284,41 ha pada tahun 2005 menjadi 431,5 ha pada tahun 2009, seperti terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 5. 29.**  
**Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No	Jenis Lahan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Lahan Kritis (ha)	1.284,41	1.167,41	986	877	431,5

**Sumber: Dipertahut, 2010**

Penurunan lahan kritis ini karena adanya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan, sehingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif. Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan sasaran hutan rakyat adalah terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.30.**  
**Luas Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rebahilitasi Hutan Rakyat (Ha)	7.984	8.007	8.252	8.656	8.545

**Sumber: Dipertahut, 2010**

Lahan hutan rakyat saat ini juga lebih produktif karena sudah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan antara lain empon-empon dan garut. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha hutan dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha hutan rakyat, yaitu masyarakat sekitar hutan yang mengelola hutan. Jumlah kelompok tidak mengalami perubahan sejak tahun 2005-2009 yaitu sebanyak 203 kelompok. Hasil produksi hutan rakyat berupa kayu dan non kayu yang terdiri dari madu dan sriti, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 5.31.**  
**Hasil Produksi Hutan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

No.	Komoditi	Tahun					Ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kayu	5.105.650	5.087,800	2.783,942	7.018,609	6.369,442	M3
2	Non Kayu						
	a. Madu	807	824	904	674,5	1.286	kg
	b. Sriti	324	349	342	235	305	kg

**Sumber: Dipertahut, 2010**

Hasil kayu hutan rakyat biasanya digunakan untuk bahan kerajinan. Penurunan hasil kayu pada tahun 2007 karena konsentrasi masyarakat masih terfokus pada konstruksi pasca gempa bumi. Pada tahun 2008 kembali terjadi kenaikan hasil, karena konsentrasi

masyarakat sudah kembali pada lahan penghidupannya. Penurunan produksi tahun 2009 lebih disebabkan karena penurunan permintaan.

**Tabel 5.32.**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas Tembakau, Mete, Tebu, Kelapa di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009**

NO	Tembakau virgina	Tahun					Ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Luas Panen	10.4	7	10.9	6.1	19.2	Ha
2	Produksi	10.76	14.2	21.3	19	48.46	Ton (KRG OVEN)
3	Produktivitas	1.03	2.03	1.95	3.11	2.52	ton/ha (KRG OVEN)
NO	TEBAKAU RAKYAT	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	3386.5	199	233.5	231.5	504.9	Ha
2	Produksi	217.4	128.9	152.56	154.13	314.03	Ton (KRG rajang)
3	Produktivitas	0.56	0.65	0.65	0.67	0.62	ton/ha (KRG rajang)
NO	METE	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	392.4	380	390	386.3	302.35	Ha
2	Produksi	76.38	122.88	125	124.3	124.28	Ton (glondong KRG)
3	Produktivitas	0.19	0.32	0.32	0.32	0.41	ton/ha
NO	TEBU	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	1.355	1324.04	1434.97	1174.99	1455.59	Ha
2	Produksi	5569.4	5792	6941.17	6023	7245.59	Ton (HABLUR)
3	Produktivitas	4.11	4.37	4.48	5.13	4.97	ton/ha (HABLUR)
NO	KELAPA	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
	Luas area	10932.0					
	1		10521.37	10246.11	10307.05	10330.05	Ha
1	Luas Panen	7515	6941	6748.4	6760.52	6797.45	Ha
2	Produksi	11119.1	11659.5	10797.5	10228.4	10287.71	Ton (KOPRA)
3	Produktivitas	1.48	1.68	1.6	1.51	1.51	ton/ha (KOPRA)

**Sumber: Dipertahut, 2010**

Untuk komoditas unggulan tanaman perkebunan, di Kabupaten Bantul meliputi kelapa, mete, tebu dan tembakau. Adapun perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas komoditas-komoditas dapat dilihat pada Tabel 5.34.

#### 5.2.6. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bantul memiliki wilayah pantai sepanjang 17 km yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan kewenangan pengelolaan pantai sejauh 4 mil laut dari tepi garis pantai pasang surut. Wilayah laut di Kabupaten Bantul yang menjadi kewenangan pengelolaan seluas 100,008 km<sup>2</sup>. Sumberdaya kelautan perikanan tangkap di



Samudra Hindia memiliki potensi lestari 6.994,8 ton/tahun yang meliputi ikan-ikan demersal sebanyak 874,8 ton dan ikan-ikan pelagis sebanyak 6.120 ton.

Potensi perikanan budidaya air tawar pada tahun 2009 seluas 7.830 ha, dan 10 Ha untuk budidaya air payau, dengan luas baku usaha budidaya air tawar 96 ha yang dimanfaatkan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 284 kelompok dengan jumlah pembudidaya 5.092 RTP, dan hasil produksi perikanan 2.037,4 ton. Pemanfaatan lahan yang baru mencapai 1,22% masih terbuka peluang luas untuk dikembangkan. Kecamatan dan Desa Pesisir yang berada disepanjang pantai Kabupaten Bantul tampak dalam tabel berikut:

**Tabel 5.33.**  
**Kecamatan dan Desa Pesisir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kretek	1. Parangtritis	11,87
		2. Tirtohargo	3,62
2.	Sanden	1. Srigading	7,57
		2. Gadingsari	8,12
3.	Srandakan	1. Poncosari	11,86

**Sumber: DKP, 2010**

Lahan daratan pesisir disepanjang pantai Kabupaten Bantul berupa hamparan pasir dengan potensi perikanan untuk usaha budidaya tambak seluas 600 ha. Realisasi pemanfaatan potensi lahan tersebut sampai saat ini belum optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor/ kendala yang dihadapi antara lain aspek teknologi, sarana permodalan serta kemampuan SDM masyarakat pesisir.

Sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan milik kelompok nelayan di Kabupaten Bantul tahun 2009 seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 5.34.**  
**Sarana prasarana milik nelayan Kabupaten Bantul tahun 2009**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Asset/ Kelompok Nelayan					Jumlah	Ket
		Mino Tirtohargo	Mina Bahari 45	Mino Samudro	Fajar Arum	Pandan Mino		
1	TPI	-	1	1	1	1	5	Unit
2	Los Pasar TPI	-	3	1	1	1	6	Unit
3	PMT	2	22	8	14	15	68	Unit
4	PPI (sederhana)	-	1	1	1	1	5	Titik
5	Gill Net	30	660	78	140	128	663	Set
6	Pancing Rawai	2	88	17	29	30	104	Set
7	Hand Line	2	29	9	15	14	69	Set
8	Tramel Net	-	87	27	45	42	207	Set
9	Jaring Ered	170	-	85	80	35	200	Set
10	Pelampung	8	99	30	42	45	224	Buah
11	Dayung	8	105	35	28	30	206	Buah
12	Alat Pengolah Ikan	-	31	20	10	9	70	Unit
13	Warung Khas Ikan	-	25	5	9	2	41	Unit
14	Kapal 10 GT	-	-	1	1	1	3	Unit
15	Kapal 7 GT	-	-	-	-	1	1	Unit
16	Rumpon	-	-	-	-	-	3	Hilang
17	GPS	1	4	4	4	4	17	Unit

**Sumber: DKP, 2010.**

### 5.2.7. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pembangunan pada sektor energi di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang diversifikasi energi. Upaya untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan memperluas jangkauan jaringan listrik ke seluruh desa di Kabupaten Bantul ditempuh dengan cara pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dan berwawasan lingkungan (energi matahari, angin, dan biogas).

Kabupaten Bantul mempunyai potensi dalam kandungan sumberdaya mineral dan bahan tambang yang belum semua terukur dan tereksplorasi. Adapun lokasi sumber daya mineral tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, yakni: Dlingo, Imogiri, Piyungan, Sewon, Pleret, Jetis, Pajangan, Srandakan, Sedayu, Banguntapan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Kretek, dan Pundong. Pengelolaan tambang ini harus diawasi agar nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam penambangan yang dapat merusak lingkungan. Lokasi penambangan harus sesuai dengan site plan wilayah pertambangan dan harus dibatasi secara jelas agar tidak terjadi pelebaran yang nantinya dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

### 5.2.8. Pariwisata

Basis yang ada saat ini untuk obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul dikategorikan dalam beberapa kelompok, seperti: (1) wisata alam, terdiri dari: pantai, pegunungan, goa dan agrowisata; (2) wisata budaya, terdiri dari: petilasan, ziarah, makam, monumen, museum dan situs; (3) wisata buatan, terdiri dari: taman rekreasi dan pemandian, wisata pendidikan, dan sentra industri kerajinan. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.35.**  
**Sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009**

No.	Objek dan Daya Tarik Wisata	Jumlah lokasi
1.	Wisata Alam	
	a. Pantai	6 lokasi
	b. Pegunungan	2 lokasi
	c. Goa	7 lokasi
	d. Agrowisata	3 lokasi
2.	Wisata Budaya	
	a. Petilasan/Ziarah	12 lokasi
	b. Monumen	7 lokasi
	c. Makam/Ziarah	14 lokasi
	d. Museum	4 lokasi
	e. Situs	12 lokasi
3.	Wisata Buatan	
	a. Taman Rekreasi dan pemandian	6 lokasi
	b. Wisata Pendidikan	5 lokasi
	c. Sentra Industri Kerajinan	37 lokasi

**Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bantul, 2009**

Pertumbuhan jumlah obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul dalam beberapa tahun terakhir tidak begitu signifikan, yang terjadi hanya penambahan dan perbaikan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana pada obyek atau kawasan wisata. Beberapa kawasan wisata yang sudah dibangun, diperlukan terobosan kebijakan agar bisa kembali berjalan seperti perencanaan semula.

Kawasan wisata GMT (Gabusan-Manding-Tembi) dan Kajigelem misalnya, keberadaan dan peranan Pasar Seni Gabusan sebagai pusat promosi dan penjualan produk kerajinan kurang berfungsi dengan semestinya, sehingga tidak dapat mendukung kawasan GMT sebagai mana telah direncanakan.

**Tabel 5.36.**  
**Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Obyek Wisata
1	Kretek	Desa Parangtritis	- Pantai Parangtritis - Pantai Parangkusumo - Pantai Depok - Cepuri Parangkusumo - Gumuk Pasir - Lab. Geospasial - Makam Syeh Bela Belu - Makam Syeh Maulana Maghribi - Pemandian Parangwedang
2	Sanden	Desa Sri Gading	- Pantai Samas - Pantai Patehan
3	Srandakan	Desa Poncosari	- Pantai Pandansimo - Pantai Kwaru
4	Pajangan	Desa Guwosari	- Goa Selarong
		Ds. Sendangsari	- Desa Wisata Kreet
5	Imogiri	Ds. Selopamioro	- Goa Cerme
		Desa Girirejo	- Kerajinan Keris - Makam Pangeran Pekik
		Desa Wukirsari	- Makam Seniman Girisapto - Kerajinan Batik - Tatah Sungging - Makam Raja-Raja Mataram
		Ds. Kebonagung	- Kerajinan Tatah Sungging - Desa Wisata Kebonagung
6	Bantul	Desa Tirirenggo	- KR Tirtatamansari
		Desa Sabdodadi	- Desa Wisata Manding
7	Pundong	Desa Seloharjo	- Goa Jepang - Kerajinan Keramik
8	Dlingo	Desa Mangunan	- Goa Gajah - Kebun Buah Mangunan
9	Sewon	Desa Timbulharjo	- Pasar Seni Gabusan - Desa Wisata Tembi
10	Kasihan	Desa Bangunjiwo	- Desa Wisata Kasongan - Kerajinan Tatah Batu Lemahdadi - Kerajinan Tatah Sungging
11	Pandak	Desa Wijirejo	- Kerajinan Batik
12	Banguntapan	Desa Baturetno	- Taman Rekreasi Air Balong - Museum Wayang Kekayon

**Sumber: Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010**

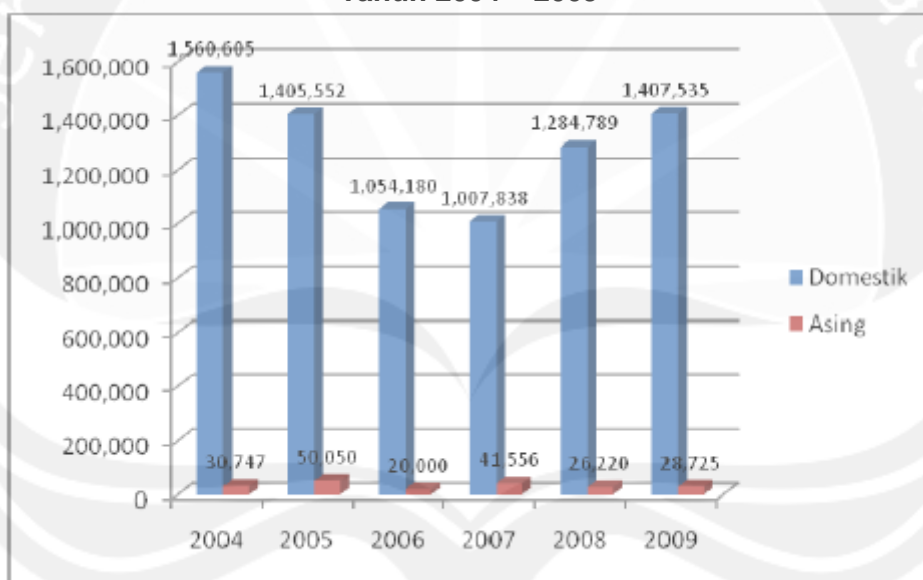
Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata dapat ditinjau dari jumlah kunjungan wisatawan. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul tahun 2004–2009 disajikan pada Tabel 5.37 dan perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantul tahun 2004–2009 disajikan pada Gambar 3.

**Tabel 5.37.**  
**Pertumbuhan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009**

Wisatawan	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Domestik	1.506.605	1.405.552	1.054.180	1.007.838	1.284.789	1.407.535
Asing	30.747	50.050	20.000	41.556	26.220	28.725
Jumlah	1.537.352	1.455.602	1.074.180	1.049.394	1.311.009	1.436.260
Pertumbuhan		-5,32	-26,20	-2,31	24,93	9,55

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

**Gambar 3. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009**



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

Dari Tabel 5.37 dan Gambar 3. dapat diketahui bahwa secara umum jumlah kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan dari 1.506.605 wisatawan menjadi 1.007.838 kunjungan (turun 33,10%) pada tahun 2007. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2008 dan 2009, hingga mencapai 1.407.535 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan ini bisa dimaklumi, karena pada tahun 2006 Kabupaten Bantul dilanda Gempa Bumi dan mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur daerah. Seirama dengan wisatawan domestik, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Bantul juga mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2006. Untuk tahun 2008 dan tahun 2009

kunjungan wisatawan asing sudah meningkat yaitu 26.220 dan 28.725 kunjungan wisatawan asing.

Jumlah ketersediaan akomodasi berupa hotel bintang dan non bintang, sebagai pendukung pariwisata di Kabupaten Bantul yang tersebar di 17 kecamatan mencapai 230 unit. Kecamatan Kretek merupakan pemilik akomodasi paling banyak (251 unit). Hotel bintang hampir tidak ada di ditemui di wilayah Kabupaten Bantul, umumnya adalah hotel non-bintang. Kalau melihat kondisi yang ada saat ini, wisatawan tidak terlalu mementingkan apakah hotel tersebut bintang ataupun non bintang.

## 5.2.9. Sosial Budaya Daerah

### 5.2.9.1. Kependudukan

Salah satu faktor penting dalam aspek kependudukan yang menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 5.38. Dari Tabel 38 tersebut dapat diketahui bahwa angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yaitu dari 2,19% (tahun 2005) menjadi 1,41% (tahun 2009). Kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

**Tabel 5.38.**  
**Angka Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	TH	JUMLAH PENDUDUK BERDASAR KELOMPOK UMUR								JUMLAH	Pertumb (%)
		0 -9 TH		10 -19 TH		20 - 39 TH		> 40 TH			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2005	64.746	63.083	66.377	68.502	148.884	148.059	144.284	167.268	871.203	2,19
2	2006	64.359	64.240	71.752	68.913	142.848	144.528	152.721	174.725	884.086	1,48
3	2007	63.922	65.407	77.275	69.315	136.520	140.871	161.367	182.317	896.994	1,46
4	2008	64.835	66.341	78.379	70.305	138.471	142.884	163.674	184.923	909.812	1,43
5	2009	65.338	68.134	69.168	67.955	143.063	142.134	178.025	188.749	922.566	1,41

**Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010**

Selain itu, dari Tabel 40 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Bantul memiliki kecenderungan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Bantul berusia di atas 40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

### 5.2.9.2. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bantul sebanyak 30.853 orang atau 8% dari jumlah angkatan kerja. Berdasar data jumlah pencari kerja, penduduk yang menganggur dan mencari kerja itu dari tahun ke tahun bervariasi. Selama tahun 2005-2009 pencari kerja terbanyak terjadi pada tahun 2008 yang mencapai angka 14.786 orang dan terendah tahun 2006 sebanyak 7.471 orang. Sedikitnya pencari kerja pada tahun 2006 terkait dengan kejadian gempa yang menimpa penduduk Bantul.

Masalah pelik ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul adalah para pencari kerja ini sebagian besar justru mereka yang berpendidikan (lihat Tabel 5.39). Lulusan terbanyak pencari kerja adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana S1), diikuti oleh lulusan sekolah menengah kejuruan dan Diploma III/IV baru SMA. Sementara itu mereka yang lulusan SD dan SMP cenderung tidak mencari pekerjaan. Persoalan ini menjadi indikasi serius lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun.

**Tabel 5.39.**  
**Jumlah dan proporsi Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2009**

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
1	Sekolah Dasar	26	0,1
2	Sekolah Menengah Pertama	341	2,59
3	Sekolah Menengah Atas Umum	1.937	14,75
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3.908	29,76
5	Diploma 1 dan 2	239	1,82
6	Diploma 3 dan 4	2.066	15,73
7	Sarjana S1	4.584	34,26
8	S2 dan S3	30	0,2
	Jumlah	13.131	100

**Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2010**

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul yang berkerja sebagian besar bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri (lihat Tabel 5.40). Jika angka ini dikaitkan dengan pangsa sektor tersebut untuk menghasilkan nilai tambah (PDRB) maka terlihat bahwa penduduk juga terdistribusi secara relatif merata. Sektor pertanian yang menghidupi 25,56% penduduk menghasilkan PDRB sekitar 24,32%, sementara itu perdagangan dengan penduduk sebanyak 21,16% menghasilkan nilai tambah



sekitar 19,76% dan industri dengan penduduk sebanyak 18,95% menghasilkan PDRB sekitar 16,16%.

**Tabel 5.40.**  
**Penduduk Berdasar Mata Pencapaian Utama Tahun 2009**

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1	Pertanian	25,56
2	Pertambangan dan penggalian	1,98
3	Industri	18,95
4	Listrik, gas, dan air	0,07
5	Konstruksi	8,88
6	Perdagangan	21,16
7	Komunikasi/transportasi	4,64
8	Keuangan	1,61
9	Jasa	16,89
10	Lainnya	0,27
Jumlah		100,00

**Sumber: BPS Kab. Bantul, 2010**

### 5.2.9.3. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial di suatu wilayah sangat terkait dengan kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan.

Pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bantul masih tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada tahun 2008, IPM Kabupaten Bantul mencapai angka 73,38, meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,78. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.41.

**Tabel 5.41.**  
**Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007 dan 2008**

Prop/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup		Rata-rata Lama Sekolah		Angka Melek Huruf		Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan		IPM		Peringkat		Reduksi Shortfall	
(1)	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
D.I. Yogyakarta	73,17	73,11	8,59	8,71	87,78	89,48	639,88	643,25	74,19	74,88	4	4	1,83	2,81
01. Kulonprogo	73,35	73,79	7,80	7,80	88,69	88,72	624,09	628,29	72,89	73,26	108	110	2,43	1,86
02. Bantul	<b>70,95</b>	<b>71,11</b>	<b>8,36</b>	<b>8,55</b>	<b>88,46</b>	<b>88,60</b>	<b>637,79</b>	<b>642,19</b>	<b>72,78</b>	<b>73,38</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>2,89</b>	<b>2,20</b>
03. Gunungkidul	70,85	70,79	7,76	7,60	84,50	84,50	617,70	621,67	69,85	70,00	238	255	1,37	1,07
04. Sleman	73,85	74,43	10,26	10,10	91,49	91,49	640,60	645,15	76,68	77,24	15	15	1,89	2,29
71. Yogyakarta	73,17	73,27	10,95	11,42	97,55	97,70	640,66	645,10	78,16	78,95	2	2	1,58	3,88

**Sumber: BPS Bantul, 2009**

Tingginya IPM yang dicapai Bantul bukan berarti tidak ada masalah sosial. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bantul relatif cukup besar. Secara rinci kondisi PMKS tahun 2009 yang dominan dapat digambarkan dalam Tabel 5.42.

Penyandang masalah sosial di Kabupaten Bantul ditangani melalui program-program antara lain bantuan sosial kemasyarakatan, penyuluhan PMKS, dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Selain data penyandang masalah sosial (PMKS) sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang bisa memberikan kontribusi/dorongan perbaikan terhadap penyandang masalah sosial. Disamping itu juga terdapat potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.43.

**Tabel 5.42.**  
**Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Tahun 2009**

No	Jenis PMKS	2009
1	Anak Balita Terlantar	699
2	Anak Terlantar	5.795
3	Anak Nakal	239
4	Anak Jalanan	232
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.871
6	Korban Tindak Kekerasan	1.051
7	Lanjut Usia Terlantar	3.900
8	Penyandang Cacat	7.957
9	Tuna Susila	45
10	Pengemis	119
11	Gelandangan	72
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	827
13	Korban Penyalahgunaan Napza	553
14	Keluarga Fakir Miskin	49.157
15	Keluarga Tinggal di Rumah Tdk Layak Huni	3.821
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	575
17	Komunitas Adat Terpencil	0
18	Korban Bencana Alam	21
19	Korban Bencana Sosial	3
20	Pekerja Bermasalah Sosial/Terlantar	477
21	Penyandang HIV/AIDS	93
22	Keluarga Rentan	21.488

Sumber: Dinas Sosial, 2010

Permasalahan kesejahteraan sosial yang lain adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender di Kabupaten Bantul tidak jauh berbeda dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Sumber utama permasalahan tersebut adalah sebagian besar berakar pada budaya paternalistik dan



primordial yang cenderung mendistorsi terhadap kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, budaya, hankam, dan lain-lain).

**Tabel 5.43.**  
**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2009**

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	534
2	Keperintisan dan Kepahlawanan	807
3	Organisasi Sosial (Orsos)	57
4	Karang Taruna (KT)	75
5	Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	16
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	8

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul Th 2010.

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Sebagai gambaran pencapaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.44.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender**

Thn	DIY		Yogyakarta		Bantul		KP		GK		Sleman	
	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank
2004	62,3	2	73,8	1	60,7	36	47,5	223	56,1	96	63,1	18
2005	62,4	2	73,8	3	61,7	33	47,5	247	54,6	128	63	25
2006	62,4	6	74,2	4	63,3	38	59,8	84	56,4	143	62,7	45
2007	62,7	8	74,3	4	63,6	41	60,1	87	57,8	134	62,8	49

Sumber: BPPM Provinsi DIY, 2010

#### 5.2.9.4. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama.

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang besar pengaruhnya secara berurutan, yaitu (1) faktor lingkungan, (2) faktor perilaku, (3) faktor pelayanan kesehatan dan (4) faktor keturunan (Hendrik L. Blum). Derajat kesehatan merupakan

pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

### 1) Indikator Kematian Ibu dan Anak

Indikator yang penting untuk mengukur kapasitas pelayanan kesehatan adalah kematian yang dianggap tidak diharapkan. Kematian wajar termasuk yang disebabkan kondisi kelainan sejak lahir dan karena lanjut usia. Kematian pada usia muda (bayi dan Balita) dan kematian karena kehamilan, persalinan dan masa nifas termasuk kondisi yang tidak diharapkan. Kondisi kematian semacam itu dalam situasi yang wajar dapat diatasi oleh sistem pelayanan kesehatan, sehingga suatu daerah bisa mempelajari kemampuan sistem pelayanan kesehatannya. Sektor kesehatan dunia menyepakati bahwa kematian ibu dan kematian anak merupakan agenda kesehatan internasional karena pandangan hak asasi.

Pandangan hak asasi ini menegaskan bahwa kematian ibu dan anak bertentangan dengan asas kemanusiaan. Kesepakatan ini tertuang dalam Millenium Development Goal's (MDG's), yaitu menurunkan angka kematian anak (target 4), dan meningkatkan kesehatan ibu (target 5). Angka kematian ibu karena proses kehamilan, persalinan dan masa nifas serta Angka Kematian pada Bayi dan Balita dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah kematian ibu karena proses persalinan pada tahun 2009 adalah 18. Kabupaten Bantul memiliki kontribusi 37,5% terhadap jumlah kematian ibu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki Angka Kematian Ibu lebih tinggi dari angka untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (158 versus 109).

**Tabel 5.45.**  
**Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	KAB. BANTUL, TAHUN					DIY
		2005	2006	2007	2008	2009	TH. 2009
1	Proporsi Kematian Bayi/1.000 KH	7,9	9,8	7,69	13,23	11,8	7,54
2	Proporsi Kematian Balita/1.000 Balita			0,39	0,12	0,19	0,82
3	Proporsi Kematian Ibu/100.000	114	84	47,14	140,13	158,29	109
4	Umur Harapan Hidup :						
	Pria(th)	70	70	71	71	71	
	Wanita (th)	72	72	72	72	72	

**Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010**

Status kesehatan penduduk di atas ini bisa ditafsirkan dengan dua cara. Jika status kesehatan penduduk seperti angka di atas dianggap wajar, maka kondisi yang mendukungnya adalah perbedaan ciri-ciri sosial demografi dari daerah ini dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dianggap tidak wajar, maka kinerja sistem pelayanan kesehatan di Bantul lebih buruk daripada daerah lain di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Jika demikian, maka kapasitas pelayanan kesehatan harus dipelajari. Disisi lain, dapat juga dikatakan bahwa sistem surveilans di Bantul sudah lebih baik daripada daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2) Kondisi Penyakit di Bantul

Selain indikator kematian ibu dan anak, penderita dengan berbagai penyakit yang memerlukan pertolongan tetap tinggi. Penyakit-penyakit infeksi seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), atau pun diare yang tidak memperoleh layanan pengobatan yang efektif dapat berpotensi menjadi wabah dan krisis sosial. Penyakit leptospirosis mulai muncul. Penyakit TBC menyebar di seluruh desa, namun angka penemuan kasus masih sangat rendah. Penyakit DBD merebak bahkan meningkat diluar desa endemis yang berbatasan dengan kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi penyakit tidak menular terutama penyakit degeneratif di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Hal ini menyebabkan beban ganda Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bantul, yaitu selain penanganan terhadap penyakit infeksi harus terus diintensifkan, tindakan pencegahan terhadap meningkatnya penyakit tidak menular juga harus dilaksanakan.

**Tabel 5.46.**  
**Angka Kesakitan Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	JENIS PENYAKIT	IR/1.000					
		2005	2006	2007	2008	2009	NASIONAL
1	DBD	0,26	0,6	0,7	0,45	0,67	0,3
2	Diare	11,74	12,29	14,88	15,01	12,75	33
3	Malaria	0	0	0	0	0	1
4	Kusta			0,0096	0,0085	0,007	0,001
5	IMS (Sipilis pd risti)	11,8	37,03	14,89	10,12	72,07	10
6	Penanganan Pneumonia (Balita)	100	100	100	100	100	100
7	HIV (+) kasus	11	13	17	36	43	
	AIDS						
8	Tetanus Neonatorum	0	0	0	0	0	0
9	Suspek (kasus) TB						
	Perkiraan BTA (+) kasus	521	521	521	521	521	
	BTA (+) kasus	173	247	235	258	260	
	TB BTA (+) %	33,86	47,4	45,11	49,52	49,90	70
	Angka Kesembuhan	83,24	88,06	88,06	88,27	84,94	85 %
10	Imunisasi Dasar	96,99	95,03	96,39	95,97	99,4	80
11	Leptospirosis (kasus)	0	0	0	0	1	

**Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010**

**Keterangan : IR= Incidens Rate**

**MS = Infeksi Menular Seksual**

Pola penyakit yang ada di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, terlihat pada kejadian penyakit tidak menular mulai mendominasi pasien rawat jalan di RS seperti Hipertensi (17,43%) dan Diabetes mellitus (10,32%).

**Tabel 5.47.**  
**Sepuluh Besar Pola Penyakit Kasus Rawat Jalan di RSUD Panembahan Senopati Untuk Semua Golongan Umur Tahun 2009**

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS BARU	
		JUMLAH	%
1	Hipertensi	10.784	17,43
2	Diabetes Mellitus	6.384	10,32
3	Dyspnea	5.292	8,55
4	PKTB	4.231	6,84
5	Low Back Pain (LBP)	3.408	5,51
6	Post Operasi	2.889	4,67
7	Decom Cordis	2.547	4,56
8	ISK	2.290	4,12
9	Keur Umum	2.290	3,70
10	Osteoarthritis	2.206	3,57

**Sumber Data : SP2RS**

Dari data pasien rawat inap di RSUD pada tabel 48 terlihat bahwa penyebab utama kematian untuk semua golongan umur adalah stroke (17,84%). Angka ini secara umum menunjukkan penyakit degeneratif sudah menjadi masalah yang cukup serius disamping penyakit-penyakit infeksi. Namun angka ini tidak bisa menggambarkan pola penyebab kematian secara menyeluruh di Kabupaten Bantul, karena data tersebut hanya yang ada di rumah sakit sehingga sampelnya sangat spesifik. Sedangkan pola penyebab kematian di masyarakat belum dimiliki.

**Tabel 5.48.**  
**Sepuluh Besar Pola Kematian Menurut Penyakit Ranap di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2009**

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS	
		JUMLAH	%
1	Stroke	84	17.84
2	Decompensasio Cordis	31	6,58
3	Dyspnoe	28	5,94
4	Syok Kardiogenik	25	5,31
5	KP/TBC	21	4,46
6	Diabetes Militus	20	4,25
7	CKD	18	3,82
8	Syok Septik	15	3,18
9	Pneumonia	10	2,12
10	AMI	8	1,70

**Sumber Data : SP2RS**

### 3) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Kesehatan reproduksi memiliki dua sisi, yaitu sisi kesehatan anak dan kesehatan perempuan. Sistem kesehatan yang gagal memprioritaskan pelayanan kesehatan reproduksi mengakibatkan kematian ibu pada masa hamil, persalinan dan masa nifas serta kondisi yang merugikan kepentingan perempuan. Pada sisi yang lain, perempuan pada masyarakat kini memiliki peran yang penting dalam ranah publik. Peran itu terganggu jika pelayanan kesehatan reproduksi tidak terpenuhi. Pelayanan kesehatan reproduksi mewakili penghargaan terhadap hak asasi manusia baik dari kepentingan anak maupun perempuan.

Jumlah penduduk merupakan aset yang penting bagi ekonomi daerah. Meski demikian jumlah yang tidak seimbang dengan kapasitas pelayanan publik untuk mengembangkan mutu penduduk dapat merugikan daerah. Keluarga berencana merupakan salah satu strategi kunci dalam mengontrol kelebihan penduduk. Jika melihat kapasitas layanan publik saat ini, penekanan angka kelahiran masih diperlukan agar Kabupaten Bantul bisa menekankan peningkatan kualitas hidup dari jumlah penduduk yang ada. Tabel di bawah ini menyajikan indikator umum kepesertaan keluarga berencana yang telah berhasil.

**Tabel 5.49.**  
**Kepesertaan Keluarga Berencana Tahun 2009**

Indikator Keluarga Berencana	Persentase
Peserta KB Baru	8.78
Peserta KB Aktif	76.34
Peserta KB Aktif (MKJP + Non MKJP)	100.00
Peserta KB Baru (MKJP + Non MKJP)	100.00

**Sumber data :**

**Keterangan: MKJP = Metode kontrasepsi jangka panjang**

Data kepesertaan ini menunjukkan program keluarga berencana memiliki kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga di bidang keluarga berencana, meskipun masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang belum menggunakan konsep keluarga berencana, sehingga masih ada ibu hamil dengan faktor resiko “4 T”, yaitu terlalu muda (umur kurang dari 20 tahun) sebanyak 10,3%, terlalu tua (umur lebih dari 35 tahun) sebanyak 11,24%, terlalu sering (jarak kehamilan kurang dua tahun) sebanyak 5,5%, dan terlalu banyak (anak lebih dari empat) sebanyak 2,07%.

### 4) Masalah Gizi Anak dan Masyarakat

Anak merupakan masa persiapan untuk menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan produktif. Kegagalan perkembangan anak mengakibatkan kualitas penduduk dewasa yang lemah dalam berbagai aspek. Hal ini dimulai dari kondisi ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Program pengentasan gizi buruk merupakan kewajiban dari semua



*stakeholders*, baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, dll. Strategi perbaikan gizi yang berbasis peternakan, perikanan dan kebun keluarga yang dikelola bersama antara SKPD terkait merupakan kunci kemandirian bidang pangan. Selain itu, dua program rutin mengenai gizi yang dominan hingga sekarang adalah (1) kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dan Penyuluhan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang terintegrasi dalam layanan *Antenatal Care* dan penimbangan balita dan (2) Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dilakukan di sekolah dengan melibatkan peran TP-PKK di semua tingkat.

**Tabel 5.50.**  
**Status Gizi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	URAIAN	TAHUN					Standar
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	KEP Balita :						
	Nyata	1,02	0,74	0,87	0,62	0,33	2%
	Ringan	9,76	11,86	12,53	10,58	10,87	15%
	Total	10,72	12,60	13,40	11,20	11,31	20%
2	BBLR		5,40	3,20	5,03	5,17	4%
3	Anemia Gizi Besi Bumil	16,4	21,55	14,30	26,71	60,0	50%

**Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010**

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Tabel di atas menunjukkan beberapa indikator tentang gizi anak. Yang terpenting dari informasi di bawah adalah yang berkaitan dengan penimbangan balita dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Hasil pemantauan status gizi terhadap balita pada tahun 2005 masih terdapat 10,72% yang termasuk dalam kategori KEP (Kurang Energi Protein) dengan kecenderungan mengalami kenaikan dan pada tahun 2009 menjadi 11,31%. Hal ini masih perlu diwaspadai, walaupun prevalensi Kurang Energi Protein secara total sudah berada dibawah standar yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan cakupan program perbaikan gizi Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.51.**  
**Cakupan Program Perbaikan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

INDIKATOR	CAKUPAN (%)					TARGET
	2005	2006	2007	2008	2009	
D/S	72,91	72,00	75,02	75,34	74,44	80
N/D	58,1	61	62,23	59,20	56,94	70
Fe-3 Ibu hamil	81,37	65,91	72,40	76,23	82,07	80
Vit. A Bufas	85,18	66,79	96,80	97,03	85,57	100
Vit A Bayi	88,99	81,46	91,34	94,58	97,12	100
Vit. A Balita	82,78	88,22	95,52	97,87	96,50	90
Kapsul Yodium Bumil	92,88	76,67	96,80	<i>Tidak ada kapsul</i>		100
Pemantauan garam Yodium (Desa Baik)	66,79	96,8	97,03	85,57	81,69	80

**Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010**

**Keterangan : D/S = Balita yang ditimbang di Posyandu dibanding dg jumlah Balita yang ada**

**N/S = Balita yang naik berat badannya dibanding dengan jumlah Balita yang ada**

Berdasarkan hasil cakupan diatas terlihat bahwa sebagian besar pencapaian indikator program gizi belum dapat mencapai target yang ditentukan walaupun untuk pencapaian tahun 2009 sudah mengalami beberapa peningkatan terutama untuk pemberian vitamin A dan Fe.

Pencapaian indikator tersebut sangat membutuhkan partisipasi masyarakat di Posyandu. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam kegiatan Posyandu, perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan.

## **5) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**

### **• Sarana Kesehatan**

Kabupaten Bantul memiliki sejumlah pelayanan kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas rawat inap dan rawat jalan, serta perangkat tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pemberi layanan kesehatan primer. Pemberi layanan primer swasta yang telah banyak bertambah. Kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul tahun disajikan pada Tabel 5.54.

**Tabel 5.52.**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009**

NO	JENIS SARANA	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Puskesmas Non TT	18	15	10	11	11
2	Puskesmas TT	8	11	16	16	16
	Jumlah TT	76	110	160	160	160
	Rasio puskesmas/pddk	1 : 31.152	1 : 31.559	1 : 31.998	1 : 34.479	1 : 34.910
3	Pustu	67	67	67	67	67
	Rasio Pustu/pddk	1 : 12.089	1 : 12.247	1 : 12.417	1 : 13.895	1 : 14.068
4	Pusling	26	26	26	27	27
5	Posyandu	1.092	1.095	1.101	1.113	1.123
	Rasio Posyandu/pddk	1 : 741	1 : 734	1 : 745	1 : 836	1 : 839
6	Poskesdes	0	0	6	10	16
	Rasio Polindes/pddk	0	0	1 : 138.659	1 : 93.095	1 : 58.911
7	Rumah Bersalin	7	15	25	27	28
8	Balai Pengobatan	21	21	60	66	66
9	Tempat Praktek Dokter	166	317	515	515	325
10	Apotek	54	56	66	72	70
11	Rumah Sakit Umum	4	4	4	5	9
12	Rumah Sakit Khusus	2	3	3	2	2

**Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan unit pelayanan kesehatan swasta seperti rumah bersalin, balai pengobatan, apotek, dan rumah sakit umum. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, demi peningkatan pelayanan sekaligus melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab.

#### • Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan tahun 2005 telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, jumlah Bidan PNS sebanyak 159 orang, jika dibanding dengan jumlah desa maka rasionya 2,17 : 1, dan telah meningkat menjadi 199 orang pada tahun 2009 ditambah tenaga bidan PTT sebanyak 73 orang. Tenaga Paramedis Perawatan (Perawat dan perawat gigi) ada 184 orang pada tahun 2005, dan telah meningkat menjadi 259 orang di tahun 2009. Dokter gigi PNS 31 orang meningkat menjadi 44 orang pada tahun 2009 dan masih ditambah dokter gigi PTT sejumlah 10 orang. Dokter umum termasuk Dokter PTT sebanyak 63 orang pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 83 orang pada tahun 2009. Jumlah tenaga kesehatan PNS ini sudah termasuk pegawai yang tugas belajar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.53.**  
**Jumlah Pegawai Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	JENIS PENDIDIKAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter Umum	63	63	70	71	83
2	Dokter Gigi	31	31	38	37	44
3	Bidan	159	165	194	195	199
4	Paramedis Perawatan	184	200	240	237	259
5	Pembantu Paramedis	54	0	0	0	0
6	Paramedis Non Perawatan :	106				
	Gizi		32	33	31	29
	Farmasi		41	35	36	37
	Teknis Medis		55	55	47	46
	Sanitarian		51	42	45	42
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	13	28	29	31	32
8	S1 Non Kesehatan	1	18	16	16	17
9	D3 Non Kesehatan		17	10	8	8
10	Pascasarjana	0	14	11	10	14
11	Tenaga Non Kesh (SD, SMP, SMA)	108	195	194	196	191
Jumlah		719	910	967	966	1002

**Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010**

**• Sarana Kesehatan**

Pada umumnya peralatan medis Puskesmas baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih kurang, apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan non medis, kondisinya belum memadai, baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, antara lain meja kursi karyawan, komputer, yang perlu dipisahkan untuk Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan administrasi, jaringan online komputer UPT Kesehatan, perangkat audio, dan audio visual aid (AVA).

**• Pembiayaan Kesehatan**

Dengan adanya kebijaksanaan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tiga sumber pendapatan untuk membiayai kegiatannya yaitu :

- (1) Alokasi dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan kepada daerah sebagai *unspecified block grant*, sedangkan DAK digunakan untuk keperluan Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Sakit dan Pengadaan Sarana/Prasarana,
- (2) Pendapatan dari retribusi,
- (3) Anggaran dari cukai

**Tabel 5.54.**  
**Anggaran Kesehatan Rutin dan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2005-2008**

No	Sumber Dana	2005		2006		2007		2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Anggaran Kesehatan APBD Kab.	16.925.128.415	39	29.755.261.782	53	50.320.127.202	63	59.118.369.344	63
	Pembangunan Rutin/ termasuk gaji	23.299.976.185	54	24.366.016.000	44	29.937.343.000	37	35.013.195.400	37
2	APBN : Pembangunan Rutin/Gaji Via Prop.	3.034.836.757	7	1.685.581.100	3				
Jumlah									
	Pembangunan Rutin	19.959.965.172	46	31.440.842.882	56	50.320.127.202	63	59.118.369.344	63
	Total Dana	23.299.976.185	54	24.366.016.000	44	29.937.343.000	37	35.013.195.400	37
	Keshtan	43.259.941.357	100	55.806.858.882	100	80.257.470.202	100	94.131.864.744	100
3	Anggaran APBD	424.914.879.019	100	595.956.853.508	100	676.890.054.61	100	1.040.092.602.101	100
	Biaya Kes.DAU PAD	40.225.104.600	9	54.121.277.782	9	80.257.470.202	12	94.131.864.744	9

**Sumber Data : Perda Kab. Bantul No. 05 Th 2005, Profil Kesehatan Bantul & Study DHA Kab. Bantul 2008.**

Dari tabel diatas, terlihat bahwa alokasi dana untuk pembiayaan kesehatan mencapai 9% dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan demikian perlu pemikiran lebih lanjut untuk mempersiapkan strategi ke depan terhadap pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam era otonomi sepenuhnya tergantung kepada daerah, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

#### **6) Pengembangan Lingkungan Sehat**

Jumlah rumah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebanyak 183.182 rumah, meningkat pada tahun 2009 menjadi 204.781. Jumlah rumah yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 32.659 (15,59%) rumah, dimana 62,96% masuk dalam kategori rumah sehat.

**Tabel 5.55.**  
**Kualitas Perumahan, Jamban, dan SPAL di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009**

NO	TAHUN	2005	2006	2007	2008	2009
1	% Rumah Sehat	50.94	55.75	65.98	58.08	62.96
2	% Jamban Sehat	83.78	64.58	64.20	64.50	83.64
3	% SPAL Sehat	74.32	64.50	64.20	64.50	74.84

**Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010**

Jumlah keluarga di Kabupaten Bantul tahun 2009 yang diperiksa akses air bersihnya dilaporkan sebanyak 16,44%, dimana hasilnya adalah seluruh keluarga yang diperiksa akses air bersih 59,64% memiliki akses air bersih dengan memanfaatkan sumur gali.

Jumlah keluarga yang memiliki jamban dilaporkan sebanyak 69,73%, yang memenuhi syarat jamban sehat sebanyak 83,65%.Kepemilikan tempat sampah dilaporkan sebanyak 77,35%, yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 81,72% Pada pengelolaan limbah rumah tangga, dilaporkan sebanyak 68,36% KK sudah memiliki sarana pengelolaam limbah rumah tangga, dimana yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 74,84%.

Dalam rangka upaya pencegahan penyakit yang dibawa oleh nyamuk di Kabupaten Bantul dilakukan kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN), dilaporkan bahwa 6,59% rumah atau bangunan yang diperiksa keberadaan jentik nyamuknya. Hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 79,12% rumah atau bangunan bebas dari jentik nyamuk.

#### **7) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Semesta**

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul yang telah tercakup dalam jaminan kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 227.305 jiwa, yang terdiri dari (1) Jamkesmas untuk masyarakat miskin sebesar 134.195 jiwa, (2) Askes PNS sebanyak 83.573 jiwa, dan (3) Jamsostek sebanyak 9.537 jiwa.

Sebanyak 683.267 jiwa penduduk Bantul belum memiliki jaminan kesehatan. Dalam rangka program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta), diharapkan pada tahun 2015 semua penduduk di Kabupaten Bantul sudah dicakup dengan jaminan pemeliharaan kesehatan.

#### **8) Manajemen dan Informasi Kesehatan**

Manajemen kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari sisi manajemendi tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah dapat berjalan secara optimal. Dinas Kesehatan sebagai penyusun kebijakan dan koordinasi pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten Bantul sejak Desember 2009 mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 07 Tahun 2010.

Dalam organisasi Dinas Kesehatan Bantul, terdapat jabatan eselon III (5 orang, yaitu sekretaris dan 4 kepala bidang) dan eselon IVa (15 orang, yaitu 3 orang kepala sub bagian dan 12 orang kepala seksi). Kepala Puskesmas di Kabupaten Bantul telah terpenuhi sebanyak 27 orang, bahkan pada bulan Pebruari 2010, seluruh Puskesmas telah memiliki kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Sistem informasi manajemen kesehatan**, telah dimulai pada bulan April 2010 dengan menggunakan komputer, khususnya pada bagian pelayanan pasien dalam gedung

Puskesmas. Sistem yang digunakan yaitu *Integrated Health Information System (IHIS)* yang dikembangkan sejak tahun 2007 dan *e-Health* yang dikembangkan sejak tahun 2009 melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemmenkominfo).

Integrasi data dari sistem IHIS maupun e-Health telah dilakukan, namun belum dapat *real time online* dan sebagian masih dengan cara manual. Namun demikian, permasalahan ini tidak mengurangi upaya penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan sebagai upaya pemecahan masalah dengan pendekatan *evidence based*, hanya perlu ditingkatkan secara optimal, seperti pengambilan keputusan dalam waktu segera untuk penanggulangan penyakit menular, KLB dan wabah penyakit, gizi buruk dan lain-lain diupayakan dapat dilakukan dengan segera sesuai dengan informasi yang ada.

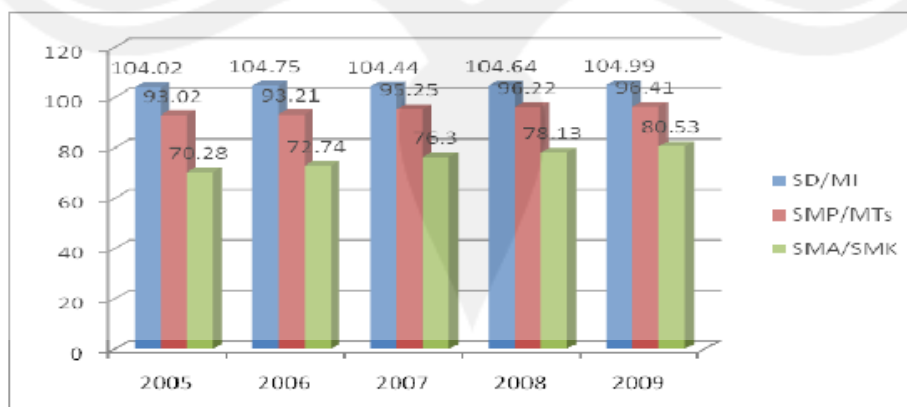
#### 5.2.9.5. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah, dan angka melek huruf.

##### 1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran umum mengenai banyaknya anak yang sedang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Gambar 4.

**Gambar 4. APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009**



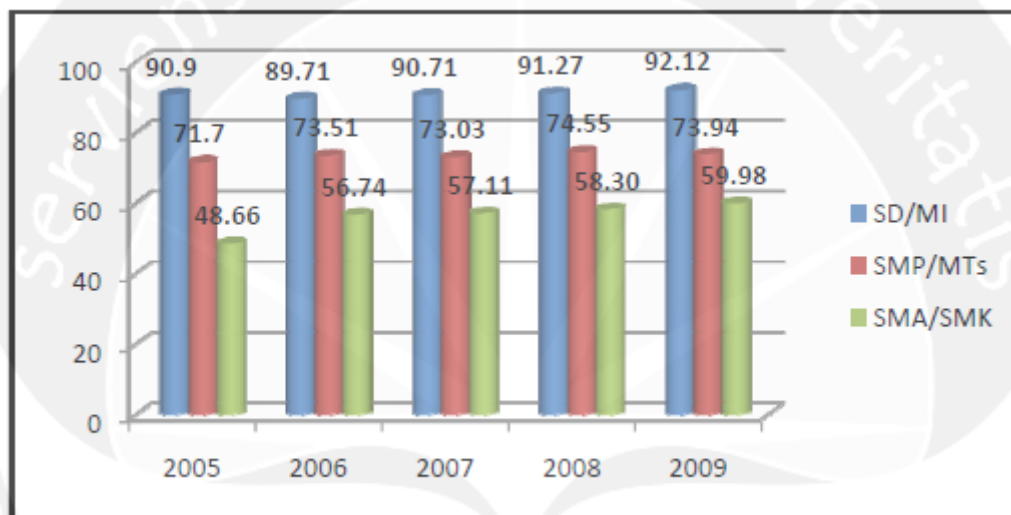
Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010

Dari Gambar 4 tersebut dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan APK tersebut menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.

## 2) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Gambar 5

**Gambar 5. APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009**



**Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010**

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa APM di Kabupaten Bantul pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk

## 3) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan indikator yang mencerminkan anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 5.56.

**Tabel 5.56.**  
**Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2006/2007 – 2008/2009**

Indikator	2006/2007	2007/2008	2008/2009
SD	0,09	0,08	0,07
MI	0,09	0,14	0,08
SMP	0,33	0,40	0,20
MTs	0,92	1,2	0,44
SMA	0,41	0,25	0,09
MA	0,75	3,23	0,05
SMK	1,72	3,00	0,49

**Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010**

#### **4) Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk :

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2009 disajikan pada tabel 5.57.

**Tabel 5.57.**  
**Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009**

Uraian	2006	2007	2008	2009
Jumlah Melek Huruf (orang)	789.575	815.913	902.166	709.499
Persentase Melek Huruf (%)	98,34	98,71	99,15	99,60
Jumlah Penduduk seluruhnya (orang)	802.894	826.546	909.812	712.351

**Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010**

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2006–2009 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Bantul.



### 5.2.9.6. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2009 disajikan pada Tabel 5.58.

**Tabel 5.58.**  
**Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2009**

No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
1	Bintang Mataram	Jl. Ringin putih 500 B Perum Depag Kotagede telp. 378620	Org. informal	Teater kontemporer
2	Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)	Purek III ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra
3	Dagelan Mataram Baru (DMB)	Desa Kerajinan Keramik Kasongan	Org. informal	Teater tradisional
4	Forum Kesenian Indonesia	Jotawang, Bangunharjo Telp. 385137	Yayasan	Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra
5	Institut Seni Indonesia	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
6	Kelompok Jendela	Kersan No. 211 RT 08 / 05 Tirtanirmolo Telp.08122965526	Org. informal	Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropologi, lingkungan, hukum, politik dan social
7	Keroncong Sinten Remen	Desa Kersa, Tirtanirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	musik tradisional dan kontemporer
8	Komunitas Angkringan	Jl. Nitiprayan 50 Ngestiharjo RT 01/RW 01 Kode pos 55182	Org. informal	Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, entomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
9	Gentong Potters	Soboiman Gg. Kemuning no. 232 RT 06 / 29 Ngestiharjo 55182 Telp. 418261 Fax. 381217	Org. informal	Keramik
11	Komunitas Kethoprak Lesung Yogyakarta	Perum Sewon Indah C-17 Kode Pos 55188	Org. informal	Teater tradisional
12	KUA Etnika Komunitas Seni	Desa Kersa, Tirtanirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	Muasik tradisional dan kontemporer

No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
13	Lembaga Penelitian Seni Indonesia Yogyakarta	Jl. Parangtritis km 6,5 Telp. 379935 Fax. 371233	Lembaga	musik tradisional dan kontemporer, teater tradisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafis dan seni kriya
14	Lembaga Rumah Dongeng Indonesia	Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp. 387292	Yayasan	Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan maianan anak
15	Lembaga Studi Kajian Desain	Jl. Sonopakis Lor No. 15 Telp. 378276	Lembaga	Desain
16	Lembaga Studi Pengembangan Musik	Perumahan Sewon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp. 389522	Yayasan	musik klasik barat, musikologi
17	Ngudya Wirama Paguyuban	Gedongkuning RT 04 / 03 Kode Pos 55198	Org. informal	musik tradisional
18	Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	musik kontemporer dan klasik
19	Paguyuban Seni Kasanggit	Perum Perndowo Harjo Indah Jl. Nakula 14 Sewon	Org. informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisional
20	PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia)	Tirto Bangunjiwo Telp. 370542	Org. informal	seni kriya
21	Pardiman Acapella	Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	musik tradisional dan kontemporer
22	Petak Umpet Rancang Grafis	Sorowajan 316 RT 12 / 29 Panggunharjo	Org. informal	Desain, ilustrasi, animasi
23	Pracabaaan Ki Pudo	Gendeng RT 04 / 02 Bangunjiwo Kode Pos 55181	Org. informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, wayang kulit purwa
24	Sanggar Kereta	Jeblog Rt 01 / 06 Ds. III Tirtonirmolo Kode Pos 55181	Lembaga	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan
25	Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha	Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06 / 45 Sewon	Org. informal	musik tradisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomusikologi, etno tari
26	Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN Kasihan)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374627, 380720	Instansi Pemerintah	musik universal
27	SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencapaian Seni	Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Instansi Pemerintah	sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, estetika kritik seni
28	SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogyakarta)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374947	Lembaga	Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik
29	SMKN I Kasihan (SMKN Yogyakarta)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374467	Instansi Pemerintah	Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni
30	Studio ISI	Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6,5 Perum Puspa Indah Sito, 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380	Yayasan	teater tradisional dan kontemporer



No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
31	Study Sastar dan Teater Sila	Jotawang, Bangunharjo Sewon Kode Pos 55187 Telp. 387534	Lembaga	teater tradisional, kontemporer dan sastra
32	Teater Alam	Jl. Sawo No. 6 Perum Wirokerten Indah Telp. 377861	Org. informal	teater kontemporer
33	Teater Gandrik	Desa Kersa, Tirtonimolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	teater kointemporer
34	Teater Garasi Yogyakarta	Jl. Bugisan Selatan Tegal Kenongo RT 01/08 No. 36A Telp. 415844	Lembaga	teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropogi, gagasan teater
35	Teater Gema	STIE Kerjasama Jl. Parangtritis km 3,5	Lemabaga	musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer
36	Teater Pelopor	Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752	Org. Informal	Teter kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi
38	Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo	Kemabaran RT 04/21 No. 146 Tamantirto 55183 Telp. 376394	Yayasan	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni
39	Yayasan Peduli Tekstil Tradisional Indonesia (PETTRII)	Karangnongko RT 10/42 Panggungharjo Telp/fax 415177	Yayasan	seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional

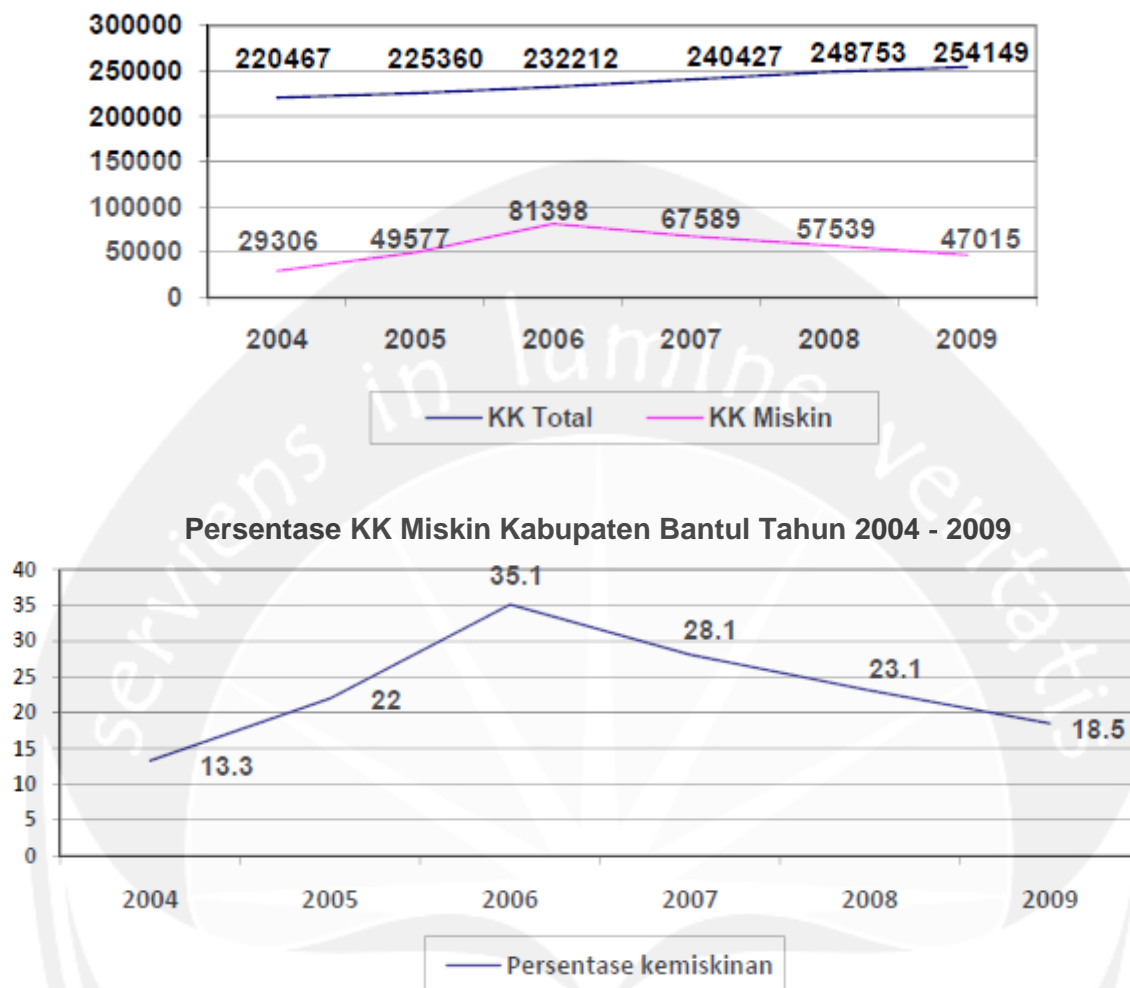
**Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010**

#### **5.2.10. Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat.

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin kecilnya jumlah prosentase Kepala Keluarga (KK) miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama yaitu pada tahap awal program ini dilakukan memang belum menunjukkan keberhasilan, sehingga pada tahun 2005 tercatat jumlah prosentase KK miskin justru mengalami peningkatan dari 13,29% (tahun 2004) menjadi 21,99% (tahun 2005), dan 35,05% pada tahun 2006, hal ini dikarenakan kejadian gempa 27 Mei 2006. Namun untuk tahun-tahun berikutnya prosentase KK miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 35,05% pada tahun 2006 menjadi 28,11% (tahun 2007), 23,13% (tahun 2008) dan 18,05% (tahun 2009).

**Gambar 6. Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2004 - 2009**



Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan adalah lemahnya data base tentang KK atau penduduk miskin itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya selisih jumlah KK miskin berdasar data dari BKK PP dan KB dengan data dari BPS. Hal ini bisa terjadi karena metode pengambilan data yang berbeda dan indikator tentang kemiskinan yang berbeda. Walau demikian data dari BKK PP KB dan data dari BPS jumlah KK dan penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami penurunan dibanding tahun 2008

**Tabel 5.59.**  
**Jumlah keluarga miskin Kab. Bantul tahun 2008-2009**

No.	Kecamatan	Data BPS		Data BKK	
		$\Sigma$ RTS 2008	$\Sigma$ RTS 2009	$\Sigma$ KKM 2008	$\Sigma$ KKM 2009
1	Kretek	1.416	1.510	1.842	1.600
2	Sanden	2.211	2.489	1.454	1.337
3	Srandakan	1.765	1.892	2.025	1.790
4	Pandak	3.260	3.363	3.376	3.224
5	Bambanglipuro	2.352	2.512	2.685	2.158
6	Pundong	2.069	2.162	2.834	1.725
7	Imogiri	3.443	3.637	4.734	3.408
8	Dlingo	2.433	2.615	3.411	2.595
9	Jetis	2.654	2.725	3.654	2.982
10	Bantul	2.912	3.082	3.747	3.132
11	Pajangan	1.791	1.929	2.183	1.886
12	Sedayu	2.705	2.786	2.984	2.604
13	Kasihan	4.292	4.437	4.845	4.427
14	Sewon	3.837	4.096	6.061	4.548
15	Piyungan	2.933	3.084	3.593	2.366
16	Pleret	2.860	2.933	2.838	2.270
17	Banguntapan	3.725	3.905	5.273	4.963
Jumlah		46.658	49.157	57.539	47.015

**Sumber: BPS dan BKK PP dan KB Bantul (tahun 2009)**

#### **5.2.11. Prasarana dan Sarana Daerah**

##### **5.2.11.1. Transportasi**

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bantul meliputi jaringan jalan, angkutan darat, dan terminal penumpang.

##### **1) Jaringan Jalan**

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Bantul lebih kurang 899,83 km meliputi 427 ruas, antara lain Jalan Klodran-Gose, Jalan Gose-Manding dan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2009, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 5.60.

**Tabel 5.60.**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009**

No	Jenis Permukaan	Kondisi (km)				Jumlah
		Mantap		Tidak Mantap		
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Aspal	314,21	252,52	25,85	18,60	611,18
2	Batu/Kerikil	1,70	28,65	41,80	16,10	88,25
3	Tanah	6,70	30,10	150,30	13,30	200,40
Panjang jalan						899,83

**Sumber: DPU kabupaten Bantul, 2010**

Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi, dengan panjang lebih kurang 130,506 km. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya.

Sedangkan panjang jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bantul lebih kurang 53,646 km antara lain Jalan Ring Road Selatan, Jalan Yogyakarta-Bantul, Jalan Yogyakarta-Batas Kulon Progo, dan lainnya. Berdasarkan pada fungsi jalan, jalan di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.

**a) Jalan Arteri Primer**

Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jaringan jalan arteri primer meliputi antara lain sebagian ruas jalan lingkaran (ring road) selatan, jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta), dan jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo.

**b) Jalan Kolektor Primer**

Jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan antara PKW dengan PKL. Jaringan jalan kolektor primer meliputi antara lain jalan Prambanan – Piyungan, jalan Yogyakarta – Piyungan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Palbapang – Barongan, jalan Sampakan – Singosaren, jalan Palbapang – Samas, jalan Srandakan – Kretek, jalan Klangon – Tempel, jalan Pemuda - jalan Kolonel Sugiyono - jalan Brigjen Katamso – jalan Panembahan Senopati, jalan Jodog – Srandakan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Bantul – Klodran – Gaten – Manding - Bakulan, jalan Bakulan - Kretek, jalan Kota Yogyakarta – Bakulan, jalan Kretek - Parangtritis, jalan Yogyakarta – Bibal jalan Imogiri – Dodogan, dan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS).

**c) Jalan Kolektor Sekunder**

Jalan kolektor sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi jalan Dawung – Makam Imogiri, dan jalan Rejowinangun – Ring Road Selatan.

d) Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi antara lain jalan Ganjuran – Paker, Panggang – Paker, Ngrowo – Samas, Ganjuran – Patalan, Bantul – Bejen, Sumberagung – Potrobayan, Pundong – Paker, Simpang Pundong – Potrobayan, Kretek – Depok, Jetis – Karang Semut.

e) Jalan Lingkungan

Jaringan jalan lingkungan berfungsi menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

## 2) Angkutan Darat Umum

Kondisi angkutan darat umum di Kabupaten Bantul saat ini kurang optimal. Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal yang dapat mengurangi beban lalu lintas masih sangat kurang, bahkan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Jumlah angkutan umum pada tahun 2007, 2008, dan 2009 semester I berturut-turut sebesar 168, 158, dan 125, atau mengalami penurunan rerata pertahun sebesar 16,36%. Data kendaraan angkutan umum (pedesaan/perbatasan) yang masih beroperasi disajikan pada Tabel 5.61.

**Tabel 5.61.**  
**Trayek Angkutan Umum (Pedesaan/Perbatasan) yang Masih Beroperasi**  
**Tahun 2007 – 2009**

Kelompok Kendaraan	Tahun					
	2007		2008		2009	
	Semester		Semester		Semester	
	I	II	I	II	I	II
Kopatek	30	30	30	21	28	28
RIAS	31	31	31	20	28	28
PPKS	18	17	18	12	15	15
PASA	8	6	7	4	5	6
PPAP	11	14	12	4	2	1
PPD	30	30	25	20	24	24
Mahardika	10	10	10	6	8	8
Karya Tamansari	28	24	23	16	15	14
Abadi	2	2	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>168</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>103</b>	<b>125</b>	<b>124</b>

**Sumber: Dinas Perhubungan, 2009**

Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya; kemudahan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul Tahun 2008 dan 2009 disajikan pada Tabel 5.62.

**Tabel 5.62.**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Kendaraan	Tahun	
		2008	2009
1	Roda 2	225,778	236,793
2	Roda 4	14,241	22,990
3	Roda 6	2,556	2,526
4	Diatas Roda 6		
<b>JUMLAH</b>		<b>242,575</b>	<b>262,309</b>

**Sumber: Dinas Perhubungan, 2009**

### 3) Terminal Penumpang

Terminal penumpang yang dibangun dan direncanakan di wilayah Kabupaten Bantul diarahkan untuk mendukung sistem jaringan jalan primer. Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (satu) tipe terminal penumpang, yaitu terminal penumpang tipe B. Terminal tipe B di wilayah Palbapang dan Imogiri. Sementara itu untuk melayani angkutan barang dan cargo, terminal barang di bangun di Argosari Sedayu dan Srimulyo Piyungan.

#### 5.2.11.2. Sumberdaya Air

Sumber daya air utama di Kabupaten Bantul terdapat di wilayah sungai Progo – Sungai Opak – Sungai Oya yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, Opak, dan Oya. Setiap DAS tersebut memiliki sub – DAS, luas, dan luas lahan diairi yang berbeda-beda.

**Tabel 5.63.**  
**Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009**

No	Nama DAS	Nama Sub-DAS	Luas (Ha)	Luas lahan yang diairi (Ha)
1	Oya	Oya	57,00	15,00
2	Opak	Kali Gawe	178,00	178,00
		Kali Buntung	108,18	119,70
		Kali Tepus	68,14	74,10
		Kali Kuning	141,11	132,10
		Kali Mruwe	642,51	653,90
		Kali Kedung Semerengan	278,25	382,60
		Kali Code	277,96	865,40
		Kali Gajah Wong	287,00	246,80
		Kali Winongo	910,58	2.110,50
		Kali Bulus	185,30	96,30
		Kali Belik	133,82	117,40
		Kali Plihan	97,58	97,34
3	Progo	Kali Bedog	1.454,40	1.528,44
<b>JUMLAH</b>		<b>14 Sub DAS</b>	<b>4.819,83</b>	<b>6.617,58</b>

**Sumber: Dinas SDA Kabupaten Bantul, 2010**

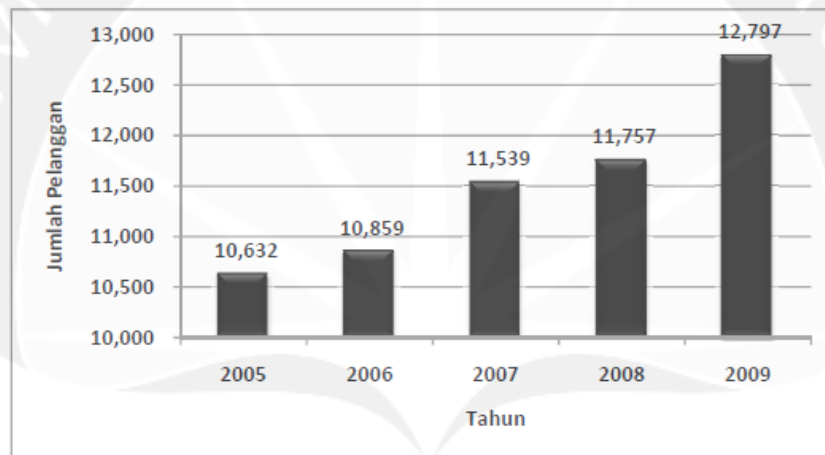


Sampai saat ini sumber daya air tersebut diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi. Saat ini, telah dibangun sebanyak 195 Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 9 DI teknis, 113 DI semi teknis, dan 73 DI sederhana yang tercakup dalam 5 wilayah UPT Pengamatan Pengairan. Nama DAS, luas, serta luas lahan yang diairi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.65.

### 5.2.11.3. Air Minum/Air Bersih

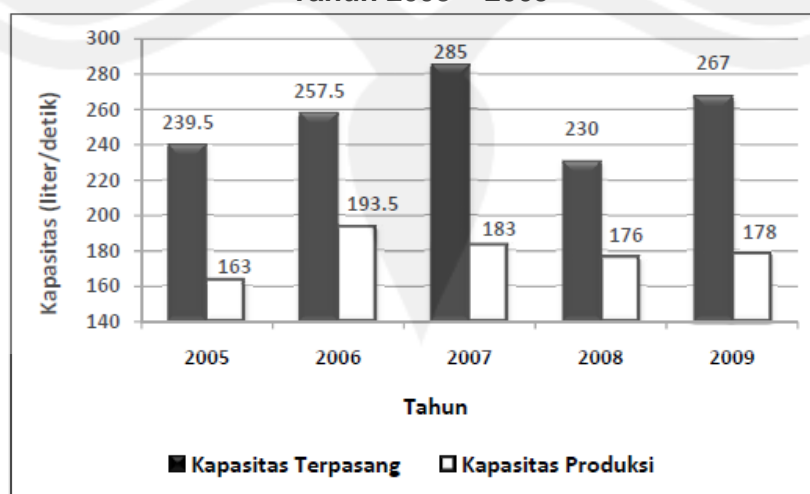
Penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 disajikan masing – masing pada Gambar 7 dan Gambar 8.

**Gambar 7. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009**



Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010

**Gambar 8. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009**



Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)

Perbedaan kapasitas terpasang dan kapasitas produksi (Gambar 8) menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih belum dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih pada tahun 2009 sebesar 267 liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 178 liter/detik. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air sebesar 87 liter/detik (33,33% dari jumlah yang tersedia) belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM pada tahun 2009 untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 5.64.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang belum terjangkau oleh layanan PDAM, yaitu Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, dan Pleret. Namun, Untuk penanganan di lokasi yang belum terjangkau jaringan PDAM dan daerahrawan kekeringan, selama 5 tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.

**Tabel 5.64.**  
**Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2009**

No	Kecamatan	Jenis Sumber	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)
1	Srandakan	Sumur dangkal	10	7
2	Sanden	-	0	0
3	Kretek	-	0	0
4	Pundong	-	0	0
5	Bambanglipuro	-	0	0
6	Pandak	Sumur Dalam	10	5
7	Bantul	Sumur Dangkal	30	20
8	Jetis	Sumur Dangkal	10	7
9	Imogiri	Sumur Dalam	20	7
10	Dlingo	Mata Air& Air Permukaan Sungai	30	19
11	Pleret	Sumur Dalam	0	0
12	Piyungan	Sumur Dangkal	10	3
13	Banguntapan	Sumur Dalam	10	7
14	Sewon	Sumur Dalam	10	10
15	Kasih	Sumur Dangkal	62	47
16	Pajangan	Sumur Dalam	35	26
17	Sedayu	Air Permukaan Sungai	30	20
<b>JUMLAH</b>			<b>267</b>	<b>178</b>

**Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2011**

#### 5.2.11.4. Air Limbah/Sanitasi

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on*



*site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Adapun jumlah air limbah yang dihasilkan adalah sekitar 80 – 90% dari jumlah penggunaan air domestik.

Sumber air limbah di Kabupaten Bantul juga berasal dari fasilitas umum dan industri. Pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Bantul di beberapa usaha industri sudah dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran ini tentu saja perlu penanganan lebih lanjut termasuk juga pada limbah domestik dan *home industry*. Penetapan baku mutu dan pengelolaan, serta pengolahan air limbah sebelum dibuang merupakan alternatif terbaik yang menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Di Kabupaten Bantul terdapat pula industri-industri skala kecil, menengah dan skala besar yang dipertahankan sebagai salah satu sektor penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Untuk itu selain pengolahan limbah sebelum dibuang, penyiapan jaringan limbah yang terencana perlu dilakukan terutama pada daerah-daerah yang dialokasikan sebagai wilayah industri. Beberapa upaya pengelolaan limbah berikut jenis usaha tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.65.**  
**Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008**

No	Jenis Usaha	Nama Usaha	Alamat	Sentra	Non Sentra	Kapasitas Rata-rata per Hari	Volume		Upaya Penanganan		Upaya Penanganan Air Limbah				
							Air Limbah Rata-rata/Unit Usaha	Limbah Padat Rata-rata/Unit Usaha	Limbah Padat		IPAL		Bak Pengendap	Penanganan Lainnya	Tanpa Penanganan
									Dibuang Langsung	Dimanfaatkan	Individual	Komunal			
1	Elektroplating	-	Jagalan, Banguntapan, Singosaren,	12		50 pcs/hari	25	0.5 ons/bulan	√				√ (10 unit)		√ (2 unit)
			Banguntapan, Pringgolayan	10		30 pcs/hari	30	0.3 ons/bulan	√				√ (6 unit)		√ (4 unit)
				14		20 pcs/hari	20	0.2 ons/bulan	√				√ (10 unit)	√ (10 unit)	√ (4 unit)
2	Tekstil (ATBM)	Kurnia (ATBM)	Krapyak Wetan, Panggunharjo, Sewon		1	20 lb/hari	1 m3/hari						√		
		Padi Subur	Jln. Wates, Km 13,5 Sedayu, Argosari, Sedayu		1	40 lb/hari	2 m3/hari						√		
					11	10 lb/hari	0,5 m3/hari						√ (5 unit)		√ (6 unit)
3	Batik		Wijirejo, Pandak, Bantul		4	12 lb/hari	1 m3/hari						√		
4	Tapioka		Nangsri, Srihardono, Pundong	22		1 kwt/hari	150	30		Pakan ternak		√ (5 unit)			√ (7 unit)
			Sayegan, Srihardono, Pundong	14		2 kwt/hari	300	60		Pakan ternak			√ (10 unit)		√ (4 unit)
5	Tahu	Bu Hari	Greso, Trimurti, Srandakan		1	6 kwt/hari	400	120		Pakan ternak	√				
		KSM Sumber Rejeki	Greso, Trimurti, Srandakan	13		1 kwt/hari	1000	20		Pakan ternak					
		KSM Ngudi Lestari	Gunungsaren, Trimurti, Srandakan	54		1 kwt/hari	1000	20		Pakan ternak		√ (5 unit)			√ (54 unit)
			Poncosari, Srandakan		20	1 kwt/hari	1000	15		Pakan ternak			√ (14 unit)		√ (6 unit)
			Ngoto, Bangunharjo, Sewon	17		75 kg/hari	750	15		Pakan ternak			√ (komunal)		
			Bogoran, Trirenggo, Bantul	15		75 kg/hari	750	15		Pakan ternak			√		
			Baturetno, Banguntapan		10	75 kg/hari	750	15		Pakan ternak			√ (7 unit)		√ (3 unit)
			Panggunharjo, Sewon		3	1,5 kwt/hari	1500	30		Pakan ternak			√ (1 unit)		√ (2 unit)
6	Tempe		Pendowoharjo, Sewon		25	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak			√ (10 unit)		√ (15 unit)
			Panggunharjo, Sewon		16	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak			√ (6 unit)		√ (10 unit)
			Poncosari, Srandakan		34	60 kg/hari	900	6		Pakan ternak			√ (16 unit)		√ (18 unit)
			Canden, Jetis		19	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak			√ (10 unit)		√ (9 unit)
7	Krecek		Segoroyoso, Pleret	35		40 kg/hari	1000	0,4	√				√ (20 unit)		√ (15 unit)

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010

**Tabel 5.66.**  
**Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008**

No	Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas Produksi	Volume Limbah	Keterangan
1	TPA – Piyungan	Pembuangan akhir sampah	150 m3/hari		Saluran irigasi S. Opak
2	IPAL – Sewon	Instalasi pengolahan limbah RT	15.500 m3/hari	9.000 m3/hari	S. Bedog
3	PT. Komitrando	Pelapisan logam/electroplating	10.000 pcs/hari	2 m3/hari	Saluran irigasi
4	PT. Samitex	Industri tekstil	27.811.800 m/tahun	160 - 180 m3/hari	S. Winongo
5	PG. Madukismo	Industri gula tebu	500.000 - 600.000 ton/tahun	2 - 5 m3/jam	S. Winongo Kecil
6	PS. Madukismo	Industri alkohol/spiritus	24.000 l/hari	5 - 7 m3/jam	S. Bedog
7	PT. Bintang Alam Semesta	Penyamaan kulit	1.000 - 2.000 lmb/hari	200 - 260 m3/bulan	S. Opak
8	PT. Adi Satria Abadi	Penyamaan kulit	500.000 feet/bulan	250 m3/hari	S. Opak
9	PT. Fajar Makmur	Penyamaan kulit			Saluran irigasi
10	PT. Digitone	Industri tinta			Saluran irigasi
11	PT. Pertamina UP IV	Depot BBM			
12	KRT. Daud Wiryo Hadinagoro	Batik	20 lmb/bulan		Disedot
13	Batik Indah Roro Jonggrang	Batik			
14	PT. Indo Hanzel Perkasa	Gas Asitelin	576.000 kg/tahun	282,6 m3/bulan	S. Semampir
15	Balai Besar Kulit Karet dan Plastik	Laboratorium dan Pelayanan Jasa Penyamaan Kulit			S. Opak
16	PS. Panembahan Senopati	Rumah Sakit	160 tempat tidur	40 m3/hari	Saluran drainase
17	RS. PKU Muhamadiyah	Rumah Sakit	108 tempat tidur	580 m3/bulan	S. Winongo Kecil
18	PT. Indokor Daya Mina	Cold Storage			S. Gadjahwong
19	PT. Indokor Bangun Desa	Tambak udang	7,2 ton/tahun		Pantai Pandansimo
20	RS. Rajawali Citra	Rumah Sakit	50 tempat tidur		Saluran irigasi
21	RS. Permata Husada	Rumah Sakit	30 tempat tidur		Saluran irigasi
22	RSKIA. Ummi Khasanah	Rumah Sakit	2 orang/hari		Saluran irigasi

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010

Jenis dan jumlah usaha industri sebagaimana yang disajikan pada Tabel 5.65, dimungkinkan banyak mengalami perubahan dalam hal jumlah maupun variasi jenis produksinya, namun hal ini terbatas pada pendataannya karena sebagian besar industri yang baru tumbuh bersifat *home industry* dan belum terkontrol oleh pemerintah daerah. Selain itu juga aspek regularitas masih belum mampu menunjukkan posisi dan kemapanaan jenis usaha yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana sanitasi rumah tangga berhubungan erat dengan kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Bantul serta menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan arti pentingnya kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Ketersediaan kebutuhan sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada jumlah/kuantitas dari sarana jamban keluarga/rumah tangga yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.67.**  
**Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Ketersediaan Jamban						Jumlah
		M		K		H		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	KK
1	Srandakan	847	9,59	1.859	21,05	4.242	48,02	8.833
2	Sanden	509	4,92	1.384	13,38	6.260	60,51	10.345
3	Kretek	1.126	13,86	1.856	22,84	4.514	55,54	8.127
4	Pundong	1.606	21,75	2.301	31,16	2.888	39,11	7.385
5	Bambanglipuro	887	7,85	1.447	12,81	8.548	75,68	11.295
6	Pandak	1.269	9,98	4.624	36,35	5.821	45,76	12.721
7	Bantul	2.071	13,25	1.547	9,90	10.157	65,00	15.627
8	Jetis	3.710	23,24	4.433	27,77	5.270	33,01	15.965
9	Imogiri	3.693	22,54	2.054	12,54	7.486	45,69	16.384
10	Dlingo	805	8,10	5.417	54,51	3.353	33,74	9.937
11	Pleret	3.795	29,41	1.233	9,56	4.878	37,81	12.902
12	Piyungan	4.198	34,92	625	5,20	8.263	68,73	12.022
13	Banguntapan	2.481	10,88	3.945	17,30	15.302	67,12	22.798
14	Sewon	1.848	6,94	604	2,27	19.355	72,69	26.626
15	Kasihan	1.948	7,97	1.085	4,44	14.173	57,96	24.454
16	Pajangan	1.377	17,58	1.791	22,86	4.171	53,25	7.833
17	Sedayu	2.412	24,04	1.456	14,51	6.726	67,05	10.032
Jumlah/Rata-rata		34.582	15,70	37.661	18,73	131.407	54,51	233.286

**Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2008**

Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa kondisi sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul berdasarkan perbandingan jumlah dan kualitas kelayakan sarana sanitasi jamban keluarga, dalam 'kategori cukup' memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini didasarkan bahwa prosentase rata-rata sarana

jamban keluarga yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 15,70% dari keseluruhan jumlah KK pada tiap kecamatan; prosentase jumlah yang kurang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 18,73% dan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 54,51%. Selebihnya dari perhitungan dan pendataan tersebut diasumsikan belum memiliki jamban keluarga sendiri ataupun satu jenis sarana jamban digunakan untuk kebutuhan bersama-sama.

Kecamatan Piyungan merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kondisi sarana jamban tidak layak (tidak memenuhi standar kesehatan) paling banyak, yaitu sejumlah 4.198 buah; sedangkan jumlah yang paling sedikit dimiliki oleh keluarga di wilayah Kecamatan Sanden dengan 509 buah. Demikian juga halnya dengan perhitungan persentasenya terhadap jumlah KK pada wilayah kecamatan yang bersangkutan, tampak kecenderungan dan posisi yang sama, yaitu Kecamatan Piyungan mempunyai prosentase jumlah jamban yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar terbesar (34,92%) dan Kecamatan Sanden 4,92% (terkecil).

#### **5.2.12. Perumahan dan Permukiman**

Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon dan pada akhir tahun 2010 akan dibangun di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan. Sampai dengan tahun 2009 telah dibangun sebanyak dua *twin blok* (TB) atau sebanyak 196 unit. Rusunawa tersebut mulai dioperasikan pada akhir tahun 2009 dengan tingkat hunian telah mencapai 50%. Bangunan Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul yang berpenghasilan rendah (MBR) terutama yang tinggal di kawasan kumuh.

Selain itu dilaksanakan program Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) sebanyak 300 unit bagi keluarga miskin. Program tersebut merupakan arisan rumah yang dipergunakan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru serta perbaikan lingkungan permukiman. Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Bantul disalurkan oleh tiga Lembaga Keuangan Mikro (koperasi/BMT) yang terseleksi dan memiliki kinerja baik.

Untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata pasca bencana gempa bumi yang berbasis pengurangan risiko bencana, maka disusun dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) di seluruh desa di Kabupaten Bantul

secara bertahap. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2010 semua desa telah memiliki dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP).

#### **5.2.13. Listrik**

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%. Namun demikian berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencapai 100% khususnya di dusun yang terletak di lokasi terpencil. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan mengembangkan jaringan listrik dan inovasi sumber energi yang lain yaitu energi angin, energi surya, energi ombak, dan mikro hidro. Pada tahun 2009 jumlah sambungan listrik terpasang di seluruh Kabupaten Bantul sebanyak 137.215 sambungan.

#### **5.2.14. Komunikasi dan Informasi**

Sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul menindaklanjuti dan menjalankan Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika. Beberapa sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis IPTEK adalah:

- 1) *Pemanfaatan Media Telematika*, seperti: SMS Center, Website daerah ([www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)), Website tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida).
- 2) *Pemanfaatan Media Elektronik*, seperti: Siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari), dialog interaktif di Radio RRI dan Radio Bantul FM.
- 3) *Pemanfaatan Media Cetak*, seperti: Jurnal Riset Daerah, Bulletin serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap SKPD.

Selain itu, Kabupaten Bantul telah menerapkan pengembangan jaringan. Jumlah koneksi jaringan internet di seluruh bagian Pemerintah Kabupaten Bantul adalah :

- DPRD dan Sekretariat DPRD (2 jaringan/koneksi),
- Inspektorat (1 jaringan/koneksi),
- Bagian pemda (13 jaringan/koneksi),
- Dinas/SKPD (16 jaringan/koneksi),
- Badan (4 jaringan/koneksi),

- Kantor (8 jaringan/koneksi), dan
- Kecamatan (17 jaringan/koneksi).

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh instansi pemerintah telah terhubung dengan koneksi internet.



### **5.3. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Bantul**

Kemiskinan di Kabupaten Bantul hampir merata di semua kecamatan (Bappeda Bantul, 2010). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul mempunyai jumlah keluarga miskin di atas 18,50 persen. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan relatif tinggi (berdasarkan hasil evaluasi indikator kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2010). Masyarakat miskin dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya keluarga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan pekerjaan, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, serta ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk pertanian yang dihasilkan.

Wilayah Bantul dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Sistem irigasi teknis berjalan secara optimal pada lahan-lahan pertanian. Luas pertanian beririgasi teknis mencapai 13,885 ha. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Bantul mengembangkan tanaman padi sawah, palawija, jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, cabai, terung, dan lain sebagainya. Komoditas pertanian menjadi komoditas unggulan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tahun 2008 tercatat sumbangan sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bantul mencapai 24,3 persen. Namun sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Bantul hidupnya bergantung pada sektor pertanian.

Sementara itu, masyarakat miskin di kawasan pesisir menghadapi permasalahan khusus. Penduduk di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap pengrusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil dengan peralatan yang sederhana, sebagai buruh nelayan, pengolah, dan pedagang ikan skala kecil karena memiliki kemampuan investasi yang kecil pula. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumber daya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan nelayan pendatang dari daerah lain yang umumnya lebih berpengalaman. Selain itu, masyarakat miskin di kawasan pesisir juga berhadapan dengan permasalahan ketergantungan dengan kegiatan pariwisata. Pada musim-musim tertentu kegiatan pariwisata cukup ramai sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di kawasan pesisir.



**Tabel 5.68.**  
**Dentitas/Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul 2009**  
**Jumlah KK dan Jiwa Kepala Keluarga Miskin 2009**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
1.	Kretek	1600	4603
2.	Sanden	1337	3846
3.	Srandakan	1790	5820
4.	Pandak	3224	10480
5.	Bambanglipuro	2158	6933
6.	Pundong	1725	5333
7.	Imogiri	3408	10411
8.	Dlingo	2995	8610
9.	Jetis	2982	8144
10.	Bantul	3132	9840
11.	Pajangan	1886	5980
12.	Sedayu	2604	9739
13.	Kasihan	4427	16020
14.	Sewon	4548	14074
15.	Piyungan	2366	6516
16.	Pleret	2270	6789
17.	Banguntapan	4963	16021
<b>Jumlah</b>		<b>47015</b>	<b>149159</b>

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul, 2009  
(Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per  
Desember 2009  
Kabupaten Bantul)

**Kemiskinan di Kabupaten Bantul berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2010, ditemukan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga tamat pendidikan dasar (39,6 persen), sedangkan yang tidak pernah sekolah sebanyak 37,3 persen. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka terserap pada sektor informal,**

**dengan penghasilan yang tidak menentu. Pada akhirnya situasi seperti ini membuat keluarga sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih.**

**Sektor informal utama yang menjadi tumpuan keluarga miskin di Kabupaten Bantul meliputi kegiatan di sektor pertanian, bangunan, industri kecil, perdagangan, kerajinan rumah tangga, dan sektor lainnya. Di sektor pertanian, keluarga miskin ditemukan bekerja sebagai buruh musiman. Umumnya kegiatan ini dilakukan bersama-sama antara kepala rumah tangga, istri, dan anak pada satu lokasi lahan pertanian yang sama, tetapi ada pembagian kerja di antara mereka.**

**Pada musim *bero* (menunggu masa panen), keluarga miskin bekerja pada sektor nonpertanian. Kepala keluarga cenderung bekerja sebagai buruh bangunan yang umumnya berada di luar wilayah tempat tinggalnya. Tidak jarang mereka harus tinggal pada bangunan semipermanen yang sengaja didirikan di sekitar lokasi proyek bangunan. Sementara itu, istri melakukan kegiatan ekonomi produktif sebagai buruh cuci, seterika, atau menggembala ternak di sekitar tempat tinggalnya. Secara keseluruhan tahun 2009 tercatat 15,60 persen KK miskin bekerja sebagai buruh tani, 12,02 persen buruh bangunan, 0,81 persen buruh nelayan, 26,69 persen**

buruh lainnya, 3,46 persen pedagang keliling, 3,45 persen petani, dan 9,30 persen mempunyai pekerjaan lain. Sementara itu, kepala rumah tangga yang tidak bekerja jumlahnya cukup besar yaitu mencapai 25,55 persen.

**Tabel 5.69.**  
**Pendidikan Kepala Keluarga**

No	Kecamatan	Tidak Sekolah	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT	Jumlah KK Miskin
1.	Kretek	40,0	30,3	18,9	10,7	0,1	1600
2.	Sanden	31,0	40,8	15,0	13,0	0,2	1337
3.	Srandakan	33,8	41,6	14,9	9,2	0,6	1790
4.	Pandak	37,2	43,6	11,5	7,2	0,0	3224
5.	Bambanglipuro	38,5	36,5	16,2	8,4	0,4	2158
6.	Pundong	39,4	40,7	13,2	6,3	0,3	1725
7.	Imogiri	45,7	39,3	9,8	5,1	0,1	3408
8.	Dlingo	40,6	42,2	13,8	3,4	0,0	2995
9.	Jetis	45,4	37,3	10,6	6,4	0,4	2982
10.	Bantul	31,6	41,8	16,1	9,6	0,9	3132
11.	Pajangan	42,6	39,7	12,2	5,1	0,3	1886
12.	Sedayu	37,7	36,0	14,9	11,3	0,0	2604
13.	Kasihan	38,5	34,4	14,8	12,1	0,2	4427
14.	Sewon	32,3	43,4	15,9	8,2	0,1	4548
15.	Piyungan	48,1	28,7	15,2	8,0	0,0	2366
16.	Pleret	43,2	38,4	12,2	6,1	0,1	2270
17.	Banguntapan	23,2	47,3	19,1	10,4	0,0	4963
<b>Total</b>		<b>37,3</b>	<b>39,6</b>	<b>14,5</b>	<b>8,4</b>	<b>0,2</b>	<b>47015</b>

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul, 2009  
(Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009 Kabupaten Bantul)

Kemiskinan yang dialami keluarga di Kabupaten Bantul menyebabkan rendahnya kemampuan untuk mengakses fasilitas pendidikan bagi putra-putrinya. Data tahun 2009 menyebutkan 56 persen keluarga miskin hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan dasar. Sementara itu, di tingkat kecamatan, tercatat lebih dari separuh keluarga miskin (pada tiap-tiap kecamatan) yang anak-anaknya menyelesaikan pendidikan tingkat lanjutan pertama (SMP), 15,15 persen tamat SMA, dan sisanya 1,79 persen tidak sekolah. Kondisi ini menjadi tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul karena meskipun program bantuan pendidikan digulirkan, masih

ditemukan anak-anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah ataupun tidak melakukan pendidikan ke tingkat lanjut (SMP).

#### 5.4. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya tidak semata disebabkan oleh masalah-masalah internal orang miskin, seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar (misalnya di bidang pendidikan atau kesehatan), budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan, atau rendahnya kemampuan orang miskin dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan faktor-faktor eksternal seperti berikut :

- a. Rendahnya akses terhadap sumber daya dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), atau berada di daerah terpencil
- b. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat yang antara lain disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung
- c. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*)
- d. Konflik-konflik sosial dan politik
- e. Bencana alam, seperti longsor dan gempa bumi
- f. Kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, serta eksternal lainnya yang dapat menjadi determinan dari proses kemiskinan.

Tabel 5.70.

Persentase Keluarga Miskin karena Aspek Pangan, Sandang, dan Papan

No	Kecamatan	Aspek Pangan	Aspek Sandang	Aspek Papan	Jumlah KK
1.	Kretek	0,56	64,0	50,31	1600
2.	Sanden	6,96	75,1	75,8	1337
3.	Srandakan	31,6	72,3	55,0	1790
4.	Pandak	2,64	32,6	47,2	3224
5.	Bambanglipuro	2,69	18,0	88,1	2158
6.	Pundong	51,4	64,8	55,8	1725
7.	Imogiri	5,31	59,1	86,9	3408
8.	Dlingo	0,81	82,9	93,3	2995

9.	Jetis	42,8	66,9	51,8	2982
10.	Bantul	20,3	61,3	52,1	3132
11.	Pajangan	7,53	41,7	86,7	1886
12.	Sedayu	1,23	0,65	59,9	2604
13.	Kasihan	10,8	25,6	45,0	4427
14.	Sewon	4,71	58,5	36,1	4548
15.	Piyungan	1,35	54,3	46,1	2366
16.	Pleret	23,9	70,5	55,6	2270
17.	Banguntapan	13,1	16,8	27,6	4963
Total		12,7	46,6	56,0	47015

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul, 2009

(Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009 Kabupaten Bantul)

**Kemiskinan di Kabupaten Bantul sendiri disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu pangan, sandang, papan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan asset. Tabel 5.70. menunjukkan persentase keluarga miskin karena aspek pangan, yang tertinggi adalah di Kecamatan Pundong sebesar 51,4 persen dan terendah di Kecamatan Kretek sebesar 0,56 persen. Sedangkan persentase keluarga miskin karena aspek sandang tertinggi adalah Kecamatan Sanden sebesar 75,1 persen dan terendah di Kecamatan Sedayu sebesar 0,65 persen. Kemiskinan karena aspek papan tertinggi di Kecamatan Dlingo, yaitu sebesar 93,3 persen dan terendah di Kecamatan Banguntapan sebesar 27,6 persen. Di antara ketiga kategori penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bantul, maka aspek papan menjadi penyebab utama seseorang menjadi miskin.**

**Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup sehat, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan memperoleh penghargaan, serta lain sebagainya. Dari tabel 5.71. dapat dilihat bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin di Kabupaten Bantul tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik, padahal kondisi kesehatan merupakan aspek yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.**

**Keluarga miskin di Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan adalah Kecamatan Piyungan. Selanjutnya Kecamatan Kretek merupakan kecamatan dengan persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan paling tinggi, yaitu sebesar 18,0 persen dibandingkan dengan kecamatan lain. Keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik dengan baik adalah Kecamatan Banguntapan dan Srandakan masing-masing**

sebesar 33,41 persen dan 19,61 persen. Selain itu, seluruh keluarga miskin di Kecamatan Bambanglipuro tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan serta keluarga miskin di Kecamatan Sedayu tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan adanya keluarga miskin yang belum terjangkau oleh program pelayanan kesehatan gratis. Program pemerintah di bidang kesehatan berupa fasilitas kesehatan perlu diarahkan terutama kepada mereka yang kurang mampu.

**Tabel 5.71.**  
**Kemampuan Keluarga Miskin dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Pendidikan, Air Bersih, dan Listrik**

No	Kecamatan	Kesehatan	Pendidikan	Air Bersih	Listrik	Jumlah KK
1.	Kretek	56,13	18,0	17,2	13,2	1600
2.	Sanden	3,44	0,97	15,11	19,22	1337
3.	Srandakan	19,72	8,72	11,23	19,61	1790
4.	Pandak	61,48	6,36	8,41	11,48	3224
5.	Bambanglipuro	0,00	0,00	29,89	19,28	2158
6.	Pundong	24,00	16,52	7,59	12,93	1725
7.	Imogiri	14,17	7,92	41,17	15,90	3408
8.	Dlingo	14,18	12,56	17,53	13,06	2995
9.	Jetis	49,63	5,20	22,50	12,94	2982
10.	Bantul	29,41	12,90	23,44	9,80	3132
11.	Pajangan	34,78	2,39	13,04	6,95	1886
12.	Sedayu	0,00	1,38	4,65	4,61	2604
13.	Kasihan	37,68	1,04	4,18	2,35	4427
14.	Sewon	43,01	1,17	12,20	6,00	4548
15.	Piyungan	93,79	1,48	3,72	3,47	2366
16.	Pleret	45,33	5,77	11,72	6,48	2270
17.	Banguntapan	82,73	5,28	33,41	1,75	4963
<b>Total</b>		<b>39,52</b>	<b>5,76</b>	<b>17,24</b>	<b>9,24</b>	<b>47015</b>

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul, 2009  
(Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009 Kabupaten Bantul)

Salah satu variabel penting untuk menilai kemiskinan adalah kepemilikan asset. Aset di sini adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang berupa uang, emas, barang elektronik,

kendaraan bermotor/tidak bermotor, dan lain-lainnya. Berkenaan dengan masalah kepemilikan aset ini, masyarakat miskin tergolong kelompok yang tingkat kepemilikan asetnya rendah dibandingkan kelompok tidak miskin. Jumlah aset keluarga miskin di Kabupaten Bantul bervariasi menurut kecamatan.

Perbedaan kepemilikan aset tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi perekonomian wilayah dan masyarakat. Jumlah kepemilikan kekayaan keluarga miskin di Kecamatan Srandakan adalah yang paling besar dibandingkan dengan jumlah kepemilikan harta kekayaan keluarga miskin di kecamatan lainnya. Namun di kecamatan ini cukup banyak keluarga miskin yang menempati tanah dan bangunan bukan milik sendiri. Selanjutnya jumlah kekayaan keluarga miskin yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sedayu. Namun jumlah keluarga miskin yang tidak mempunyai tanah dan bangunan sendiri justru lebih sedikit dibandingkan dengan di Kecamatan Srandakan.

**Tabel 5.72.**  
**Persentase Keluarga Miskin menurut Kepemilikan Aset**

No	Kecamatan	Jumlah kekayaan < Rp. 2,5 juta	Tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri	Jumlah KK Miskin
1.	Kretek	93,00	28,13	1600
2.	Sanden	99,10	57,52	1337
3.	Srandakan	101,40	52,07	1790
4.	Pandak	93,46	16,44	3224
5.	Bambanglipuro	98,84	60,06	2158
6.	Pundong	96,58	31,42	1725
7.	Imogiri	91,87	21,54	3408
8.	Dlingo	99,11	14,61	2995
9.	Jetis	93,56	16,83	2982
10.	Bantul	96,90	52,78	3132
11.	Pajangan	95,12	29,96	1886
12.	Sedayu	78,57	47,62	2604
13.	Kasihan	84,66	42,01	4427
14.	Sewon	95,80	33,95	4548
15.	Piyungan	95,82	19,32	2366
16.	Pleret	90,62	18,63	2270
17.	Banguntapan	96,74	37,26	4963
<b>Total</b>		<b>93,67</b>	<b>33,45</b>	<b>47015</b>

Sumber : TKPK Kabupaten Bantul, 2009

(Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009  
Kabupaten Bantul)

**Berdasarkan data-data kemiskinan yang telah diuraikan di atas, nampak bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul masih cukup banyak. Untuk itu dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bantul, selanjutnya dilakukan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, salah satu program pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.**

#### **5.5. Partisipasi Perempuan Pada Setiap Tahapan Pelaksanaan Program Serta Alasan yang Mendasarinya untuk Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Deskripsi mengenai partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program dan alasan yang mendasarinya untuk terlibat dalam pelaksanaan program tidak dapat dilepaskan dengan proses pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankannya. Oleh karenanya, guna mempermudah deskripsi fokus tersebut akan diawali dengan proses pelaksanaan program dari awal hingga kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat selesai dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

##### **5.5.1. Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemilihan Anggota Kelompok/Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa**

Proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul diawali dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di masing-masing Balai Desa.



Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh fasilitator desa, perangkat/aparat desa, perwakilan LKMD dan BPD, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta wakil dari organisasi perempuan.

Berdasarkan penjelasan Ketua BPD dan salah seorang tokoh perempuan desa yang hadir dalam kegiatan tersebut, dari peserta yang hadir hampir separuhnya adalah perempuan. Kehadiran kelompok perempuan dengan jumlah yang relatif banyak tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketentuan program yang menghendaki keterlibatan perempuan sejak awal program. Prinsip atau nilai tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga jumlah perempuan yang hadir relatif banyak bila dibandingkan dengan kegiatan sosialisasi program pada umumnya.

**Satu nilai penting yang dijelaskan dalam sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat ini adalah nilai pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin. Nilai atau prinsip program tersebut dijelaskan dalam kaitannya dengan tugas serta peran semua pihak yang terlibat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut.**

**Pada kegiatan sosialisasi tersebut, juga dijelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan agar Program Pemberdayaan Masyarakat dan nilai yang dikandungnya dapat dilaksanakan. Adapun persiapan-persiapan yang dimaksud adalah setiap Rukun Tetangga (RT) diharapkan mengusulkan 2 anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota Kelompok/Tim pelaksana kegiatan Program, mempelajari mekanisme pengusulan kegiatan/proyek.; Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Ketua RT/RW, dan Ketua PKK**

**Induk/Kelompok melanjutkan sosialisasi program kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan formal maupun informal; dan masyarakat diharapkan mempersiapkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kelancaran kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.**

Setelah penjelasan Program Pemberdayaan Masyarakat kepada peserta sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok/Tim Inti. Kelompok/Tim Inti adalah sekumpulan warga desa, maksimal 15 orang, yang dipilih untuk mewakili kelompok warga miskin di desa/kelurahan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta operasi dan pemeliharaan proyek pembangunan prasarana Program Pemberdayaan Masyarakat. Adapun ketentuan keanggotaan Kelompok/Tim Inti adalah jumlah maksimal anggota, komposisi anggota terdiri dari separuh laki-laki dan separuh perempuan, melibatkan masyarakat miskin, dan bukan pegawai negeri sipil maupun aparat desa.

#### **5.5.2. Pembekalan dan Survai Oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat**

Tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya setelah sosialisasi dan pembentukan Tim adalah pembekalan kepada tim pelaksana tersebut. Materi pembekalan meliputi langkah-langkah dan cara-cara pelaksanaan program yang dikoordinir oleh Tim pelaksana dengan dibantu oleh aparat pemerintah desa serta anggota LKMD dan BPD.

**Kegiatan awal setelah Tim memperoleh pembekalan adalah melakukan survai atau mengunjungi masyarakat di masing-masing desa. Melalui kegiatan survai tersebut diharapkan akan dapat diperoleh masukan yang berupa usulan masalah dan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Sebelum melaksanakan survai, seluruh tim dan**

**fasilitator membahas dan menentukan wilayah-wilayah desa yang akan dikunjungi.**

**Salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan wilayah yang akan dikunjungi adalah banyaknya masyarakat miskin dan perempuan yang tinggal di suatu wilayah. Penentuan atas kriteria tersebut adalah berdasarkan prinsip atau nilai Program Pemberdayaan Masyarakat yakni pemberdayaan keluarga miskin dan perempuan sehingga kelompok tersebut harus mendapatkan manfaat pertama dan utama.**

**Satu catatan positif dari proses penentuan wilayah yang akan adalah penentuan tersebut juga berdasarkan masukan masyarakat, terutama menyangkut keadaan atau taraf hidup masyarakat desa. Masukan-masukan tersebut kemudian dibahas oleh tim, termasuk perwakilan perempuan yang memberikan pendapat ataupun usulannya berkaitan dengan pendapat masyarakat. Dengan demikian kriteria-kriteria penentuan masyarakat miskin tersebut merupakan kesepakatan bersama antara tim, fasilitator, dan masyarakat.**

**Kriteria masyarakat miskin yang kemudian digunakan tim adalah berdasarkan besarnya penghasilan, kondisi rumah, jumlah dan luas lahan pertanian, kendaraan yang dimiliki, serta pendidikan formal anggota masyarakat. Berdasarkan**

**kriteria tersebut, masyarakat dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, sebagai berikut:**

**Tabel 5.73.**

**Pengelompokkan Masyarakat Berdasarkan Kriteria yang Dirumuskan Tim, Fasilitator, dan Masukan Masyarakat**

No	Kriteria	Kelompok		
		Miskin	Menengah	Kaya
1.	<b>Penghasilan (Rp/hari)</b>	<b>2500 - 3000</b>	<b>&gt;3000 - 10000</b>	<b>&gt; 10000</b>
2.	<b>Kondisi rumah</b>			<b>Permanen</b>
	<b>a. Lantai</b>	<b>Tanah</b>	<b>Semen/plester</b>	<b>Keramik</b>
	<b>b. Dinding</b>	<b>Bambu dikapur</b>	<b>Tembok, dicat</b>	<b>Tembok, dicat</b>
3.	<b>Kepemilikan lahan</b>			
	<b>a. Luas</b>	<b>Tidak punya</b>	<b>0,25 - 0.5 ha</b>	<b>&gt; 0.5 ha</b>
	<b>b. Jumlah</b>	<b>Tidak punya</b>	<b>&gt; 1 lokasi</b>	<b>&gt; 1 lokasi</b>
4.	<b>Kepemilikan kendaraan</b>	<b>Tidak punya</b>	<b>Sepeda</b>	<b>Sepeda motor</b>
5.	<b>Pendidikan</b>	<b>Tdk tamat SD</b>	<b>SLTP-SLTA</b>	<b>SLTA-Sarjana</b>

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2011

#### **5.5.3. Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan Program Pemberdayaan Masyarakat pelaksanaan kegiatan program hendaknya dikerjakan oleh masyarakat sendiri, tidak mempergunakan pihak ketiga (CV atau kontraktor). Hal tersebut berkaitan dengan prinsip pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini juga dikerjakan sendiri oleh masyarakat.

**Pada pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat mengatur pembagian kerja antara penduduk perempuan dan laki-laki. Pada rehab gedung sekolah misalnya, ditentukan mandor untuk pekerjaan tersebut penduduk perempuan dan laki-laki, demikian halnya dengan pekerja. Namun khusus untuk tukang hanya diperuntukkan penduduk laki-laki, dengan pertimbangan pekerjaan tukang membutuhkan ketrampilan khusus. Posisi pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, harus diatur dan dilakukan bergiliran agar semua penduduk yang menghendaki terlibat dalam kegiatan tersebut bisa berpartisipasi. Khusus untuk kelompok perempuan, selain terlibat sebagai mandor dan pekerja, ada yang bertugas menyediakan konsumsi yakni yang telah memperoleh giliran sebagai pekerja.**

**Pembagian kerja untuk pengaspalan jalan lebih kurang sama dengan rehab gedung sekolah, termasuk untuk pekerja karena terlalu banyak penduduk yang menghendaki terlibat dalam posisi tersebut. Penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat akan mendapatkan upah sesuai dengan yang diatur Tim Pelaksana kegiatan ini.**

**Pada pelaksanaan pekerjaan rehab gedung sekolah, penduduk laki-laki lebih dominan. Hal tersebut dapat**

**dimengerti karena pekerjaan rehab dan pembangunan gedung baru membutuhkan ketrampilan pertukangan yang pada umumnya dikuasai oleh penduduk laki-laki. Sedang waktu pengaspalan jalan yang mendominasi itu pekerja perempuan. Partisipasi perempuan yang tinggi itu disebabkan oleh karena kegiatan tersebut dipandang sebagai kesempatan kerja, yang selama ini dipandang kurang dan banyak waktu luang yang dimiliki penduduk perempuan.**

**Pemberian kesempatan yang sama bagi penduduk laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Program Pemberdayaan Masyarakat dipandang positif, khususnya oleh penduduk perempuan. Hal tersebut terungkap sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang informan ketika menyatakan pendapatnya kepada salah seorang tim pelaksana, “kalau perempuan yang bekerja kan tidak sebentar-sebentar berhenti, dan juga tidak sebentar-sebentar merokok”, lagi pula “kita (perempuan) tidak senang cerita”. Peran dan kerja sama penduduk perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pengaspalan jalan nampak misalnya ketika itu penduduk laki-laki dan penduduk perempuan bekerjasama dalam pelaksanaan pengaspalan jalan tersebut.**

**Terlepas dari pendapat penduduk perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, faktor ekonomi juga**

**mendorong masyarakat desa (baik laki-laki maupun perempuan) untuk terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan rehab gedung sekolah dan pengaspalan jalan. Faktor atau alasan ekonomi ini pula yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat,**

#### **5.5.4. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat**

**Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan ketika pelaksanaan pekerjaan maupun ketika pekerjaan atau kegiatan selesai. Evaluasi terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh tim pelaksana program. Evaluasi yang dilakukan melaporkan secara kronologis mulai dari pembentukan tim pelaksana, kegiatan yang telah dilaksanakan dan hingga akhir kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan penekanan besarnya partisipasi perempuan dan masyarakat miskin.**

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, dominasi anggota laki-laki relatif tinggi. Sebagai gambaran, dalam sesi tanya jawab, anggota laki-laki lebih mendominasi. Bahkan ketika anggota perempuan tim pelaksana dari desa yang hadir diminta forum untuk menjelaskan kegiatannya, salah seorang anggota perempuan bersedia mengemukakan pendapatnya setelah “dipaksa” oleh fasilitator untuk memberikan penjelasannya.

#### **5.5.5. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Program**

Sebagaimana telah diuraikan di muka, pemilihan kegiatan didasarkan masukan dari masyarakat. Oleh karenanya, hasil program yakni rehabilitasi dan penambahan gedung sekolah serta pengaspalan jalan dan reboisasi, tingkat pemanfaatannya tinggi,

dalam arti masyarakat langsung dapat memanfaatkan ketiga prasarana yang dibangun dengan dana Program Pemberdayaan Masyarakat.

Gambaran secara terinci mengenai pemanfaatan program adalah sebagai berikut: hasil dari rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah langsung dapat digunakan untuk kegiatan belajar. Hasil tersebut meringankan beban orang tua siswa mengingat apabila tidak ada Program perbaikan gedung harus ditanggung oleh orang tua siswa, selain SPP yang harus mereka bayarkan per bulan.

Sedangkan hasil dari pengaspalan jalan, telah memudahkan aktivitas warga, baik para pelajar maupun penduduk desa pada umumnya. Manfaat dari pengaspalan tersebut lebih terasa pada saat musim penghujan, dimana jalan tidak berlubang dan 'becek' sehingga mudah dilewati dan tidak kotor.

Sedangkan pemeliharaan hasil Program Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bergotong royong. Pemeliharaan gedung sekolah misalnya, selain berasal dari uang kebersihan dari orang tua murid, juga berasal dari iuran rutin PKK desa.

Pemeliharaan jalan dan reboisasi dilakukan oleh warga dengan cara kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat setempat, hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan di antara warga untuk bersama-sama melaksanakan perawatan jalan. Salah satu bentuk perawatan yang dilaksanakan tersebut yakni pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan warga dilakukan gotong royong membersihkan jalan.

**Berdasarkan uraian mengenai partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan program serta alasan yang mendasarinya untuk terlibat dalam tim pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di atas, dapat ditarik beberapa makna sebagai berikut :**

**Pertama, prinsip pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin pada Program Pemberdayaan Masyarakat telah dijabarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul ke dalam suatu mekanisme yang memperbesar peluang keterlibatan perempuan dan masyarakat miskin dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Akan tetapi mekanisme tersebut belum memberikan peluang yang sama bagi setiap penduduk perempuan karena peluang lebih besar pada elit perempuan desa.**

**Kedua, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat tidak murni karena kesadaran, tetapi bernuansa suatu keharusan untuk**



**melaksanakan ketentuan program dan mekanisme yang telah dirumuskan.**

**Ketiga, anggota perempuan telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada setiap tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, namun dengan derajat yang berbeda sesuai kemampuan, pengalaman, dan konteks yang melingkupinya.**

**Keempat, anggota perempuan mempunyai kemauan untuk belajar, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi pada setiap tahapan pelaksanaan program.**

## 5.6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bantul

Deskripsi fokus faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari Program Pemberdayaan Masyarakat mengingat program itulah yang dilaksanakan sehingga karakteristik, tujuan, dan prinsip atau nilai yang dikandung akan menentukan keberhasilan pemberdayaan yang ingin diwujudkan. Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki potensi pemberdayaan masyarakat (termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan), karena *blue print* program tersebut sedikit banyak telah mengimplementasikan aspek teoritis pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut setidaknya nampak, pada :

- A. Sifat Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni *participatory planning, monitoring and evaluation*;
  - a. Perencanaan Partisipatif, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat desa/kelurahan yang akan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat, agar tidak ada keengganan bagi mereka berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk desa/kelurahannya. (2) Kegiatan penyusunan proposal dan rancangan teknik pembangunan/ perbaikan sarana dan prasarana.
  - b. Monitoring Partisipatif, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan data secara berkala bagi penilaian proses perencanaan dan proses pelaksanaan, proses pemanfaatan, proses operasi dan pemeliharaan yang kemudian

digunakan untuk memperbaiki tindakan-tindakan pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di berbagai tingkat administrasi keproyekan.

- c. Evaluasi Partisipatif, yaitu kegiatan untuk menilai efektivitas dan efisiensi Pemberdayaan Masyarakat pada berbagai tingkat administrasi keproyekan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan dampaknya.

B. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni bermaksud untuk : (1) mendukung upaya desentralisasi pemerintahan; (2) memberdayakan masyarakat kelurahan/desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah; (3) meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, tata negara, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan pada tingkat kabupaten/kota, (4) mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar, (5) menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal, dan (6) meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar; Ketiga : prinsip dasar Program Pemberdayaan Masyarakat, yakni demokrasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas/dapat dipertanggung jawabkan, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat.

Berkenaan dengan prinsip pemberdayaan, selanjutnya dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan bahwa prinsip pemberdayaan memberikan landasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi partisipatif dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan penduduk dan kelembagaan desa agar mereka mempunyai kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya desa. Dalam prinsip pemberdayaan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan orang miskin dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kapasitas perempuan agar memiliki kompetensi untuk mengelola sumber daya desa, dalam arti memiliki kompetensi untuk : (1) terlibat dalam menentukan kebutuhan perbaikan penduduk dan kelembagaan desa; (2) berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan, dalam arti terlibat dalam pengambilan keputusan dan terwakili dalam setiap tahap kegiatan, (3) melakukan akses segala aspek kehidupan, (4) melakukan kontrol dalam arti pengendalian dirinya sendiri dan pengendalian masyarakat.

Berkaitan dengan sifat, tujuan, dan prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat yang bernuansa pemberdayaan perempuan di atas, dalam derajat tertentu telah

diimplementasikan di desa Kabupaten Bantul. Sebagaimana pemaparan tahapan-tahapan pelaksanaan program di atas nampak bahwa prinsip partisipatif telah diupayakan, termasuk melalui mekanisme yang “memaksa” perempuan dapat terlibat dan berpartisipasi sebagai anggota Tim Pelaksana.

Bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah perlunya penciptaan mekanisme yang dapat “memaksa” perempuan dapat terlibat dan berpartisipasi sebagai anggota Tim Pelaksana kegiatan pemberdayaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di muka, kriteria anggota tim pelaksana adalah separuh laki-laki dan separuh perempuan, bukan PNS dan aparat desa, serta tiap RT mengusulkan laki-laki dan perempuan, demikian halnya ketika memilih melalui mekanisme *voting* tertutup. Mekanisme tersebut memberikan peluang sekaligus “memaksa” perempuan untuk dapat menjadi anggota Tim Sembilan serta berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Peran dan keterlibatan aparat desa maupun pelaksana program. Sebagaimana diuraikan pada tahapan pelaksanaan di muka aparat desa, dalam hal ini sekretaris desa, dan fasilitator masih berperan secara dominan pada setiap tahapan program. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi para pelaksana program terhadap tercapainya target setiap tahapan kegiatan dan aspek formal administratif program. Sebagaimana diketahui pelaksanaan program secara administratif dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu sehingga tahapan-tahapan program akan menentukan pelaksanaan program dalam konteks tahun anggarannya. Hal inilah yang pada akhirnya menunjukkan inkonsistensi fasilitator ketika menyampaikan prinsip program dengan langkah yang diambil. Sebagaimana dijelaskan informan kunci dari tim pelaksana di tingkat desa:

“... mula-mula RAB akan disusun adalah tim di tingkat desa, tapi kemudian tidak jadi, habis kami tidak ada yang bisa. Maklum karena tingkat pendidikan kami itu kurang. Lagi pula kami kurang paham harga-harga material bangunan. Di buku pedoman harga, memang harga-harga sudah ada. Tapi kenyataannya harga tersebut jauh berbeda. Lalu kami disarankan fasilitator untuk minta bantuan orang lain yang lebih tahu saja. Keputusan terakhir minta bantuan Pak Carik yang sudah biasa...”

Langkah keempat dari pelaksana dan pemerintah kabupaten yang kontraproduktif bagi upaya pemberdayaan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (yang pada akhirnya) lebih berorientasi pada aspek fisik. Hal ini terjadi pula di desa Kabupaten Bantul, dimana kedua kegiatan yang akhirnya diusulkan berupa pembangunan fisik.

Selain langkah-langkah di atas, dari sisi internal masyarakat desa setidaknya ditemukan 2 hal yang menghambat upaya pemberdayaan perempuan. Temuan pertama adalah berkenaan dengan orientasi pada elit desa dan elit organisasi desa. Hal tersebut nampak pada perwakilan masyarakat yang menghadiri kegiatan sosialisasi. Sebagaimana diuraikan di muka, perwakilan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah para elit desa atau organisasi desa. Dengan demikian, anggota masyarakat yang berpeluang untuk duduk dalam Tim pelaksana tingkat desapun adalah para elit tersebut. Perwakilan perempuan dan masyarakat miskin yang akhirnya terpilih sebagai anggota Tim pelaksana tingkat desa adalah ketua tim penggerak atau pengurus PKK, Dasa Wisma, ketua Pengajian, ketua RW, dan ketua atau pengurus RT. Orientasi kepada elit desa dan organisasi desa ini mempersempit peluang pemberdayaan pada aras akar rumput.

Temuan yang kedua berkenaan dengan kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim pelaksana dan program Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut telah diuraikan di muka, dimana salah seorang anggota Tim pelaksana di tingkat desa terpaksa tidak melanjutkan aktivitasnya karena tidak diperbolehkan suaminya.

Langkah-langkah pelaksana program dan pemerintah kabupaten beserta kedua temuan lapangan di atas dapat dinyatakan sebagai faktor-faktor penghambat upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan apabila upaya pemberdayaan diharapkan terwujud pada masyarakat desa di Kabupaten Bantul.

Selain faktor penghambat, berdasarkan kajian lapangan ditemukan pula 2 faktor pendukung upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul. Kedua faktor pendukung yang dimaksud adalah :

Faktor pertama, *blue print* Program Pemberdayaan Masyarakat yang secara tegas menyatakan perlunya keterlibatan serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin. Ketegasan nilai atau prinsip program yang sejak sosialisasi telah dinyatakan secara tegas oleh pelaksana program telah mampu mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan Tim pelaksana kegiatan maupun pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya. Hal tersebut dirasakan perbedaannya oleh perempuan dan juga laki-laki apabila dibandingkan dengan program sebelumnya, yang lebih didominasi oleh laki-laki, seperti program air bersih dan P3DT, sebagaimana dinyatakan salah seorang anggota Tim pelaksana kegiatan tingkat desa :

**“Dengan dinyatakannya harus melibatkan perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat ini, ya perempuan merasa diangkat. Tidak laki-laki saja. Merasa diakui, berarti ada kemajuan. Berbeda dengan proyek air bersih, pengaspalan jalan, PDMDKE dan P3DT, IDT, dsb. Perempuan tidak dilibatkan karena program itu tidak mengharuskan terlibat”.**

Penjelasan informan tersebut mengisyaratkan penegasan secara eksplisit nilai atau prinsip program mampu mengangkat mental *target group* untuk terlibat dalam program.

Faktor kedua, anggota perempuan Tim pelaksana kegiatan mempunyai kemauan untuk belajar. Meski anggota-anggota tersebut menyadari keterbatasannya, akan tetapi mereka mau untuk belajar, meski proses belajar tersebut belum optimal.

**Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul di atas, dapat ditarik temuan-temuan atau beberapa makna sebagai berikut :**

**Pertama, faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul adalah belum ada kesepakatan di dalam internal antar pelaksana di tingkat desa, dan pelaksana dengan pemerintah kabupaten; mekanisme yang “memaksa” perempuan terlibat dan berpartisipasi sebagai anggota Tim pelaksana kegiatan di tingkat desa; masih besar peran serta keterlibatan aparatur desa dan pelaksana program; Program Pemberdayaan Masyarakat lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; dan kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim pelaksana tingkat desa dan program Pemberdayaan Masyarakat.**

**Kedua, faktor-faktor pendukung proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim pelaksana tingkat desa maupun pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat; dan**

**anggota perempuan Tim pelaksana tingkat desa mempunyai kemauan untuk belajar.**

**Ketiga, masih besarnya peran aparatur desa dan pelaksana program pada setiap tahapan program disebabkan oleh orientasi para pelaksana program terhadap pencapaian target setiap tahapan kegiatan dan aspek formal administratif program.**

### **5.7. Pembahasan**

Diskursus prospek pemberdayaan perempuan setelah implementasi sebuah program tidak dapat dilepaskan dari potensi program tersebut dalam mewujudkan pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu dikaji nilai dari program, yang dalam kajian ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat. Melalui pengkajian nilai tersebut akan dapat diketahui *substance* maupun perspektif Program Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap *blue print* Program Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana telah diuraikan di muka, setidaknya telah mengimplementasikan 2 aspek teoritis pemberdayaan, yakni partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedangkan aspek terdesentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintahan yang terdekat dengan kelompok sasaran (lihat Vidhyandika Moeljarto, 1996). Implementasi 2 aspek teoritis pemberdayaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat nampak pada sifat Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul yakni *participatory planning, monitoring and evaluation* (PPME) sehingga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat yang dikoordinir Tim Inti, serta “dipasrahkannya” pemanfaatan dana program kepada kelompok perempuan dan masyarakat miskin.

Namun yang patut disayangkan dari potensi pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin pada Program Pemberdayaan Masyarakat adalah tidak dibarengi dengan media yang memungkinkan upaya pemberdayaan berjalan secara efektif. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan program yang lebih bersifat individual ketimbang kolektif (kelompok). Pemilihan media individual tersebut nampaknya disebabkan orientasi program yang lebih pada aspek fisik (pembangunan sarana prasarana umum

dasar). Terlepas dari orientasi program tersebut, sejak awal pelaksanaan program (sosialisasi dan pemilihan tim pelaksana di tingkat desa) orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa sehingga yang berpeluang untuk belajar melalui partisipasi pada setiap tahapan program pada akhirnya adalah elit organisasi desa (ketua dan pengurus PKK, Dasa Wisma, kelompok pengajian, RW, dan RT). Nuansa tersebut akan berbeda seandainya program lebih menggunakan media kelompok sebagai media mewujudkan pemberdayaan karena keberdayaan perempuan sebagai wujud perubahan sosial adalah menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu “senasib” (dalam hal ini kelompok perempuan dan masyarakat miskin) untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok akan lebih efektif (lihat Fiedmann, dalam Vidhyandika Moeljarto, 1996).

Hal kedua yang juga patut disayangkan berdasarkan kajian lapangan adalah penciptaan meknisme yang dapat “memaksa” perempuan dapat terlibat dan berpartisipasi sebagai anggota Tim pelaksana kegiatan di tingkat desa. “Pemaksaan” tersebut memiliki sisi positif dari aspek pentingnya kuota ketika garis awal antara kelompok laki-laki dan perempuan tidak sama, yakni garis *start* kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi pembangunan desa jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Akan tetapi, terhadap fenomena “pemaksaan” tersebut patut dicatat dua hal. Pertama, bentuk pemaksaan bersifat kontradiktif dengan konsep kelompok sebagai media pemberdayaan; bahwa kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif; akan tetapi penting untuk menghindari pembentukan kelompok yang dipaksakan (lihat Vidhyandika Moeljarto, 1996). Kedua, sisi positif dari pentingnya kuota menjadi sia-sia apabila tidak dilanjutkan dengan strategi jangka panjang yang memungkinkan akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan tidak hanya bersifat sementara karena pelaksanaan suatu program. Sebagaimana dijelaskan Sudarshan (senior advisor UNDP) kuota bukanlah “peluru perak”. Kuota dirancang untuk memfasilitasi akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan dan bersifat sementara. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, dan tidak seorang pun, termasuk aktivis perempuan, menganggap kuota sebagai strategi yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi perempuan membutuhkan strategi jangka panjang untuk mengubah praktik-praktik yang telah berjalan lama yang membuat perempuan berada di luar, termasuk luar politik. Dengan demikian, nilai sebuah program yang meski telah dinyatakan secara eksplisit barulah modal awal untuk mengadakan suatu perubahan

sosial, termasuk pemberdayaan perempuan, yang perlu ditindaklanjuti dengan pencarian dan penerapan strategi jangka panjang yang mampu mengubah praktik-praktik yang selama ini menghalangi maujudnya perubahan sosial yang dikehendaki program.

Selanjutnya, berkaitan dengan masih besarnya peran perangkat desa dan fasilitator dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul, perangkat desa dan fasilitator dapat disebut melaksanakan fungsi pendampingan terhadap masyarakat. Pendamping lokal dan pendamping khusus tersebut (lihat Sumodiningrat, 1996), diharapkan menjadi pihak yang membantu kelompok untuk suatu masa tertentu dan diharapkan nantinya kelompok akan dapat berfungsi secara mandiri. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, harus tercipta keinginan saling belajar antara kelompok yang didampingi dan pendamping, tidak berperasaan bahwa yang satu lebih tinggi atau pandai dari lainnya, serta keterlibatan yang intensif dari pendamping sehingga mampu berfungsi sebagai pendorong yang meyakinkan masyarakat akan daya yang mereka miliki (Chambers, 1988). Masih besarnya peran perangkat desa dan fasilitator tersebut menghambat maujudnya harapan Chambers dalam hal hubungan pendamping dengan yang didampingi sehingga berimplikasi pada optimalisasi upaya pemberdayaan perempuan.

Selain hal-hal di atas, orientasi Program Pemberdayaan Masyarakat pada aspek fisik juga dipandang kurang strategis dari sisi teoritis pemberdayaan perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Priyono (1996) pendidikan merupakan faktor kunci upaya pemberdayaan, yang harus ditunjang dan dilengkapi dengan pemberdayaan psikologi, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Guna melengkapi pemaparan dan diskursus di atas, dapat disusun profil gender dalam program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Longwe. Teknik Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan 5 kriteria analisis yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Handayani dan Sugiarti, 2002). Apabila menggunakan teknik tersebut, profil gender selengkapny dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.74.**  
**Profil Gender Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**

Sektor	Proyek	Kesejahteraan	Akses	Penyadaran	Partisipasi	Kontrol
--------	--------	---------------	-------	------------	-------------	---------



Pendidikan	Rehabilitasi Gedung Sekolah	-	netral	+	+	+
Prasarana	Pengaspalan jalan & reboisasi	-	netral	+	+	+

**Sumber : Data Primer diolah tahun 2011.**

Rehabilitasi gedung sekolah sebagai pilihan kegiatan atau Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan pada sektor pendidikan, sedangkan pengaspalan jalan masuk sektor prasarana. Sektor dari Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut selanjutnya dianalisis dari lima dimensi dengan memberikan nilai negatif, netral, atau positif. Nilai positif (+), negatif (-), dan netral pada tabel di atas menunjukkan derajat sensitivitas terhadap isu perempuan pada kedua Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul. Negatif (-) berarti tujuan proyek tanpa mengkaitkan isu perempuan; netral berarti isu perempuan sudah dilihat tetapi tidak diangkat dan ditangani, dan intervensi proyek tidak berakibat lebih buruk pada perempuan; dan positif (+) berarti tujuan proyek betul-betul positif, sehingga hasilnya meningkatkan kedudukan perempuan relatif terhadap laki-laki (Handayani dan Sugiarti, 2002).

Dimensi kesejahteraan merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Berdasarkan dimensi ini, nilai yang diberikan tidak bisa berdasarkan nilai negatif, netral, atau positif secara absolut. Hal tersebut disebabkan, kedua proyek tersebut memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki untuk terlibat serta memperoleh penghargaan (upah) yang sama, sehingga dari perspektif pengangkatan isu kedua proyek mengangkat isu perempuan. Akan tetapi pengangkatan dan penanganan isu perempuan tersebut apabila diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan masih sangat jauh, terlebih ada penjadwalan kerja yang memperoleh upah karena banyaknya masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi.

Kesenjangan gender dari dimensi akses terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Nilai atas dimensi akses ini, pada Program Pemberdayaan Masyarakat lebih bersifat netral dari perspektif nilai kebijakan, isu perempuan sudah dilihat tetapi tidak diangkat dan ditangani, dalam arti program tidak mengkaitkan dengan persoalan sumber daya yang berkait gelandang

dengan produktivitas perempuan; dan meski demikian intervensi kedua Program Pemberdayaan Masyarakat tidak berakibat lebih buruk pada perempuan.

Dimensi penyadaran berkaitan erat dengan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Berdasarkan dimensi ini bernilai positif karena tujuan program betul-betul positif, sehingga hasilnya meningkatkan kedudukan perempuan relatif terhadap laki-laki. Sebagaimana diketahui kedua Program Pemberdayaan Masyarakat telah mensosialisasikan sikap kritis terhadap pembagian kerja gender tradisional dengan menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi dan penghargaan yang sama, senyampang memiliki kemampuan untuk suatu posisi tertentu (pekerja, mandor, tim, dan seterusnya).

Dimensi partisipasi bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan, penentuan kebijakan, dan administrasi. Dimensi partisipasi bernilai positif karena tujuan proyek betul-betul positif, sehingga hasilnya meningkatkan kedudukan perempuan relatif terhadap laki-laki. Sebagaimana diketahui kedua Program Pemberdayaan Masyarakat dengan nilai PPME-nya telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan maupun penetapan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Dimensi kontrol bahwa kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Dimensi kontrol bernilai positif karena kedua Program Pemberdayaan Masyarakat dengan nilai PPME-nya telah menempatkan keseimbangan kuasa perempuan dan laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Berdasarkan tabel 5.74. di atas, diketahui bahwa nilai positif lebih banyak dibandingkan dengan nilai negatifnya. Meski demikian, satu catatan yang harus digarisbawahi adalah nilai positif tersebut lebih pada masuknya isu perempuan pada pelaksanaan program sehingga dampak lebih lanjut pada komunitas perempuan ataupun masyarakat pada umumnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

## BAB VI

# KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai proses dan prospek program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan telah dilibatkan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Keterlibatan perempuan pada tahap awal belum berangkat dari kesadaran tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Meski demikian, pada tahapan kegiatan berikutnya, keterlibatan perempuan mulai memperlihatkan keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Secara keseluruhan, keterlibatan tersebut belum optimal karena masih bersifat pasif.
3. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di dalam internal antar pelaksana di tingkat desa, dan pemerintah kabupaten; mekanisme pelibatan yang bersifat “memaksa”; peran serta keterlibatan aparatur desa dan pelaksana program masih besar; Program Pemberdayaan Masyarakat lebih berorientasi pada aspek fisik; orientasi pemerintah desa masih terfokus pada elit desa dan elit organisasi desa; dan kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan
4. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ada prinsip pemberdayaan perempuan yang tegas untuk mendorong partisipasi perempuan dalam tim pelaksana tingkat desa maupun pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat; dan perempuan yang menjadi anggota tim pelaksana tingkat desa mempunyai kemauan untuk belajar.
5. Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya sangat efektif dan efisien dari sisi dana dan sebaiknya lebih diperbesar alokasi dana dan volume sarannya.
6. Program yang melibatkan perempuan dengan menggunakan pendekatan *community development* pada masyarakat desa pada dasarnya sudah berlangsung baik, namun untuk memaksimalkan proses, output dan outcome perlu ditingkatkan dengan LSM sebagai mitra/fasilitator, bukan perusahaan yang tidak memiliki core bisnis dalam pemberdayaan masyarakat

7. Program pemberdayaan masyarakat yang bersifat teknis sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, fokus perhatian program pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah untuk meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, transparansi dan mekanisme komplain dan keterlibatan perempuan menjadi sangat mutlak dilakukan..
8. Program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perempuan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan kajian proses dan prospek pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul, saran yang bisa diberikan adalah:

1. Program pemberdayaan perempuan seyogyanya lebih dari sekadar untuk mengisi kuota perempuan dalam Tim pelaksana tingkat desa, namun perlu ditindaklanjuti dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan, dan tidak hanya bersifat sementara selama pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan program-program selanjutnya, perlu dibangun kesepahaman antar pelaku akan nilai-nilai yang terkandung dalam program sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan secara lebih optimal.
3. Perlu penerapan strategi yang memungkinkan perubahan orientasi pemerintah desa dan masyarakat dari selalu kepada elit desa dan elit organisasi desa kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya pemberdayaan tidak hanya pada tataran elit melainkan hingga ke akar rumput.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1994, "Esensi Nilai Dalam Kebijakan: Perbincangan Teoritikal", dalam "Kebijakan Publik dan Pembangunan", Z.A. Akhmadi, dkk., Penerbit IKIP Malang.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999, *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Baiquni, 2006, Pengelolaan Sumberdaya Perdesaan Dan Strategi Penghidupan Rumahtangga di DIY Masa Krisis (1998- 2003), *Disertasi*, UGM Yogyakarta
- Baxter J, 2002, Changes in the gender Division of Household about Labour in Australia, 1986 – 1997, in T Eardley and B Bradbury eds, *Competing Visions: Refereed Proceedings of the National Social Policy Conference 2001*, SPRC Report Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Sidney
- Becker, G.S. 1964, *Human Capital : A Theoritical Approach and Emperical Analysis with Special Reference to Education*, New York, Columbia University Press.
- Budiman, 1985 *Pembagian kerja secara seksual*, Jakarta : Gramedia
- ....., 1990. *Pergeseran Peran Laki Laki dalam Rumah Tangga : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta
- Conyers, Diana, 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Alih bahasa Susetiawan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dusseldorp. D.B.W.M., 1981, *Paticipation in Planned Development Influence by Governments of Developing Countries at Local Level in Rural Areas*, Wageningen : Agricultural University.
- Holil Soelaiman, 1980, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi, 2007,. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Keller, B. and D.C Mbwewe, (1991), " Policy and Planning for the Empowerment of Zambia's Women Farmers. " *Canadian Journal of Development Studies* 12 (1): 75-88.
- Lincoln, Yvonna dan Egon G. Guba, 1984, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications, Beverly Hills, London.
- Mardikanto, Totok, 2010, *Komunikasi Pembangunan : Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*, Cetakan Pertama, Edisi I, UNS Press, Surakarta.
- Megawangi, 1997. *Gender Perspective in Early Childhood Care and Development in Indonesia*. Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, M A, USA.
- Mikkelsen, Britha, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, B. Mattew dan A. Michael Huberman (terjemahan), 1994, *Analisis Data kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moeljarto, Vidhyandika, 1996, "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Penyunting Onny S Prijono dan A.M.W. Pranarka, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ndraha, Talizuduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta.
- Oey Mayling, 1985. *Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita Di Indonesia Selama Dasa Warsa 1970 Sebab Dan Akibatnya*. Jakarta. Prisma 14 (10) : 16 - 40
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhyandika Moeljarto, 1996, "Pemberdayaan (Empowerment)", dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Penyunting Onny S Priyono dan A.M.W. Pranarka, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Priyono, Onny S., 1996, "Pemberdayaan Wanita Sebagai Mitra Seajar Pria", dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Penyunting Onny S Priyono dan A.M.W. Pranarka, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Rahardjo, D., 1982, *Esei-esai Ekonomi Politik*, Jakarta, LP3ES.
- Ripley, Randall B., 1985, *Political Analysis in Political Sciences*, Chicago: Nelson Hall Inc.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin, 1967, *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Sajogyo, 1985. *Teknologi Pertanian dan Peluang Kerja Wanita di Perdesaan, Suatu Kasus Padi Sawah Dalam Peluang Kerja Dan Berusaha Di Perdesaan*, Yogyakarta : BPPE - UGM
- Santoso, Amir, 2005, "Pelaksanaan Kebijakan Dalam Kasus Bimas dan KUD", *makalah*.
- Sastropoetra, Santosa, 1986, *Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Slamet, M, 1985, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan, *Interaksi Tahun I* No. 1 : 3-7.
- Strauss, Anselm L. & Yuliet Corbin, 1990, *Basics of Qualitative Research*, Sage Publications, London.
- Sumampouw, Monique, 2004, "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Theodorson, GA, 1969, *Modern Dictionary of Sociology*. In Dusseldorp, 1981. p.33
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- UNAPDI, 1980, *Local Level Planning and Rural Development*, New Delhi : Concept Publishing Company.
- Winardi, 1983, *Asas-asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung.
- Woolock, M. and D. Narayan, 2000, Social Capital : Implication for Development Theory, Research and Policy. In *Research Observer* Vol. 15. No. 2 (August, 2000) : 225-250
- Yin, Robert K., 1987, *Case Study Research Design and Method*, Sage Publications, London.
- Dokumen :
- Bantul Dalam Angka Tahun 2010.
- Bappeda Kabupaten Bantul, Laporan Akhir Studi Evaluasi Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul 2010 Bekerjasama dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri.

Buku I Landasan PPME Dalam P2MPD : Pendekatan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Partisipatif, Bappenas.  
Pedoman Umum Program Pedukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam Bappenas, 2001.  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

